

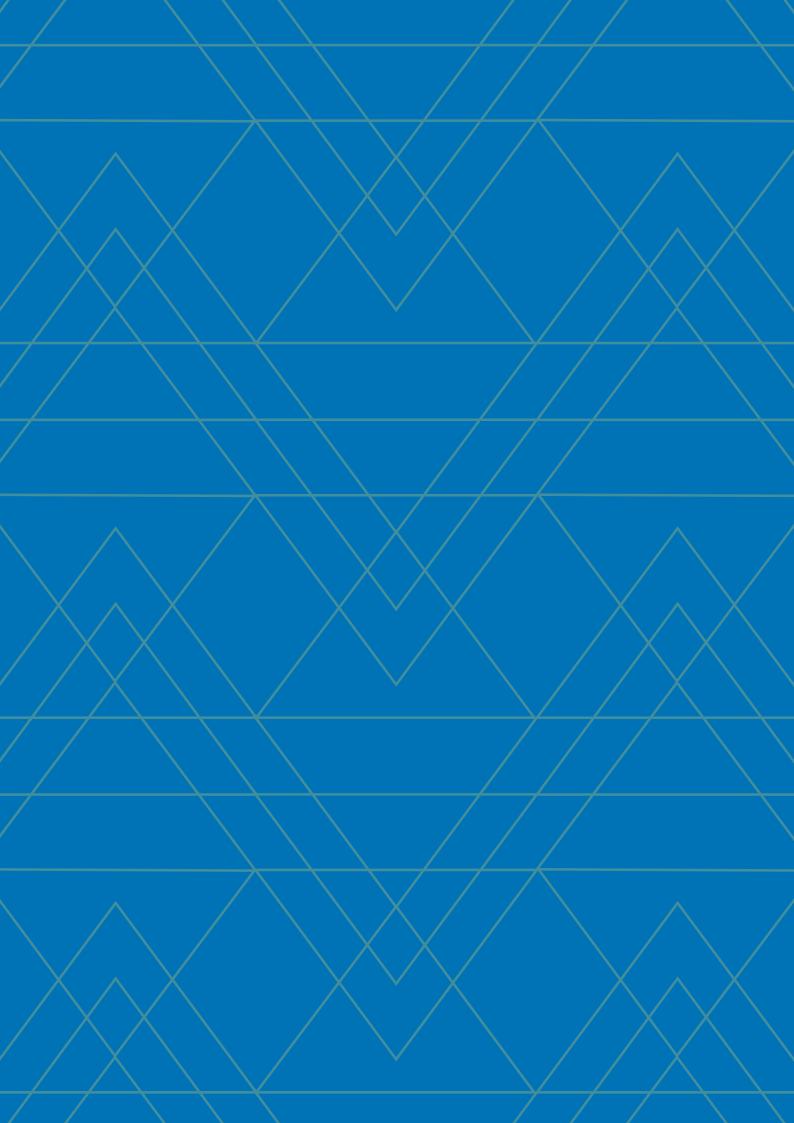


Laporan Delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

DALAM RANGKA MENGHADIRI
VIRTUAL MEETING OF THE 42nd GENERAL ASSEMBLY OF
ASEAN INTER-PARLIAMENTARY (AIPA)

"Forging Parliamentary Cooperation In Digital Inclusion
Towards ASEAN Community 2025"





DAFTAR ISI

- PENDAHULUAN
 - LATAR BELAKANG
 - DASAR HUKUM PENGIRIMAN DELEGASI
 - MAKSUD DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI
 - MISI DELEGASI
 - PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS
 - ANGGARAN
- ISI LAPORAN
 - AGENDA SIDANG
 - SITUASI UMUM PERSIDANGAN
 - PARTISIPASI DELEGASI DPR RI
- HASIL-HASIL YANG DICAPAI
- KESIMPULAN DAN SARAN
 - KESIMPULAN
 - SARAN
- PENUTUP
 - UCAPAN TERIMAKASIH
 - KETERANGAN LAMPIRAN
 - **O KATA PENUTUP**



LAPORAN DELEGASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA MENGHADIRI THE VIRTUAL MEETING OF THE 42nd GENERAL ASSEMBLY OF ASEAN INTER-PARLIAMENTARY (AIPA)

"Forging Parliamentary Cooperation In Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025"

Bandar Seri Begawan - Brunei Darussalam 23 - 25 Agustus 2021

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

General Assembly of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) atau Sidang Umum AIPA merupakan badan pembuat keputusan tertinggi di AIPA yang diselenggarakan sekali setiap tahun di salah satu negara Anggota AIPA berdasarkan urutan alpabetis (alphatical order). Dengan demikian, Sidang Umum AIPA merupakan rangkaian persidangan dari berbagai alat kelengkapan organisasi AIPA yaitu:

- President of AIPA
- Executive Committee
- Standing Committee (Political Matters, Economic Matters, Social Matters, Organizational Matters, WAIPA Matters, Dialogue Matters)
- Study Committee /Adhoc Committee (AIPACODD, AIPA Caucus)
- Young Parliamentarians of AIPA

Sidang Umum ke-42 AIPA dengan tema "Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025" diselenggarakan secara virtual di Bandar Seri Begawan – Brunei Darussalam, dikarenakan pandemi COVID-19 yang belum mereda. Ini untuk kedua kalinya setelah Sidang Umum ke-41 AIPA di Hanoi – Vietnam yang juga diselenggarakan secara virtual.

Satu catatan penting dari Sidang Umum ke-42 AIPA adalah implementasi Resolution on the Submission of the Draft Resolution of AIPA Member Parliaments (Res 39GA/2018/Org/06) yang menjamin pengajuan Emergency Item untuk ditetapkan oleh Executive Committee, diluar pengajuan Draft Resolusi yang menjadi hak masing-masing Anggota. Delegasi DPR RI memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengajukan Draft Resolution on Parliamentary Support on the Situation in Myanmar.

Kehadiran dan partisipasi DPR RI dalam Sidang Umum ke-42 AIPA ini dijamin oleh Article 5 Statuta AIPA yang secara tegas menyebutkan "The words "National Parliament" shall mean, for Indonesia the Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives),". Selain itu, keterlibatan Indonesia melalui DPR RI di forum AIPA ini juga merupakan pengejawantahan dari mandat yang tertuang pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang



mewajibkan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

Mandat tersebut juga dituangkan dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1, atau biasa disebut UU MD3, yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan UU MD3 tersebut, Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menegaskan bahwa tiga fungsi DPR RI (pengawasan, penganggaran, legislasi) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Untuk itu, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai Alat Kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap, secara spesifik diberi mandat untuk menjalankan diplomasi parlemen. Sesuai dengan Pasal 116 UU MD3 dan Pasal 82 Tata Tertib DPRRI Tahun 2020, tugas BKSAP antara lain: membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain. BKSAP menjadi ujung tombak diplomasi parlemen dan menjadi pintu masuk bagi penguatan hubungan bilateral, regional, dan internasional antar parlemen.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Partisipasi Delegasi DPR RI pada Sidang Umum ke-42 AIPA ini berdasarkan :

- 1. Article 5 of the Statuta of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
- Surat Nomor JMM/YDP/R13/III tanggal 22 Juni 2021 dari Ketua Parlemen Brunei Darussalam kepada Ketua DPR RI perihal Undangan untuk menghadiri Sidang Umum ke-42 AIPA yang diselenggarakan secara virtual
- 3. Hasil keputusan Rapat Pimpinan BKSAP tanggal 10 Agustus 2021 yang menyetujui kehadiran Delegasi DPR RI di Sidang Umum ke-42 AIPA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah beberapa kali diubah yaitu: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, D

3

4. Surat Tugas Nomor 14/D/ST/PD-DN/BKSAP-KSR/08/2021 tentang Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Sidang Umum ke-42 ASEAN *Inter-parliamentary Assembly*.

C. Susunan Delegasi

Adapun susunan dan komposisi Delegasi DPR RI ke Virtual Meeting of the 42nd General Assembly of AIPA adalah sebagai berikut:



Dr (H.C.) Puan Maharani F-PDIP/A-188 Ketua DPR RI / Ketua Delegasi



Dr. H.M. Azis Syamsuddin, SH.,SE.,MAF.,MH F-P.Golkar/A-282 Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan Wakil Ketua Delegasi



Dr. Fadli Zon, SS, M.Sc. F-P.Gerindra/A-86 Ketua BKSAP / Anggota Delegasi



Putu Supadma Rudana, MBA F-P.Demokrat/A-563 Wakil Ketua BKSAP / Anggota Delegasi





Dr. Mardani Ali Sera, M. Eng F-PKS/A-422 Wakil Ketua BKSAP / Anggota Delegasi



Ir. H. Achmad Hafisz Tohir F-PAN/A-487 Wakil Ketua BKSAP / Anggota Delegasi



Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, MCOMN&MEDIAST F-PDIP/A-262 Anggota BKSAP / Anggota Delegasi



I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE, MM F-PDIP/A-234 Anggota BKSAP / Anggota Delegasi



Ir. H. Moch, Ichsan Firdaus F-P.Golkar/A-292 Anggota BKSAP / Anggota Delegasi



Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos, M.Si F-P.Gerindra/A-78 Anggota BKSAP / Anggota Delegasi



Arkananta Akram, ST, BE (Hons), M.Eng, M.Sc F-P.Nasdem/A-392 Anggota BKSAP / Anggota Delegasi



Arzeti Bilbina, SE, MAP F-PKB/A-32 Anggota BKSAP / Anggota Delegasi



Muslim, S.HI, MM F-P.Demokrat/A-523 Anggota BKSAP / Anggota Delegasi



H. Syahrul Aidi Maazat, Lc. MA F-PKS/A-418 Anggota BKSAP / Anggota Delegasi



Selama persidangan berlangsung, Delegasi DPR RI didampingi oleh Pejabat dan Staff Setjen DPR RI, Tenaga Ahli BKSAP, serta Pejabat dan Staff Kementerian Luar Negeri RI.

D. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

a. **Maksud**

Maksud dari pengiriman Delegasi DPR RI mengikuti Sidang Umum AIPA ke-42 yaitu:

- 1) Memperkuat persahabatan dan meningkatkan kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara-negara anggota AIPA dan negara-negara Obeserver AIPA;
- 2) Mendorong AIPA dan negara-negara Anggota AIPA agar menghasilkan resolusi-resolusi yang implementatif dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan regional sehingga AIPA dapat menjadi organisasi parlementer yang kredibel di kawasan.

b. **Tujuan**

Sedangkan tujuan dari pengiriman Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-42 AIPA adalah :

- Berpartisipasi aktif dalam Sidang Umum AIPA untuk pemanfaatan yang optimal dari pembayaran kontribusi tahunan AIPA yang secara rutin telah dibayarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- 2. Penguatan peran diplomasi parlemen Indonesia di kawasan ASEAN dan memainkan peran memimpin (*role of leadership*) sebagai negara demokrasi dengan penduduk muslim terbesar kedua didunia.

E. Misi Delegasi

Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-42 AIPA mengemban misi untuk:

- 1. memperjuangkan *Emergency Item* berupa *Draft Resolution on Parliamentary Support on the Situation in Myanmar.* Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mengajukan *Emergency Item*
- 2. penganugerahan AIPA Distinguished Services Award Tahun 2021 kepada Bapak Dr. Fadli Zon, SS, M.Sc
- 3. memperjuangkan Draft Resolusi usulan Indonesia di Komisi Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial, Komisi Organisasi, Sidang WAIPA, dan Sidang Young Parliamentarians agar dapat disetujui secara konsensus dan diadopsi menjadi Resolusi AIPA

F. Persiapan Pelaksanaan Tugas

Serangkaian kegiatan dilakukan pada masa persiapan partisipasi Delegasi DPR RI pada Sidang Umum ke-42 AIPA, baik persiapan teknis maupun persiapan substansi. Guna kelancaran tugas Delegasi dari segi teknis, Sekretariat BKSAP

menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung bagi keikutsertaan Delegasi dalam Sidang Umum AIPA. Sementara dari segi substansi, Sekretariat bersama Tenaga Ahli telah menyusun rancangan-rancangan resolusi dan posisi delegasi, dengan mempertimbangkan masukan yang komprehensif dari Kementerian Luar Negeri RI.

Untuk efektifitas partisipasi Delegasi DPR RI dalam Sidang Umum ke-41 AIPA yang diselenggarakan secara daring ini diterapkan pembagian tugas Delegasi dan kehadiran Delegasi DPR RI dilaksanakan dari Swiss-belhotel Tangerang.

G. Anggaran

Kegiatan partisipasi Delegasi DPR RI pada Sidang Umum ke-42 AIPA ini menggunakan anggaran APBN dari anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Dewan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.289.826.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah).

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA SIDANG

Sidang Umum ke-42 AIPA yang mengambil tema "Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025" ini diawali dengan pengajuan sejumlah agenda dan rancangan resolusi yang dibahas dan disepakati secara konsensus melalui Sidang Komite Eksekutif yang dilaksanakan melalui komunikasi dengan surat menyurat dan email.

Panitia menetapkan jadwal batas waktu terakhir yang harus dipatuhi oleh semua Anggota AIPA sebagai berikut:

| 5 Juli 2021 | Pengajuan nominasi AIPA Distinguished Service Award |
|-----------------|--|
| 9 Juli 2021 | Pengajuan Draft Resolution Sidang Umum ke-42 AIPA |
| 6 Agustus 2021 | Pengajuan <i>Message of Head of State</i> dan registrasi |
| | Delegasi |
| 17 Agustus 2021 | Pengajuan <i>Emergency Item</i> dan Penyampaian |
| | Keputusan Executive Committee |

Adapun agenda yang akan dibahas pada Sidang Umum AIPA ke-42 yang telah disepakati oleh Komite Eksekutif adalah sebagai berikut:

Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

1. Promoting Women's Economic Empowerment in the Future of Work and Post Pandemic Recovery through Digital and Financial Inclusion (Proposed by Brunei Darussalam).

Committee on Political Matters

- 1. Report of the 12th AIPA Caucus
- 2. Enhancing Cybersecurity and Data Protection towards a Resilient Cyberspace in ASEAN (Proposed by Brunei Darussalam)
- 3. Fostering Human Security to Achieve Digital Inclusion in ASEAN (Proposed by Malaysia)



- 4. Promoting Parliamentary Diplomacy to Move the ASEAN Community Forward (Proposed by Thailand)
- 5. Parliamentary Support on the Situation in Myanmar (Proposed by Indonesia)

Committee on Economic Matters

- 1. Promoting Inclusive Digital ASEAN to Empower MSMEs and Strengthen the ASEAN Economic Integration (Proposed by Brunei Darussalam and Malaysia)
- 2. Post-COVID-19 Economic Recovery: Tourism Cooperation in ASEAN (Proposed by Thailand).

Committee on Social Matters

- 1. Report of the 4th AIPACODD Meeting and Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN (Proposed by Brunei Darussalam).
- 2. Strengthening Cooperation and Enhancing Digital Inclusion to Mitigate Climate Change Impacts (Proposed by Brunei Darussalam).
- 3. Technology to Facilitate Greater Election Participation (Proposed by Malaysia).
- 4. Localising the Sustainable Development Goals for Effective National Implementation (Proposed by Malaysia).

Committee on Organizational Matters

- 1. Financial Report 2020-2021
- 2. Draft Resolution on Granting Permission to Use Special Funds for the Payment of Cost-Sharing of the New Premises of AIPA Secretariat and for the Minor Adjustment in the Salary of the Locally Recruited Staff of the AIPA Secretariat
- 3. Budget Estimation 2021-2022
- 4. Secretariat's Annual Report 2020-2021
- 5. Accrediting the Parliament of Ukraine as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
- 6. Accrediting the National Assembly of the Islamic Republic of Pakistan as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
- 7. Accrediting the Parliament of Georgia as an Observer of ASEAN InterParliamentary Assembly (AIPA) Accrediting the Observer Applications
- 8. Amendment to the AIPA Status
- 9. Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly
- 10. Guidelines and Procedures of the AIPA-ASEAN Dialogue
- 11. Rules & Procedures of the Meeting of the Young Parliamentarians of AIPA
- 12. Establishment of the AIPA-EP Dialogue
- 13. AIPA Distinguished Service Award to H.E. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap (Cambodia)
- 14. AIPA Distinguished Service Award to Hon. Dr. Fadli Zon (Indonesia)
- 15. Appreciation of the President of AIPA
- 16. Date and Venue of the 43rd AIPA General Assembly

Sedangkan jadwal persidangan Sidang Umum ke-42 AIPA sebagai berikut: Senin, 23 Agustus 2021

- Opening Ceremony
- First Plenary Session
 - Nomination of Vice-Presidents of the 42nd AIPA General Assembly
 - Introduction of Delegations
 - Discussion and Approval of:
 - o Program of Activities for the 42nd AIPA General Assembly
 - o Agenda for the 42nd AIPA General Assembly
 - o Composition of 42nd AIPA Committee
 - o Consideration of the Host of the 13th AIPA Caucus
 - o Consideration of the Host of the 5th AIPACODD
 - o Date and Venue of the 43rd General Assembly of AIPA
 - o Other matters.
- Statements of Heads of AIPA Member Delegations
- Statement by AIPA Secretary General
- Statement by ASEAN Secretary General
- Statements by Leaders of Observer Delegations
- Statement by the Guests of the Host
 - Representative of the Republic of the Union of Myanmar
 - Inter-Parliamentary Union
 - Asia-Pacific Parliamentary Forum
- Meeting of the Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

Selasa, 24 Agustus 2021

- Meeting of the Committee for Political Matters
- Meeting of the Committee for Economic Matters
- Meeting of the Committee for Social Matters

Rabu, 25 Agustus 2021

- Meeting of the Committee for Organizational Matters
- Second Plenary
 - Presentation and Adoption of Reports:
 - Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)
 - Committee on Political Matters
 - Committee on Economic Matters
 - Committee on Social Matters
 - Committee on Organizational Matters
 - Signing of the Joint Communiqué
 - Presentation of the AIPA Distinguished Service Award
- Announcement of the Date and Venue of 43rd General Assembly of AIPA
- Closing Ceremony
 - Closing Remarks by His Excellency Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, the President of the 42nd AIPA and Speaker of the Legislative Council of Brunei Darussalam
 - Transfer of AIPA Presidency for 2022
 - Presentation of Video Clip from the National Assembly of Cambodia



Acceptance Speech by the President of the 43rd General Assembly of AIPA

B. SITUASI UMUM PERSIDANGAN

Sidang Umum ke-42 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dengan tema: "Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025" telah berlangsung secara daring dari Parlemen Brunei Darussalam di Bandar Seri Begawan pada tanggal 23-25 Agustus 2021 dipimpin oleh Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam, H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib selaku Presiden AIPA dan dihadiri secara virtual oleh delegasi dari seluruh Parlemen Anggota AIPA kecuali Myanmar, 10 Parlemen Pengamat (Observer), Tamu Tuan Rumah Penyelenggara (Guest of the Host), Sekretariat AIPA dan ASEAN.

1. Executive Committee Meeting (Excom)

Sidang Komite Eksekutif dilaksanakan melalui korespondensi e-mail. Presiden Komite Eksekutif, Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, mengirimkan surat kepada para Anggota Komite Eksekutif AIPA pada tanggal 3 Agustus 2021 untuk mempersiapkan program, agenda dan halhal terkait lainnya yang berkaitan dengan Sidang Umum untuk mendapatkan input/masukan.

Setelah berkonsultasi dengan seluruh anggota Komite Eksekutif dan mendapatkan persetujuan, maka pada 17 Agustus 2021, Presiden Komite Eksekutif dan juga Presiden AIPA ke-42, menginformasikan beberapa hal yaitu:

- Komite Eksekutif menerima penyampaian emergency item mengenai Draft Resolution on Parliamentary Support on the Situation in Myanmar yang diusulkan oleh Indonesia
- Mengadopsi Program Kegiatan dan Draf Agenda Sidang Umum ke-42 yang telah disesuaikan dengan diterimanya usulan emergency item dari Indonesia dan akan dibahas pada Committee on Political Matters
- Menominasikan Presiden National Assembly of Cambodia selaku Presiden AIPA berikutnya sebagai Vice-Chairperson Executive Committee Meeting
- Mengadopsi komposisi komisi, nominasi untuk AIPA Distinguished Service Award, serta penerimaan Pengamat/Observer baru
- Sepakat untuk menyelenggarakan Sidang Umum AIPA ke-43 di Kamboja sebagai tuan rumah, dengan kursi kepresidenan AIPA berikutnya yang dipegang oleh *The National Assembly of Cambodia*

2. Opening Ceremony

Upacara Pembukaan Sidang Umum ke-42 AIPA dilaksanakan pada hari Senin, 23 Agustus 2021, dimulai pukul 09.00 WIB. H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib, Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam selaku Presiden AIPA menyampaikan pidato pembukaannya. Pada pidato pembukaannya, H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib menyambut hangat seluruh Parlemen Anggota AIPA, observer, tamu dan mitra kerja yang dengan semangat persahabatan serta kerjasama tinggi berkenan menghadiri Sidang Umum ke-42 AIPA secara virtual, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Sesuai dengan tema Sidang Umum ke-42 AlPA, "Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025", H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib menghimbau agar transformasi digital yang inklusif dapat menjadi prioritas untuk membangun ketahanan dan persiapan yang lebih baik bagi generasi saat ini dan di masa mendatang dalam menghadapi era pasca pandemi. Dijelaskan pula, bahwa tema yang diangkat tahun ini tidak hanya bertujuan menyambut, mempromosikan dan menjadikan inklusi digital sebagai sebuah cara untuk memperkuat kerjasama parlemen yang lebih jauh di tengah pandemi, melainkan menyoroti pula peran penting parlemen dalam mendukung visi ASEAN 2025 untuk membentuk komunitas ASEAN yang kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi dan bertanggungjawab secara sosial. Sejumlah isu lain seperti pemberdayaan perempuan, perubahan iklim, keamanan siber, dan penguatan integrasi ekonomi juga masuk dalam agenda Sidang Umum AIPA tahun ini. Oleh karenanya, penting bagi anggota parlemen AIPA untuk memastikan keselerasan dengan dasar niat kolektif, bersatu dalam tekad dan tujuan yang sama.

Acara berikutnya dilanjutkan dengan penyampaian pidato kenegaraan oleh H.M. Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin, sebagai Tamu Kehormatan (Guest of Honour), Sultan sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Brunei Darussalam yang dibacakan melalui rekaman video. Dalam pesan videonya, H.M. Sultan Hassanal Bolkiah, menyambut para delegasi ke Sidang Umum ke-42 AIPA yang diadakan secara virtual dan menyoroti tema kepemimpinan ASEAN 2021 yang dipegang Brunei Darussalam, yaitu "We care, We Prepare, We Prosper" yang merefleksikan upaya kontinyu ASEAN merespon dengan cepat dalam memperhatikan masyarakatnya di tengah situasi yang tidak menentu. Melalui tema yang diusung Sidang Umum kali ini, H.M. Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin menegaskan komitmen Parlemen Anggota AIPA dalam membangun ASEAN sebagai masyarakat digital dan blok ekonomi yang terdepan, melalui harmonisasi peraturan, serta standarisasi hukum dan kebijakan di seluruh wilayan ASEAN. H.M. Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin juga menekankan kegigihan Parlemen dalam menjadikan AIPA kunci organisasi dan platform yang meningkatkan kerjasama multilateral dalam rangka mewujudkan keinginan kolektif ASEAN yaitu melihat generasi sekarang dan masa depan untuk dapat terus menikmati perdamaian, keamanan, kemakmuran, dan pertumbuhan ekonomi.

H.M. Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin juga menyampaikan keyakinannya bahwa diskusi dalam Sidang Umum ke-42 AIPA akan



mengembangkan cara-cara baru mengenai bagaimana AIPA dan ASEAN dapat bekerja bersama untuk merespon secara efektif berbagai tantangan global dan regional. **H.M. Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin** juga menyerukan kepada seluruh anggota parlemen ASEAN untuk melanjutkan kerjasama dengan para *observer* AIPA.

3. First Plenary Session

Sidang Pleno Pertama pada Sidang Umum ke-42 AIPA dilaksanakan pada hari Senin, 23 Agustus 2021 pukul 10.30 WIB. Sidang pleno tersebut dipimpin oleh H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib, Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam selaku Presiden AIPA, yang diawali dengan pembukaan Sidang dan undangan kepada masing-masing delegasi untuk memperkenalkan diri.

Pada sidang pleno pertama ini, turut didiskusikan dan diputuskan agenda persidangan. Selain itu, masing-masing Ketua Delegasi menyampaikan sambutannya pada sesi paripurna pertama ini.

4. Meeting of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

Sidang Woman Parliamentarians of AIPA dilaksanakan secara virtual pada tanggal 23 Agustus 2021 mulai pukul 16.00 hingga 18.00 WIB. Sidang dipimpin oleh Hon. Ms. Siti Rozaimeriyanty Dato Seri Lela Jasa Haji Abdul Rahman selaku Ketua Sidang yang juga merupakan Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam, didampingi Wakil Presiden dari tuan rumah Sidang Umum AIPA berikutnya, yaitu Kamboja.

Dengan semangat kerjasama, persatuan dan persaudaraan ASEAN, para delegasi berdiskusi untuk memastikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi fokus utama dalam upaya pemulihan pasca pandemi. Hal tersebut sejalan pula dengan mandat AIPA untuk mendukung tujuan ASEAN *Community* 2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang bercita-cita menuju komunitas inklusif dan mencapai kesetaraan gender serta memastikan tidak ada yang tertinggal.

Sidang membahas dan mengadopsi resolusi tentang Mempromosikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dalam Lingkup Kerja di Masa Mendatang dan Pemulihan Pasca Pandemi melalui Inklusi Finansial dan Digital; Resolution on Promoting Women's Economic Empowerment in the Future of Work and Post Pandemic Recovery Through Digital and Finacial Inclusion.

Resolusi memuat pengakuan terhadap ketimpangan gender yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang kohesif secara politik, terintegrasi secara ekonomi dan bertanggungjawab secara sosial.

Diskusi fokus membahas akses digital dan inklusi finansial bagi perempuan, melampaui isu kesetaraan gender, yang merupakan bagian esensial dan berhubungan dengan pembangunan politik, sosial dan ekonomi negara. Oleh karenanya, Komite menekankan perlunya membangun sebuah

kerangka kerja dan serangkaian rekomendasi kebijakan untuk menutup gap gender digital tersebut, dan mempersiapkan perempuan dalam area kerja di masa mendatang dan pemulihan pasca pandemi, serta meningkatkan sistem hukum nasional dan kerjasama regional untuk memastikan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi finansial dan digital di era pasca pandemi.

Selain akses terhadap sumberdaya finansial untuk memastikan inklusi finansial, Komite juga menyepakati bahwa perempuan harus mendapatkan jaminan dengan mekanisme perlindungan sosial yang cukup untuk menjaga stabilitas dan keamanan finansial dengan pengembangan layanan finasial digital.

5. Sidang Komisi Politik

Sidang Komisi Politik dilaksanakan pada 24 Agustus 2021 pukul 08:30 WIB hingga 11:30 WIB dipimpin oleh Hon. Ms. Nik Hafimi Abdul Haadii, Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam, sebagai Ketua Sidang didampingi Wakil Presiden dari negara tuan rumah Sidang Umum berikutnya, Kamboja.

Sebelum diskusi dimulai, Ketua Sidang mengingatkan prinsip konsensus dalam mekanisme pembuatan keputusan yang mendasari pelaksanaan sidang. Dengan perspektif tersebut, Ketua Sidang menekankan bahwa ketidaksetujuan dalan satu agenda pembahasan sepatutnya tidak akan mengganggu agenda pembahasan lainnya.

Komisi Politik membahas beragam isu yang terkait dengan 5 (lima) rancangan Resolusi. Resolusi pertama mengenai "Adoption of the Report of the 12th AIPA Caucus held via Video Conference hosted by the Parliament of Singapore" yang diterima dan disetujui untuk diadopsi. Resolusi kedua tentang "Enhancing Cybersecurity and Data Protection Towards a Resilient Cyberspace in ASEAN" yang mengakui adanya pertumbuhan perdagangan elektronik yang secara signifikan berkontribusi pada ekonomi global, namun secara paralel juga membawa ancaman pada keamanan siber dan perlindungan data. Komisi mengakui pentingnya keamanan siber untuk memaksimalkan keuntungan digitalisasi bagi pengembangan politik dan sosio-ekonomi. Dalam hal ini, Komisi sepakat bahwa Parlemen Anggota AIPA memainkan peran penting dalam memastikan keamanan siber dan perlindungan data di kawasan, melalui regulasi, kebijakan dan peraturan dari negara-negara anggota ASEAN.

Komisi Politik juga berbagi pandangan yang memperkuat kapabilitas masing-masing Computer Emergency Response Teams (CERTs) dan agen penegakkan hukum keamanan siber nasional, sebagaimana mendorong implementasi aktivitas bersama kawasan untuk mempererat kerjasama dan kolaborasi dalam bidang keamanan siber dan perlindungan data, dalam rangka memastikan implementasi yang praktis dan efektif dari 11 prinsip sukarela-norma yang tidak mengikat perilaku negara dalam dunia siber.

Resolusi ketiga tentang "Fostering Human Security to Achieve Digital Inclusion in ASEAN". Komisi Politik berbagi pandangan bahwa inklusi digital merupakan salah satu dari pilar utama pemulihan COVID-19 dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan keamanan manusia merupakan sebuah pendekatan yang penting dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan beragam tantangan yang luas serta lintas sektor untuk bertahan hidup, mempertahankan mata pencaharian dan martabat masyarakat di kawasan.

Komisi Politik membahas dan mengeksplorasi peran AIPA dalam menyelesaikan isu tersebut, dan kemudian menyepakati bahwa Anggota Parlemen AIPA harus memaksimalkan pemanfaatan AIPA sebagai platform dalam mempromosikan isu keamanan manusia untuk mencapai inklusi digital melalui dialog yang sarat makna dan pertukaran pengalaman. Lebih jauh, parlemen Anggota AIPA harus memperkuat diplomasi parlemen untuk mendukung dan melengkapi upaya diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah di masing-masing negaranya. Komisi oleh karenanya, menyampaikan permintaan kepada Sekretariat AIPA untuk melihat potensi kerjasama dengan *United Nations Trust Fund for Human Security* (UNTFHS) dan mengeksplorasi area kerjasama yang potensial.

Resolusi keempat mengenai "Promoting Parliamentary Diplomacy to Move the ASEAN Community Forward". Sesuai dengan maksud dan tujuan AIPA sebagaimana ditetapkan dalam Statuta yaitu untuk menggerakkan ASEAN menuju pencapaian sasaran ASEAN dengan menawarkan kontribusi parlemen terhadap integrasi ASEAN, Komisi sepakat bahwa sebagai perwakilan masyarakat ASEAN, parlemen Anggota AIPA harus berperan menjadi penghubung yang kuat bagi komunitas ASEAN yang berfokus pada masyarakatnya, melalui diplomasi parlemen.

Komisi menekankan bahwa diplomasi parlemen dapat lebih berperan dalam menyelesaikan dampak multidimensi akibat pandemi melalui diantaranya, pertukaran pandangan. Komisi juga mengingatkan perlunya melengkapi upaya neagara-negara anggota ASEAN dalam percepatan integrasi dan pembangunan komunitas kawasan melalui diplomasi parlemen.

Komisi sepakat untuk memperkuat diplomasi parlemen melalui semua level kegiatan AIPA untuk memajukan komunitas ASEAN. Komisi juga sepakat untuk memperkuat diplomasi parlemen antara AIPA dan organisasi internasional lainnya seperti IPU, APPF dan mitra parlemen penting lainnya. Dan lebih jauh, Komisi mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk secara aktif bergabung dalam kegiatan AIPA, untuk mempromosikan sinergi antara AIPA dan ASEAN.

Dan resolusi yang kelima tentang "Parliamentary Support on the Situation in Myanmar" yang diusulkan oleh Indonesia untuk menyerukan perdamaian, stabilitas dan demokrasi kembali kepada Myanmar. Seluruh parlemen anggota AIPA dalam Komisi bertukar pandangan mengenai draft resolusi ini secara berurutan. Masing-masing menyampaikan perhatiannya yang mendalam terhadap situasi di Myanmar dan meminta upaya dari semua pihak untuk mencari solusi damai atas nama kepentingan

masyarakat Myanmar. Seluruh delegasi juga menyampaikan dukungan penuh mereka untuk pelaksanaan menyeluruh dan segera terkait Lima Poin Konsensus Myanmar dan menyambut baik penunjukkan Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk memfasilitasi dialog yang inklusif dan konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan terhadap solusi damai. Komisi juga menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan melalui AHA centre.

6. Sidang Komisi Ekonomi

Sidang Komisi Ekonomi dilaksanakan secara virtual pada 24 Agustus 2021 pukul 12:45 WIB sampai 14:15 WIB. Sidang dipimpin oleh Ms. Siti Rozaimeriyanty Dato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam sebagai Ketua Sidang didampingi Wakil Ketua dari negara tuan rumah Sidang berikutnya yaitu Kamboja. Sidang Komisi Ekonomi dilaksanakan dengan semangat kerjasama, persatuan dan persahabatan tradisional ASEAN. Sidang membahas 2 (dua) resolusi.

Resolusi pertama tentang "Promoting Inclusive Digital ASEAN to Empower MSMEs and Strengthen the ASEAN Economic Integration". Resolusi ini dibahas sehubungan dengan adanya kesadaran terhadap dampak COVID-19 yang telah berpengaruh terhadap ekonomi, khususunya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pentingnya integrasi ekonomi sebagai agenda utama Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagaimana inklusi digital di ASEAN. Komisi menegaskan peran penting yang dimainkan teknologi digital dalam memperkuat konektivitas ekonomi serta kesiapan ASEAN dalam merespon berbagai tantangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Komisi juga menekankan pentingnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian ASEAN yang beragam dan dinamis. Komisi membahas lebih jauh terkait pengembangan kapabilitas dan jaringan UMKM, termasuk peningkatan dan pelatihan ulang keahlian digital UMKM.

Sidang Komisi Ekonomi memutuskan untuk memajukan kebijakan dan legislasi melalui harmonisasi integrasi digital ekonomi ASEAN, yang memprioritaskan konektivitas, terutama konektivitas area terpencil dan sub-kawasan, integrasi kawasan dan mempersempit jurang pembangunan antara negara anggota ASEAN dalam berkoordinasi menangkap berbagai peluang transisi menuju Revolusi Industri Ke-empat dalam pengintegrasian berbagai sektor kunci menuju integrasi ekonomi ASEAN. Lebih jauh, Komisi mendorong transformasi dan ekonomi digital sebagai sebuah jalan ke depan untuk mengupayakan penyediaan kesempatan yang lebih baik bagi UMKM, dan untuk mengatasi dampak gangguan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Resolusi kedua tentang "Post COVID-19 Economic Recovery: Tourism Cooperation in ASEAN". Resolusi ini menekankan tentang kerusakan yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19 terhadap sektor turisme di dunia, khususnya ASEAN, dimana ekonomi sangat bergantung pada sektor tersebut. Komisi menekankan bahwa sektor pariwisata akan memainkan peran penting dalam memberikan solusi berkelanjutan untuk kawasan



ASEAN pasca pandemi COVID-19 dengan memperkuat kerjasama di antara masing-masing Negara Anggota.

Sepanjang diskusi dan pembahasan resolusi, Komisi Ekonomi menegaskan kembali komitmen AIPA untuk mendukung secara penuh Rencana Strategis Turisme ASEAN 2016-2025 dengan memprioritaskan kembali kegiatan dan proyek yang ditujukan untuk merevitalisasi turisme di kawasan, setelah mengatasi pandemi COVID-19. Melalui resolusi tersebut, Komisi turut mendukung visi Turisme ASEAN 2025 dimana ASEAN bertujuan untuk menjadi destinasi turis yang aman dan berkualitas yang menawarkan beragam pengalaman yang unik sebagai kekhasan ASEAN dan berkomitmen untuk mengembangkan turisme yang bertanggungjawab, berkelanjutan, inklusif dan berimbang, sehingga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat ASEAN, terutama selama era pasca pandemi.

Komisi Ekonomi mendorong para anggota Parlemen AIPA untuk mendukung dan memfasilitasi pendekatan yang terkoordinasi dan terintegrasi melalui pergerakan masyarakat yang esensial di kawasan ASEAN. Lebih jauh, Komisi menyerukan Parlemen Anggota AIPA dan negara anggota ASEAN untuk membentuk kerjasama regional melalui pertukaran pengalaman, kebijakan dan pembangunan kapasitas.

7. Sidang Komisi Sosial

Sidang Komisi Sosial dilaksanakan pada 24 Agustus 2021 pada pukul 15:30 WIB hingga 17:30 WIB. Sidang dipimpin oleh **Hon. Ms. Khairunnisa Haji Ash'ari**, Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam dan didampingi oleh Wakil dari Parlemen negara tuan rumah sidang umum AIPA berikutnya, Kamboja.

Dalam semangat kerjasama, solidaritas dan persahabatan, Sidang Komisi Sosial membahas dan mengadopsi 3 (tiga) rancangan resolusi untuk disahkan pada Sidang Paripurna yaitu;

- Resolution on the Adoption of the Report of the 4th Meeting of the AIPA Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) and the Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN.
- Resolution on Strengthening Cooperation and Enhancing Digital Inclusion to Mitigate the Impacts of Climate Change.
- Resolution on Localising the Sustainable Development Goals for Effective National Implementation.
- Resolution on Technology to Facilitate Greater Election Participation

8. Sidang Komisi Organisasi

Sidang Komisi Organisasi dilaksanakan pada 25 Agustus 2021 pukul 09:00 WIB hingga 11:00 WIB. Sidang dipimpin oleh Hon. Mr. Haji Abdul Hamid Sabli Haji Arshad, Anggota Dewan Legislatif Brunei Darussalam dan didampingi oleh Wakil dari Parlemen negara tuan rumah sidang umum

AIPA berikutnya, Kamboja. Sidang Komisi Organisasi dilaksanakan dengan semangat kerjasama, persatuan dan persahabatan tradisional ASEAN, dan berhasil membahas serta mengadopsi 15 Rancangan Resolusi sebagai berikut:

- 1. Resolution on the Financial Report 2020-2021.
- 2. Resolution on Granting Permission to Use Special Funds for the Payment of Cost-Sharing of New Premises of AIPA Secretariat and for the Minor Adjustment in the Salary of the Locally Recruited Staff of the AIPA Secretariat.
- 3. Resolution on Budget Estimation 2021-2022.
- 4. Resolution on Secretariat's Annual Report 2020-2021.
- 5. Resolution on Accrediting the Parliament of Ukraine as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
- 6. Resolution on Accrediting the Parliament of Pakistan as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
- 7. Resolution on Amendment to the AIPA Statutes.
- 8. Resolution on Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly.
- 9. Resolution on Guidelines and Procedures of the AIPA-ASEAN Hearing.
- 10. Resolution on Rules and Procedures of the Meeting of the Young Parliamentarians of AIPA.
- 11. Resolution on Establishment of the AIPA-EP Dialogue.
- 12. Resolution on AIPA Distinguished Servive Award to HE. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap (Cambodia)
- 13. Resolution on AIPA Distinguished Service Award to Hon. Dr. Fadli Zon (Indonesia).
- 14. Resolution on Appreciation of the President of AIPA.
- 15. Resolution on Date and Venue of the 43rd AIPA General Assembly.

9. Sambutan dari AIPA Observer Countries

Sebagaimana sidang Umum AIPA sebelumnya, sesi dialog dengan negaranegara Observer AIPA disesuaikan menjadi pembacaan sambutan dari masing-masing negara Observer. Tiap-tiap negara Observer diberikan kesempatan untuk membacakan sambutan pada sesi First Plenary Session dengan alokasi waktu tidak melebihi 3 menit.

10. Second Plenary Session

Seluruh rangkaian persidangan umum yang ke-42 AIPA berakhir pada Sidang Pleno kedua yang diadakan pada 25 Agustus 2021 pukul 13:30 WIB hingga 16:15 WIB. Pada sidang ini, dilaporkan hasil dari masing-masing Komisi dan Sidang Women Parliamentarian, untuk kemudian disetujui oleh delegasi yang hadir dan dituangkan pada dokumen output yaitu, Joint Communique. Sidang juga sekaligus mengesahkan sejumlah Resolusi yang rancangannya telah dibahas terlebih dahulu pada Sidang Komisi dan Sidang Women Parliamentarian.

Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Joint Communique oleh para Ketua/Wakil Delegasi AIPA sebagai salah satu



pencapaian Sidang Umum ke-42 AlPA dan penganugerahan AlPA Distunguished Service Award yang diberikan kepada Delegasi Indonesia, Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc. dan Delegasi Kamboja Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap. Selanjutnya dilaksanakan juga serah terima kepemimpinan AlPA kepada H.E. Samdech Akka Ponhea Chakrei Heng Samrin dari Kamboja yang akan menjabat Presiden AlPA selama setahun kedepan dan akan menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-43 AlPA pada tahun 2022. Sidang Umum ke-42 AlPA kemudian secara resmi ditutup melalui Sidang Pleno Kedua oleh Presiden AlPA ke-42 sekaligus Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam, H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib.

C. PARTISIPASI DELEGASI DPR RI

Delegasi DPR RI telah berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian persidangan Sidang Umum ke-42 AIPA dengan uraian sebagai berikut :

1. First Plenary Session

Sidang Pleno Pertama dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2021 dipimpin oleh Presiden ke-42 AIPA yang juga Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam, H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib. Dalam sidang tersebut, masing-masing ketua delegasi menyampaikan *statement*. Delegasi DPR RI diwakili oleh Dr (H.C.) Puan Maharani (F-PDIP/A-188), Ketua DPR RI yang juga merupakan Ketua Delegasi, didampingi oleh Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, MCOMN&MEDIAST (F-PDIP/A-262), Anggota BKSAP yang juga Anggota Komisi I.

Ketua Delegasi DPR RI, **Dr (H.C.) Puan Maharani** menyampaikan dalam sambutannya, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Legislatif Brunei Darussalam yang telah menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-42 AIPA di tengah suasana pandemi COVID-19. Dalam pernyataannya, beliau menekankan bahwa tantangan pandemi yang semakin meningkat dengan terus berkembangnya varian virus corona tidak dapat dihadapi sendirian oleh satu negara. Oleh karenanya, kerjasama internasional sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan global.



Ketua Delegasi DPR RI juga menyampaikan usulan sejumlah kerjasama yang dapat dilakukan di antara negara anggota ASEAN untuk mengatasi pandemi, yaitu kerjasama pertukaran informasi untuk mengatasi penyebaran virus dan kerjasama pemenuhan pasokan vaksin, alat kesehatan dan obat, serta penelitian.

Dr (H.C.) Puan Maharani percaya bahwa negara anggota ASEAN dapat lebih antisipatif dan memperkuat resiliensi serta kesiapan (preparedness) dalam menghadapi pandemi di masa mendatang, dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Beliau juga menekankan bahwa pandemi ini menjadi momentum bagi negara anggota ASEAN untuk dapat melakukan pembangunan secara lebih inklusif dan ramah lingkungan, paska pandemi.

Berkenaan dengan tema Sidang Umum tahun ini, Ketua Delegasi DPR RI menyampaikan bahwa tema tersebut merefleksikan hasrat parlemen untuk bekerjasama dalam membantu meningkatkan konektivitas digital di antara negara-negara anggota ASEAN. Beliau juga menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 saat ini telah berkontribusi bagi akselerasi pemanfaatan teknologi digital yang telah berdampak terhadap banyak area.



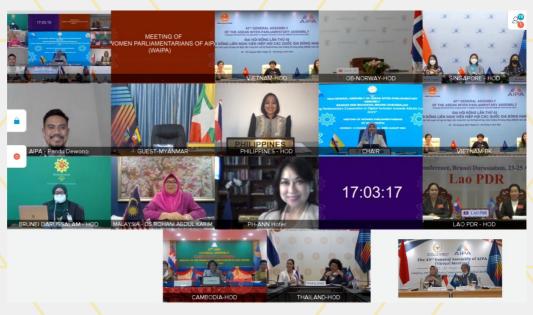
Dr (H.C.) Puan Maharani menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN harus melanjutkan peningkatan kerjasama dan pertukaran informasi dalam rangka mendapatkan manfaat yang lebih besar dari teknologi digital. Pertama, kerjasama dalam meningkatkan ketersediaan dan akses internet yang terjangkau bagi masyarakat. Hal ini termasuk upaya peningkatan akses internet, terutama di daerah pedesaan dan area terpencil. Kedua, kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terkait dengan keahlian dan literasi, tidak hanya mengambil manfaat dari teknologi digital semata, namun juga mencegah hoax dan disinformasi. Ketiga, kerjasama dalam perumusan kebijakan yang mendukung konektivitas digital dan juga untuk memastikan keamanan aktivitas digital, seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan perlindungan konsumen. Keempat, kerjasama untuk meningkatkan inovasi, edukasi, dan penelitian dalam teknologi digital. Sejalan dengan upaya dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pertumbuhan ekonomi, penting



untuk memperhatikan inklusi digital melalui perluasan akses internet yang merata.

2. Meeting of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

Pada Sidang WAIPA, DPR RI diwakili oleh Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos, M.Si (Fraksi Partai Gerindra/A-78) dan Arzeti Bilbina (Fraksi PKB/A-32). Pada kesempatan ini, Delegasi DPR RI menjelaskan bahwa perempuan menjadi pihak yang sangat terdampak dengan adanya pergeseran dramatis berupa transisi ke aktivitas daring untuk semua aspek kegiatan selama masa pandemi, dari mulai hilangnya pekerjaan, hingga kurangnya akses terhadap perlindungan sosial. Transisi digital tersebut telah menimbulkan keprihatinan terhadap kesenjangan digital gender yang semakin dalam di ASEAN. Disampaikan pula oleh Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos, M.Si, Anggota BKSAP yang juga Anggota Komisi X, bahwa berdasarkan laporan International Telecommunication Union (ITU) Tahun 2019, secara global hanya 48% perempuan yang menggunakan internet dibandingkan pria yang mencapai angka 58%, mewakili ketimpangan gender sebesar 17%. Sedangkan menurut jajak pendapat eksekutif World Economic Forum Tahun 2020, semua negara ASEAN dipandang masih sangat jauh dalam pencapaian kesetaraan gender di peranan teknologi.



Di samping itu, inklusi finansial masih menjadi salah satu isu yang menantang di ASEAN, dimana hal tersebut berkaitan dengan pembangunan ekonomi negara-negara. Dikarenakan pandemi Covid-19, banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di ASEAN terdampak berat, di mana faktanya, mereka mewakili antara 97%-99% usaha dan antara 60%-80% total pekerja di seluruh kawasan.



Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos, M.Si, menekankan bahwa menjadi kewajiban anggota parlemen untuk memperkuat upaya melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dalam memastikan akses terhadap layanan finansial dan digital, literasi finansial dan digital, sebagaimana kesempatan ketenagakerjaan dan kewirausahaan bagi perempuan dalam merespon kondisi pekerjaan yang berubah-ubah.

3. Sidang Komisi Politik

Pada sidang Komisi Politik, DPR RI diwakili oleh **Dr. H. Fadli Zon**, **SS, M.Sc** (Fraksi Partai Gerindra/A-86), Ketua BKSAP yang juga Anggota Komisi I, didampingi oleh **Ir. Moh. Ichsan Firdaus** (Fraksi Partai Golkar/A-292) Anggota BKSAP yang juga Anggota Komisi VI dan **Muslim**, **S.HI**, **MM** (Fraksi Partai Demokrat/A-523) Anggota BKSAP yang juga Anggota Komisi VI. Delegasi DPR RI mengajukan satu rancangan resolusi yang berjudul *Resolution on Parliamentary Support on the Situation in Myanmar*, yang menekankan pada upaya pencarian solusi atas situasi konflik di Myanmar dan memastikan stabilitas serta keamanan, baik di Myanmar maupun di kawasan.

Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc menegaskan bahwa rancangan resolusi mengenai dukungan parlemen terhadap situasi di Myanmar sangat mendesak untuk dibahas dan diadopsi mengingat konflik yang belum terselesaikan hingga saat ini di Myanmar. Melalui rancangan resolusi yang diusulkan oleh parlemen Indonesia tersebut, Dr. H. Fadli Zon, SS, M.Sc berharap AIPA dapat menunjukkan itikad baik kepada dunia internasional, yang mencerminkan dukungan terhadap kemajuan kecil yang telah dibuat ASEAN melalui penunjukkan H.E. Erywan Yusof sebagai utusan khusus ASEAN, terkait upaya pencarian solusi damai di Myanmar.





4. Sidang Komisi Sosial

Delegasi DPR RI pada Sidang Komisi Sosial diwakili oleh **Putu Supadma Rudana**, **MBA** (Fraksi Partai Demokrat/A-563) Wakil Ketua BKSAP yang juga Anggota Komisi VI, dan **Arkanata Akram S.T.**, **B.E.** (**Hons**) **MEng.Sc.** (Fraksi Partai Nasdem/A-392), Anggota BKSAP yang juga Anggota Komisi VII. Delegasi DPR RI mengajukan masukan amandemen terhadap 3 (tiga) rancangan resolusi yang dibahas pada Sidang Komisi Sosial.



Terkait rancangan resolusi mengenai penguatan kerjasama dan peningkatan inklusi digital untuk mengurangi dampak perubahan iklim, Arkanata Akram S.T., B.E. (Hons) MEng.Sc. berpandangan bahwa

rancangan resolusi tersebut cukup relevan dengan kondisi dunia saat ini, dan menjelaskan bahwa digitalisasi dan perubahan iklim merupakan dua isu yang berbeda namun saling terkait. Adopsi digital dalam berbagai sektor telah menjadi agenda global yang mencirikan revolusi industri 4.0.

Menurutnya, memanfaatkan kecenderungan digitalisasi tersebut untuk mengendalikan perubahan iklim merupakan sebuah terobosan yang relatif baru sekaligus cerdas. **Arkanata Akram S.T., B.E. (Hons) MEng.Sc.** menekankan bahwa perubahan iklim merupakan isu global yang sangat mendesak saat ini, dimana tidak ada negara yang mampu menghadapinya sendirian. Seluruh negara berjuang dalam memenuhi target *Paris Agreement* dimana kapasitas, teknologi dan kemampuan finansial masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Dalam hal ini, maka kerjasama regional dan adopsi teknologi menjadi hal yang sangat penting.

5. Sidang Komisi Ekonomi

Delegasi DPR RI pada Sidang Komisi Ekonomi diwakili oleh Ir. H. Ahmad Hafisz Tohir (F-PAN/A-487), Wakil Ketua BKSAP yang juga Anggota Komisi XI, dan I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE, MM (F-PDIP/A-234), Anggota BKSAP yang juga Anggota Komisi XI. Pada Sidang Komisi Ekonomi, DPR RI mengajukan masukan amandemen terhadap 2 (dua) rancangan resolusi yang dibahas pada Sidang Komisi Ekonomi.

Terkait rancangan resolusi pertama, Ir. H. Ahmad Hafisz Tohir menekankan bahwa ekonomi digital berlanjut menjadi mesin pertumbuhan yang kuat selama pandemi dan kecenderungannya diharapkan berlanjut hingga setelah pandemi.



Ir. Ahmad Hafisz Tohir menjelaskan bahwa telah diproyeksikan integrasi digital ASEAN memiliki potensi untuk menghasilkan peningkatan 1 Triliun US\$ dalam PDB regional pada tahun 2025. Oleh karenanya, akselerasi



integrasi digital menjadi hal utama. Bukan hanya untuk bertahan di era pasca pandemi, melainkan juga untuk membangun komunitas ekonomi yang memiliki ketahanan dan kuat dengan efisiensi yang meningkat, produktifitas yang lebih tinggi dan konektivitas rantai nilai yang lebih baik.

Sedangkan terkait Rancangan Resolusi kedua mengenai isu turisme, I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE, MM menekankan bahwa isu turisme menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi. Menurutnya, Pandemi telah memberikan dampak yang menghancurkan di tempat-tempat yang memiliki ketergantungan ekonomi besar pada pariwisata. Pada Sidang Umum AIPA tahun sebelumnya, Indonesia telah mengusulkan isu yang serupa meskipun kemudian usulan tersebut digabungkan, mengingat masing-masing Komisi dapat memutuskan hanya 1 (satu) resolusi.

Delegasi Indonesia menyampaikan kembali dukungan yang kuat terhadap kedua rancangan resolusi tersebut dengan mengajukan sejumlah amandemen untuk memperkaya rancangan resolusi dimaksud.

6. Sidang Komisi Organisasi

Pada Sidang Komisi Organisasi Delegasi DPR RI diwakili oleh **Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng** (F-PKS/A-422), Wakil Ketua BKSAP yang juga Anggota Komisi II. Pada sidang Komisi Organisasi ini, DPR RI mengajukan usulan terhadap amandemen Statuta AIPA, yaitu terkait mekanisme pengambilan keputusan dalam Sidang Umum. Indonesia mengajukan usulan terhadap *Article* 9 (7.a) Statuta AIPA yaitu dihapusnya kalimat "only matters on which consensus cannot be attained shall be dropped". Selain itu, Indonesia juga mengusulkan digabungnya kalimat dalam *Article* 9 (7.a) dengan *Article* 9 (7.b) menjadi 1 paragraf yang berbunyi "Decisions by the General Assembly on any subject shall be made by consensus. When consensus cannot be achieved, the General Aseembly may decide on how a specific decision can be made".

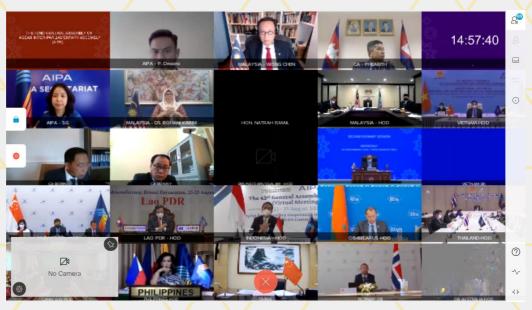


Melalui usulan ini, Delegasi Indonesia berpandangan bahwa perlu untuk menyediakan kemungkinan alternatif mekanisme pengambilan keputusan lainnya ketika tidak tercapai konsensus. Hal ini menurut DPR RI dapat memperkuat AlPA untuk menjadi wadah yang lebih aspirasional dan antisipatif dalam menghadapi dinamika perkembangan regional dan global yang kompleks. Usulan Indonesia ini disetujui dan diterima oleh forum.

7. Sidang Pleno Kedua dan Closing Ceremony



Pada Sidang Pleno kedua ini, Delegasi DPR RI diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan **Dr. H.M. Azis Syamsuddin, SH, SE, MAF, MH** (F-PG/A-282) sekaligus membacakan sambutan penutupan atas nama Indonesia.





III. HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Sidang Umum ke-42 AIPA dengan tema "Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion towards ASEAN Community 2025" dilaksanakan secara daring pada tanggal 23-25 Agustus 2021 dengan Brunei Darussalam sebagai tuan rumah ini menghasilkan dokumen Report of the 42nd General Assembly of AIPA, Joint Communique dan 26 (dua puluh enam) resolusi di Komisi WAIPA, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial dan Komisi Organisasi. Berikut ini adalah uraian resolusi yang dihasilkan tersebut, yaitu:

1. Resolution on Promoting Women's Economic Empowerment in the Future of Work and Post Pandemic Recovery through Digital and Financial Inclusion

Resolusi ini menekankan pada pentingnya inklusi finansial dan akses digital untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan, terutama untuk pemulihan paska pandemi dan dunia kerja bagi perempuan di masa mendatang.

Resolusi ini menyerukan penguatan strategi digital inklusif untuk menyelesaikan kesenjangan gender digital sembari mengelola keamanan digital dan keamanan siber. Resolusi ini juga menyerukan untuk membangun jaringan dan kerjasama di semua tingkatan dalam mengembangkan kapasitas perempuan, memastikan bahwa pekerjaan disediakan untuk perempuan, dan melakukan penelitian terkait dampak COVID-19 pada tenaga kerja wanita ASEAN untuk memetakan rencana pascapandemi. Resolusi ini juga mendorong untuk untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas peningkatan keterampilan yang responsif dan efektif bagi wanita dan perempuan-perempuan muda.

2. Resolution on the Adoption of The Report of the 12th AIPA Caucus

Resolusi ini merupakan laporan hasil pelaksanaan Sidang ke-12 AlPA Caucus yang seharusnya telah diadopsi pada Sidang Umum ke-41 AlPA di Vietnam.

3. Resolution on Enhancing Cybersecurity and Data Protection Towards a Resilient Cyberspace in ASEAN

Resolusi ini menekankan tentang kesadaran atas semakin meningkatnya ancaman terhadap keamanan siber dan perlindungan data seiring dengan perkembangan perdagangan elektronik. Resolusi ini mendukung peningkatan keamanan siber dan perlindungan data di ASEAN melalui hukum, kebijakan dan regulasi parlemen anggota AIPA untuk memaksimalkan manfaat digitalisasi bagi perkembangan politik dan sosial ekonomi di kawasan.

4. Resolution on Fostering Human Security to Achieve Digital Inclusion in ASEAN

Menjelaskan mengenai pentingnya inklusi digital sebagai kunci pemulihan COVID-19 dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Resolusi ini juga menegaskan tentang pentinnya pendekatan keamanan manusia dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai tantangan di kawasan.

5. Resolution on Promoting Parliamentary Diplomacy to Move the ASEAN Community Forward

Menjelaskan tentang pentingnya penguatan diplomasi parlemen melalui semua level kegiatan AIPA untuk memajukan komunitas ASEAN dan perlunya meningkatkan diplomasi parlemen antara AIPA dengan komunitas internasional lain salah satunya melalui sinergi antara AIPA dengan ASEAN.

6. Resolution on Promoting Inclusive Digital ASEAN to Empower MSMEs and Strengthen the ASEAN Economic Integration

Menjelaskan mengenai pentingnya teknologi digital dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) dalam memperkuat konektivitas dan akitifitas ekonomi ASEAN. Resolusi ini mendorong pengembangan jaringan dan kapabilitas UMKM melalui harmonisasi kebijakan dan legislasi menuju integrasi digital ekonomi ASEAN.

7. Resolution on the Post Covid-19 Economic Recovery: Tourism Cooperation in ASEAN

Menekankan mengenai pentingnya revitalisasi sektor turisme di kawasan pasca pemulihan pandemi Covid-19 untuk mewujudkan ASEAN sebagai tujuan wisata yang aman, berkualitas, unik dengan kekhasan ASEAN, bertanggung jawab, inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi ASEAN Tourism 2025.

8. Resolution on the Adoption of the Report of the 4th Meeting of the AIPA Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) and the Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges towards Drug-Free ASEAN

Menekankan mengenai seruan kepada Parlemen Anggota AIPA untuk menegaskan kembali sikap dan pendekatan toleransi nol, pengenalan langkahlangkah efektif, penguatan kebijakan yang telah ada, peningkatan kerjasama lintas batas dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan terkait penegakan hukum atas pemakaian dan peredaran obat-obatan terlarang menuju masyarakat ASEAN bebas narkoba.

9. Resolution on Strengthening Cooperation and Enhancing Digital Inclusion to Mitigate the Impacts of Climate Change

Menegaskan pentingnya kerjasama regional dan peranan teknologi digital dalam memajukan aksi iklim untuk mengurangi resiko dampak perubahan iklim di kawasan.

10. <u>Resolution on Localising the Sustainable Development Goals for Effective National Implementation</u>

Menegaskan tentang pentingnya peran aktif anggota parlemen dalam memastikan hukum dan kebijakan yang dapat berkontribusi bagi pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2030.



Selain resolusi di bidang WAIPA, Politik, Ekonomi dan Sosial, Sidang Umum ke-42 AIPA juga mengesahkan 16 (enam belas) resolusi terkait organisasi AIPA, yakni:

- 1. Resolution on the Financial Report 2020-2021.
- 2. Resolution on Granting Permission to Use Special Funds for the Payment of Cost-Sharing of the New Premises of AIPA Secretariat and for the Minor Adjustment in the Salary of the Locally Recruited Staff of the AIPA Secretariat
- 3. Resolution on the Budget Estimation 2021-2022.
- 4. Resolution on Secretariat's Annual Report 2020-2021.
- 5. Resolution on Accrediting the Parliament Ukraine as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
- 6. Resolution on Accrediting the Parliament of Pakistan as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
- 7. Resolution on Accrediting the Parliament of Georgia as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
- 8. Resolution on the Amandments of the AIPA Statutes.
- 9. Resolution on Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assemblu.
- 10. Resolution on Guidelines and Procedures of the AIPA-ASEAN Hearing.
- 11. Resolution on Rules and Procedures of the Meeting of the Young Parliamentarians of AIPA.
- 12. Resolution on Establishment of the AIPA-EP Dialogue.
- 13. Resolution on Distinguished Service Award to His Excellency Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap (Cambodia).
- 14. Resolution on Distinguished Service Award to Hon. Dr. Fadli Zon (Indonesia).
- 15. Resolution on Appreciation of the President of AIPA.
- 16. Resolution on Date and Venue of the 43rd AIPA General Assembly.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- Sidang Umum ke-42 AIPA yang diselenggarakan secara daring/virtual dari Parlemen Brunei Darussalam pada tanggal 23 – 25 Agustus 2021 telah berlangsung dengan lancar dan sukses. Sidang ini telah berhasil mengesahkan 26 (dua puluh enam) resolusi di Komisi WAIPA, Komisi Ekonomi, Komisi Sosial dan Komisi Organisasi
- 2. Sidang Umum ke-42 AIPA ini merupakan sidang umum kedua yang dilaksanakan secara daring setelah Parlemen Vietnam yang juga menyelenggarakan secara daring/virtual pada Sidang Umum ke-41 AIPA.
- 3. Dibandingkan Hasil Sidang Umum yang diselenggarakan secara fisik (*in-person attendance*), Sidang Umum ke-42 AIPA yang diselenggarakan secara virtual/daring menjadi tidak dioptimal dikarenakan kendala teknis zoom seperti suara yang tidak jelas terdengar dan waktu yang relatif singkat sehingga keputusan banyak yang ditetapkan secara sepihak oleh Ketua Sidang tanpa ada kesempatan berdebat di forum.

- 4. Untuk pertama kalinya pengajuan Draft Resolusi melalui mekanisme Emergency Item diterapkan dalam Sidang Umum AIPA dan Indonesia menjadi salah satu pionir yang melakukannya melalui pengajuan Draft Resolution on Parliamentary Support on the Situation in Myanmar. Dapat dikatakan bahwa AIPA belum siap untuk menerapkan mekanisme Emergency Item karena isu-isu yang dibahas sangat sensitif dan keputusan memerlukan kesepakatan konsensus.
- 5. Rancangan Resolusi usulan DPR RI di Komisi Politik mengenai dukungan parlemen terhadap penyelesaian konflik di Myanmar tidak berhasil mendapatkan dukungan secara konsensus dari Parlemen Anggota AIPA sehingga tidak ada pembahasan dan Draft Resolusi otomatis didrop dari pembahasan.
- 6. Sejak terjadinya kudeta militer di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021, isu Myanmar semakin menjadi isu yang sensitif di AIPA dengan perubahan penekanan, semula isu Myanmar dikaitkan dengan isu Hak Asasi Manusia dan bantuan kemanusiaan (humanitarian aid) namun kini bertambah dengan isu demokrasi dan perdamaian di kawasan.
- 7. Kegagalan Draft Resolusi usulan Indonesia di Komisi Politik tidak mengurangi nilai keberhasilan peran aktif Delegasi DPR RI selama rangkaian acara SIUM ini karena Draft Resolusi usulan Indonesia di Komisi Ekonomi, Komisi Sosial, WAIPA, Komisi Organisasi, serta melalui usulan-usulan perubahan paragraf pada tiap-tiap Resolusi yang dibahas berhasil diterima forum dan diadopsi menjadi Resolusi.
- 8. Partisipasi Delegasi DPR RI dalam SIUM AIPA ke-42 merupakan wujud nyata komitmen DPR RI dalam mendukung terbentuknya Masyarakat ASEAN yang inklusif, yaitu dengan menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia di forum regional/internasional
- 9. Indonesia berhasil menerima penganugerahan AIPA *Distunguished Service Award* yang diberikan kepada Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc. bersama dengan Delegasi Kamboja Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap. AIPA *Distunguished Service Award* untuk Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc merupakan prestasi karena pengajuan sebelumnya telah gagal dan ditolak, akhirnya berhasil dicapai pada Sidang ini. Indonesia tercatat untuk ketiga kalinya menerima AIPA Award setelah Kharis Suhud dan Dr. Nurhayati Ali Assegaf.
- 10. Sidang Umum ke-42 AIPA menyetujui pelaksanaan serah terima kepemimpinan AIPA (*transfer of office*) kepada H.E. Samdech Akka Ponhea Chakrei Heng Samrin, Ketua Parlemen Kamboja, sebagai simbolisasi Kamboja siap menjabat Presiden AIPA periode 2021-2022 dan akan menjadi tuan rumah Sidang Umum ke-43 AIPA.



B. SARAN

- 1. Hasil Sidang Umum ke-42 AIPA berupa resolusi-resolusi di bidang WAIPA, Ekonomi, Sosial dan Organisasi memerlukan tindak lanjut implementasi dari masing-masing parlemen dan pemerintah negara-negara anggota AIPA. Oleh karena itu, resolusi yang telah disepakati dalam SIUM AIPA 42 sebaiknya segera didistribusikan ke Komisi-Komisi yang terkait di DPR RI untuk disampaikan ke Departemen/ Institusi/ Kementerian terkait untuk ditindaklanjuti
- 2. Memperhatikan pengalaman keikutsertaan Delegasi DPR RI pada SIUM ke-38 AIPA, SIUM ke-39 AIPA, SIUM ke-40 AIPA, SIUM ke-41, dan SIUM ke-42 AIPA, khususnya terkait dengan tidak tercapainya konsensus atas Rancangan Resolusi usulan Delegasi DPR RI di Komisi Politik, maka dapat dipertimbangkan untuk terlebih dulu melakukan pendekatan diplomatis (soft diplomacy) melalui komunikasi intensif dengan Kedutaan Besar negara-negara ASEAN di Jakarta guna mensosialisasikan Rancangan Resolusi yang akan diusulkan oleh DPR RI terutama terkait dengan isu-isu sensitif. Dengan demikian, Kedutaan Besar negara-negara ASEAN di Jakarta diharapkan dapat mengkomunikasikan Rancangan Resolusi DPR RI kepada masing-masing Parlemen negaranya.
- 3. Dalam hal penyusunan Rancangan Resolusi, perlu kiranya untuk mempertimbangkan Rancangan Resolusi alternatif dari Rancangan Resolusi utama yang diusulkan oleh DPR RI, terutama apabila Rancangan Resolusi berkaitan dengan isu-isu yang dianggap sensitif di ASEAN. Dengan harapan, apabila pada pelaksanaan SIUM Rancangan Resolusi utama mengalami resistensi, maka dapat diajukan Rancangan Resolusi alternatif yang secara substansi sama dengan Rancangan Resolusi Utama, namun dari sisi bahasa, diharapkan dapat lebih diterima oleh Parlemen negara-negara ASEAN.
- 4. Sebaiknya Delegasi DPR RI mengajukan Draft Resolusi melalui mekanisme normal, tidak mengandalkan pada pengajuan Draft Resolusi melalui mekanisme *Emergency Item* karena forum Sidang Umum AIPA nampaknya belum siap mengakomodir isu-isu sensitif di kawasan.
- 5. Delegasi DPR RI ke Sidang Umum ke-43 AIPA di Kamboja sebaiknya melakukan rapat-rapat persiapan lebih intens sehingga Draft Resolusi Indonesia dapat diajukan dengan mekanisme normal dan komprehensif mencakup isu-isu di semua Komisi Tetap AIPA.
- 6. Sidang Umum ke-43 AIPA di Kamboja Tahun 2021 direncanakan akan diselenggarakan secara luring atau *in-person attendance* sehingga Delegasi DPR RI perlu membuat persiapan lebih optimal agar Draft Resolusi usulan Indonesia dapat diterima secara konsensus
- 7. Delegasi DPR RI diharapkan hadir dengan formasi penuh ke Sidang Umum ke-43 AIPA yang akan diselenggarakan di Kamboja karena DPR RI akan menerima serah terima jabatan (*transfer of office*) Presiden AIPA tahun 2022-2023 pada akhir Sidang tersebut.

V. PENUTUP

A. UCAPAN TERIMA KASIH

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas Delegasi sehingga misi Delegasi di Sidang Umum ke-42 AIPA dapat berhasil tercapai.

Ucapan terima kasih disampaikan khususnya kepada Direktorat Kerja Sama ASEAN di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas dukungan substansi dan pendampingan selama persidangan. Delegasi DPR RI mengharapkan kerja sama ini akan semakin erat pada Sidang-Sidang AIPA selanjutnya.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Biro Kerja Sama Sekretariat

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

- List of Participants
- Report of the Executive Committee Meeting
- Report of the 42ndAIPA General Assembly
- Report of Committee on Political, Economic, Social, WAIPA and Organizational Matters
- Report of Committee on Joint Communiqué
- Joint Communiqué
- Resolutions
- Dokumentasi foto
- Kliping berita

C. KATA PENUTUP

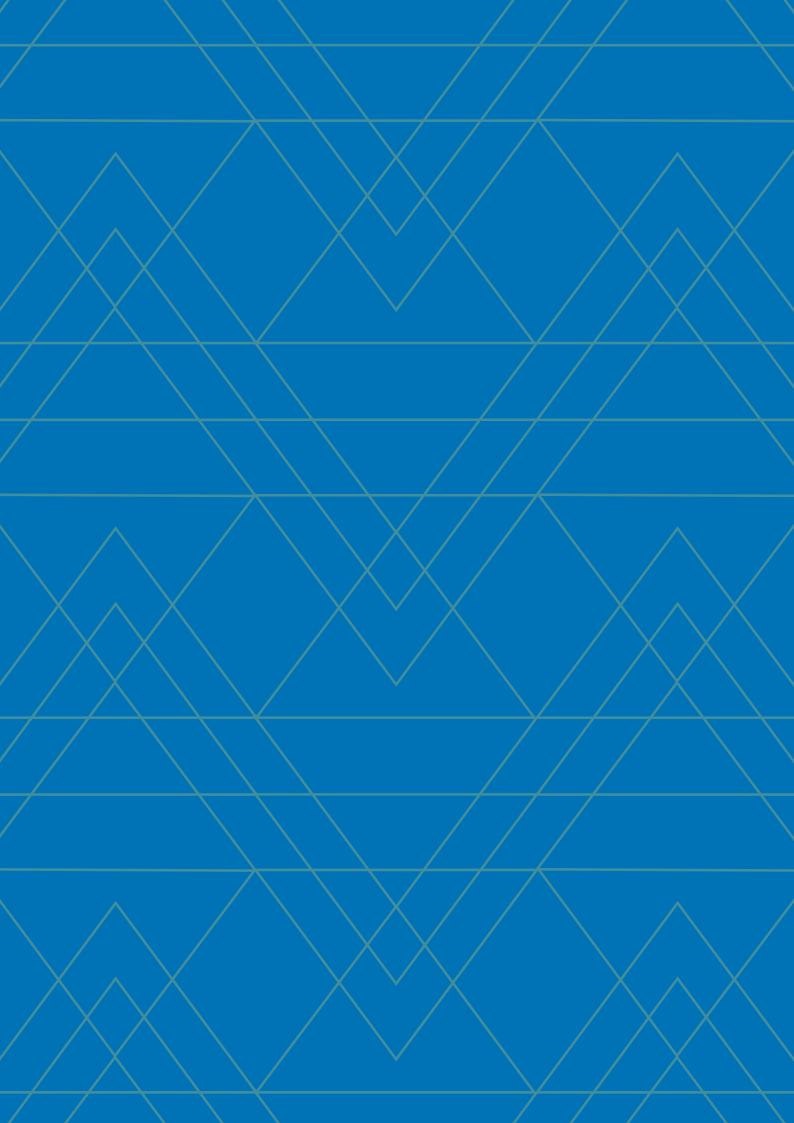
Demikianlah Laporan Delegasi DPR RI menghadiri Sidang Umum ke-42 AIPA yang telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 23 - 25 Agustus 2021 di Brunei Darussalam. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban Parlemen untuk terbuka (open) dan transparan kepada publik. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2021

a.n Delegasi, Ketua BKSAP DPR RI

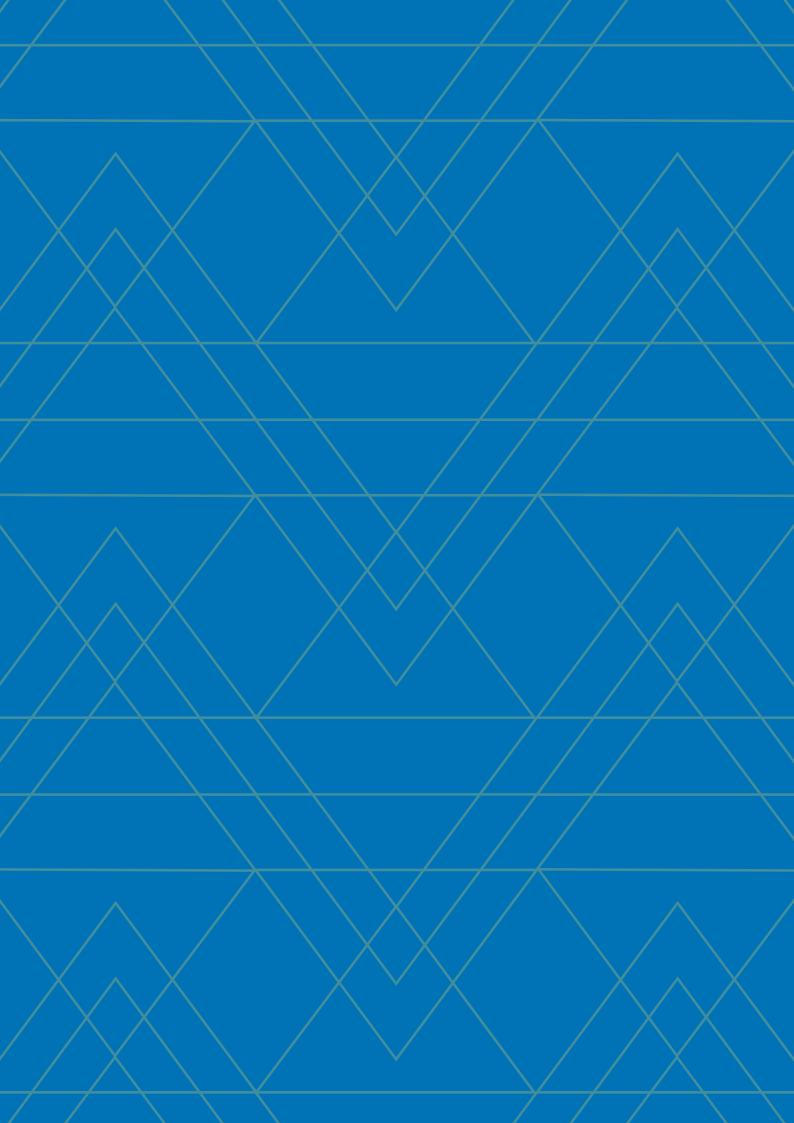
Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc

A-86



KETERANGAN LAMPIRAN

- List of Participants
- Report of the Executive
 Committee Meeting
- Report of the 42ndAIPA General Assembly
- Report of Committee on Political,
 Economic, Social, WAIPA and
 Organizational Matters
- Report of Committee on Joint
 Communiqué
- Joint Communiqué
- Resolutions
- Dokumentasi foto
- Kliping berita





Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

LIST OF DELEGATES

AIPA MEMBER DELEGATIONS

BRUNEI DARUSSALAM H.E. Pehin Dato Abdul Rahman Taib President of the 42nd AIPA, Speaker 1 of the Legislative Council of Brunei Darussalam 2 Hon. Pehin Dato Haji Hasrin Haji Sabtu Head of Delegation, Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam 3 Member of Delegation, Hon. Pehin Dato Haji Judin Haji Asar Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam 4 Hon. Pehin Dato Haji Abdul Ghani Pehin Dato Haji Member of Delegation, Abdul Rahim Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam 5 Hon. Mr. Haji Umarali Esung Member of Delegation, Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam 6 Hon. Mr. Haji Abdul Hamid Arsad Member of Delegation. Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam 7 Hon. Mr. Ong Tiong Oh Member of Delegation, Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam 8 Hon. Ms. Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Member of Delegation, Rahman Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam Hon, Ms. Nik Hafimi Abdul Haadii Member of Delegation, Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam Hon. Ms. Khairunnisa Haji Ash'ari Member of Delegation, 10 Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam

| 11 | Hon. Mr. Iswandy Ahmad | Member of Delegation, |
|----|--|--------------------------------------|
| | | Member of the Legislative Council of |
| | | Brunei Darussalam |
| 12 | Hon. Mr. Pengiran Haji Ali Pengiran Maon | Member of Delegation, |
| | | Member of the Legislative Council of |
| | | Brunei Darussalam |
| 13 | Hon. Mr. Naim Haji Kamis | Member of Delegation, |
| | | Member of the Legislative Council of |
| | | Brunei Darussalam |
| 14 | Hon. Mr. Haji Tahamit Haji Nudin | Member of Delegation, |
| | | Member of the Legislative Council of |
| | | Brunei Darussalam |
| 15 | Hon. Mr. Haji Mohimin Haji Johari | Member of Delegation, |
| | | Member of the Legislative Council of |
| | | Brunei Darussalam |
| 16 | Hon. Mr. Pengiran Haji Mohamed Pengiran Haji | Member of Delegation, |
| | Osman | Member of the Legislative Council of |
| | | Brunei Darussalam |
| 17 | Hon. Mr. Haji Abdul Hamid Haji Mumin | Member of Delegation, |
| | | Member of the Legislative Council of |
| | | Brunei Darussalam |
| 18 | Hon. Mr. Awang Hanapi Bin Mohd Siput | Member of Delegation, |
| | | Member of the Legislative Council of |
| | | Brunei Darussalam |
| 19 | Hon. Mr. Haji Abdul Wahab Apong | Member of Delegation, |
| | | Member of the Legislative Council of |
| | | Brunei Darussalam |
| 20 | Hon. Mr. Haji Ramli Haji Lahit | Member of Delegation, |
| | | Member of the Legislative Council of |
| | | Brunei Darussalam |
| 21 | Hon. Mr. Haji Emran Haji Sabtu | Member of Delegation, |
| | | Member of the Legislative Council of |
| | | Brunei Darussalam |
| 22 | Ms. Rose Aminah Ismail | Delegation Secretary |
| 23 | Mr. Mahmud Masri | Delegation Secretary |
| 24 | Ms. Zaidah Petra | Delegation Secretary |
| 25 | Ms. Ajeerah Najib | Delegation Secretary |
| 26 | Mr. Faiq Yassin | Delegation Secretary |
| 27 | Mr. Amalul Muttaqin Ismail | Delegation Secretary |
| 28 | Ms. Haslinda Hidup | Delegation Secretary |
| 29 | Ms. Nurul Nazurah binti Jaya | Delegation Secretary |
| 30 | Mr. Mohd Aizul Hakim Pehin Dato Haji Suyoi | Delegation Secretary |
| 31 | Ms. Dk Hjh Ena Suraya Pengiran Haji Mohammad | Delegation Secretary |
| 32 | Ms. Siti Maslina Hj Md Said | Delegation Secretary |
| 33 | Ms. Siti Maszuraimah Hj Mahmud | Delegation Secretary |
| | | |

| 34 | Ms. Dayangku Siti Sajidah Pengiran Hj Baharuddin | Delegation Secretary |
|-----|--|---|
| 35 | Ms. Salinah Haji Mohd Salleh | Delegation Secretary |
| 36 | Ms. Noor Dina Zharina Hj Yahya | Delegation Secretary |
| 37 | Ms. Amalina Haji Awang Tengah | Delegation Secretary |
| CAM | IBODIA | |
| 1 | Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin | Head of Delegation, |
| | | President of the National Assembly of Cambodia |
| 2 | Hon. Kittisangahakbindit Khuon Sudary | Member of Delegation, |
| | | Second Vice-President of the National Assembly |
| 3 | Hon. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap | Member of Delegation, |
| | | Chairperson of Commission on |
| | | Economy, Finance, Banking and Audit |
| 4 | Hon. Mr. Chheang Vun | Member of Delegation, |
| | | Chairperson of Commission on |
| | | Foreign Affairs, International |
| ~ | H M N' O I | Cooperation, Information and Media |
| 5 | Hon. Mrs. Nin Saphon | Member of Delegation, |
| | | Chairperson of Commission on Public Works, Transport, |
| | | Telecommunications, Posts, Industry, |
| | | Mines, Energy, Commerce, Land |
| | | Management, Urban Planning and |
| | | Construction |
| 6 | Hon. Mr. Hun Many | Member of Delegation, |
| | • | Chairperson of Commission on |
| | | Education, Youths, Cult, Sports, |
| | | Religious Affairs, Culture and |
| | | Tourism |
| 7 | Hon. Mr. Yang Sem | Member of Delegation, |
| | | Chairperson of Human Rights, |
| | | Reception of Complaints, |
| | | Investigation and National Assembly- |
| 0 | Han Man Mana Cama Am | Senate Relation (Senator) |
| 8 | Hon. Mrs. Mean Som An | Member of Delegation, |
| | | Chairperson of Commission on Public Health, Social Work, Veterans, Youth, |
| | | Rehabilitation, Labor, Vocational |
| | | Training and Women's Affairs |
| | | (Senator) |
| 9 | Hon. Mrs. Lork Kheng | Member of Delegation, |
| | | Chairperson of Commission on Public |
| | | Health, Social Work, Veterans, Youth, |
| | | |

| | | Rehabilitation, Labor, Vocational |
|----|-------------------------|---------------------------------------|
| | | Training and Women's Affairs |
| 10 | Hon. Mr. Mam Bunneang | Member of Delegation, |
| | | Chairperson of Commission on |
| | | Investigation and Anti-Corruption |
| | | (Senator) |
| 11 | Hon. Mr. Loy Sophath | Member of Delegation, |
| | | Chairperson of Commission on |
| | | Planning, Investment, Agriculture, |
| | | Rural Development, Environment and |
| | | Water Resources |
| 12 | Hon. Mr. Chhit Kim Yeat | Member of Delegation, |
| | | Vice-Chairperson of Commission on |
| | | Foreign Affairs, International |
| | | Cooperation, Information and Media |
| | | (Senator) |
| 13 | Hon. Mr. Hou Sry | Member of Delegation, |
| | | Vice-Chairperson of Commission on |
| | | Planning, Investment, Agriculture, |
| | | Rural Development, Environment and |
| | | Water Resources |
| 14 | Hon. Mr. Kep Chuktema | Member of Delegation, |
| | | Vice-Chairperson of Public Works, |
| | | Transport, Telecommunications, Posts, |
| | | Industry, Mines, Energy, Commerce, |
| | | Land Management, Urban Planning |
| | | and Construction |
| 15 | Hon. Mr. Ai Khan | Member of Delegation, |
| | | Vice-Chairperson of Commission on |
| | | Legislation and Justice (Senator) |
| 16 | Hon. Mr. Chay Borin | Member of Delegation, |
| | | Vice-Chairperson of Commission on |
| | | Economy, Finance, Banking and Audit |
| 17 | Hon. Mr. Keo Piseth | Member of Delegation, |
| | | Secretary of Commission on |
| | | Legislation and Justice |
| 18 | Hon. Mrs. Un Sokunthea | Member of Delegation, |
| | | Secretary of Commission on Interior, |
| | | National Defense and Civil Service |
| 19 | Hon. Mr. Nim Chantara | Member of Delegation, |
| | | Secretary of Commission on Foreign |
| | | Affairs, International Cooperation, |
| | | Information and Media |
| 20 | Hon. Mr. Kheav Phearith | Member of Delegation, |
| | | |

| | | Secretary of Commission on |
|----|------------------------|---------------------------------------|
| | | Education, Youths, Cult, Sports, |
| | | Religious Affairs, Culture and |
| | | Tourism |
| 21 | Hon. Mr. Ty Sokun | Member of Delegation, |
| | | Member of Commission on Foreign |
| | | Affairs, International Cooperation, |
| | | Information and Media |
| 22 | Hon. Mrs. Khoun Khundy | Member of Delegation, |
| | | Member of Commission on Foreign |
| | | Affairs, International Cooperation, |
| | | Information and Media (Senator) |
| 23 | Hon. Mrs. Mak Vansitha | Member of Delegation, |
| | | Member of Commission on Public |
| | | Health, Social Work, Veterans, Youth, |
| | | Rehabilitation, Labor, Vocational |
| | | Training and Women's Affairs |
| 24 | Hon. Mr. Ouk Damry | Member of Delegation, |
| | | Member of Commission on |
| | | Investigation and Anti-Corruption |
| 25 | Hon. Mr. Long Bunny | Member of Delegation, |
| | | Member of Commission on Interior, |
| | | National Defense and Civil Service |
| 26 | Hon. Dr. Ly Chheng | Member of Delegation, |
| | | Member of Commission on |
| | | Legislation and Justice |
| 27 | Hon. Mr. Pich Chivorn | Member of Delegation, |
| | | Member of Commission on Public |
| | | Health, Social Work, Veterans, Youth, |
| | | Rehabilitation, Labor, Vocational |
| | | Training and Women's Affairs |
| 28 | Hon. Mr. Tak Vantha | Member of Delegation, |
| | | Member of Commission on Public |
| | | Works, Transport, |
| | | Telecommunications, Posts, Industry, |
| | | Mines, Energy, Commerce, Land |
| | | Management, Urban Planning and |
| | | Construction |
| 29 | Mr. Leng Peng Long | Delegation Secretary, |
| | | Secretary General of the National |
| | | Assembly |
| 30 | Mr. Srun Dara | Delegation Secretary, |
| | | Deputy Secretary General of the |
| | | National Assembly |
| 31 | Mr. Prom Virak | Delegation Secretary, |

| 32 | Mr. Chhim Sothkun | Director General of International Relations, Protocol and Information Delegation Secretary , |
|-----|-------------------------------------|---|
| 32 | Wil. Chillin Gothkun | Director General of International |
| | | Relations, Protocol and Information |
| | | (Senate) |
| 33 | Mr. Kim Sochetra | Delegation Secretary, |
| | | Deputy Director General of Research |
| | | (Senate) |
| 34 | Mr. Heang Thul | Delegation Secretary , |
| | - | Director of International Relations |
| | | Department |
| 35 | Mr. Koy Malayvireak | Delegation Secretary, |
| | , , , | Director of International Relations |
| | | Department (Senate) |
| 36 | Mr. Klang Oudom | Delegation Secretary, |
| | | Deputy Director of International |
| | | Relations Department |
| 37 | Mr. Ly Mengtyth | Delegation Secretary, |
| 0, | 1.1.1 — J 1.141.1ge, 1.1 | Chief of ASEAN-AIPA Office, |
| | | International Relations Department |
| 38 | Mrs. Nhim Dalin | Delegation Secretary, |
| 30 | Mis. Minii Buini | Deputy Chief of ASEAN-AIPA Office, |
| | | International Relations Department |
| | | international Relations Department |
| IND | ONESIA | |
| 1 | H.E. Dr (HC). Puan Maharani | Speaker/Head of Delegation |
| 2 | H.E. Dr. Azis Syamsudin | Member of Delegation, |
| | | Vice Speaker |
| 3 | Hon. Dr. Fadli Zon | Member of Delegation, |
| | | Chairperson of the Committee for |
| | | Inter-Parliamentary Cooperation & Commission I |
| 4 | Hon. Mr. Putu Supadma Rudana | Member of Delegation, |
| • | 11011. 1411. 1 ata Sapadina Radana | Vice Chairperson of the Committee |
| | | for Inter-Parliamentary Cooperation & |
| | | Commission VI |
| 5 | Hon. Dr. Mardani Ali Sera | Member of Delegation, |
| | | Vice Chairperson of the Committee |
| | | for Inter-Parliamentary Cooperation & |
| 6 | Hon. Mr. Hafisz Tohir | Commission II Member of Delegation, |
| U | Hon, Wit. Hansz Tollii | Vice Chairperson of the Committee |
| | | for Inter-Parliamentary Cooperation & |
| | | Commission XI |
| 7 | Hon. Mr. I Gusti Agung Rai Wirajaya | Member of Delegation, |
| | | |

| | | Member of the Committee for Inter- |
|----|--|-------------------------------------|
| | | Parliamentary Cooperation & |
| 0 | | Commission XI |
| 8 | Hon. Ms. Irine Yusiana Roba Putri | Member of Delegation |
| 9 | Hon. Mrs. Himmatul Aliyah | Member of Delegation, |
| | | Member of the Committee for Inter- |
| | | Parliamentary Cooperation & |
| | | Commission X |
| 10 | Hon. Mr. Ichsan Firdaus | Member of Delegation, |
| | | Member of the Committee for Inter- |
| | | Parliamentary Cooperation & |
| | | Commission IV |
| 11 | Hon. Mrs. Arzeti Bilbina | Member of Delegation, |
| | | Member of the Committee for Inter- |
| | | Parliamentary Cooperation & |
| | | Commission IX |
| 12 | Hon. Mr. Arkananta Akram | Member of Delegation, |
| | | Member of the Committee for Inter- |
| | | Parliamentary Cooperation & |
| | | Commission VII |
| 13 | Hon. Mr. Syahrul Aidi Maazat | Member of Delegation, |
| | | Member of the Committee for Inter- |
| | | Parliamentary Cooperation & |
| | | Commission V |
| 14 | Hon. Mr. Muslim | Member of Delegation, |
| | | Member of the Committee for Inter- |
| | | Parliamentary Cooperation & |
| | | Commission IV |
| 15 | Hon. Dr. Andi Yuliani Paris | Member of Delegation, |
| | | Member of the Committee for Inter- |
| | | Parliamentary Cooperation & |
| | | Commission VII |
| 16 | Ms. Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti | Delegation Secretary |
| | | Head Bureau of Inter-Parliamentary |
| | | Cooperation & International |
| | | Organization |
| 17 | Ms. Warsiti Alfiah | Delegation Secretary |
| | | Head Division of the Regional |
| | | Cooperation |
| 18 | Ms. Anne Widyana | Delegation Secretary |
| | | Head Sub-Division of Meeting of the |
| | | Regional Cooperation |
| 19 | Mr. Rifan Safari Andalas | Delegation Secretary |
| | | Head Sub-Division of Administration |
| | | of the Regional Cooperation |
| 20 | Ms. Andam Perwitasari | Delegation Secretary |
| | | Staff of the Regional Cooperation |
| 21 | Mr. Ahmadi | Delegation Secretary |
| | | Staff of the Regional Cooperation |
| 22 | Ms. Amelia Tresna Wijayanti | Advisor to Delegation |
| | | Expert Staff Coordinator of the |
| | | Committee for Inter-Parliamentary |
| | | |

| 23 | Mr. Tide Aji Pratama | Cooperation & International Organization Advisor to Delegation Advisor to Delegation Expert Staff of the Committee for |
|----------|---|--|
| 24 | Mr. Mochamad Ilyas | Inter-Parliamentary Cooperation & International Organization Advisor to Delegation Expert Staff of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation & |
| 25 | Ms. Masyithoh Annisa Ramadhani | International Organization Advisor to Delegation Expert Staff of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation & |
| 26 | Mr. Isep Parid Yahya | International Organization Advisor to Delegation Expert Staff of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation & |
| 27 | Mr. Chilman Arisman | International Organization Advisor to Delegation Senior Official for the Directorate of ASEAN Political Security |
| 28 | Mr. Mohammad David | Cooperation, MoFA Indonesia Advisor to Delegation First Secretary for the Directorate of ASEAN Political Security |
| 29 | Ms. Melati Sosrowidjojo | Cooperation, MoFA Indonesia Advisor to Delegation Second Secretary for the Directorate of ASEAN Political Security Cooperation, MoFA Indonesia |
| 1.40 | 'S PEOPLE DEMOCRATIC REPUBLIC | |
| LAU 1 | H.E. Dr Xaysomphone Phomvihane | Head of Delegation, |
| • | 11.2. 21 Taysomphone I nom mane | President of the National Assembly of Lao PDR |
| 2 | Hon. Mr. Sanya Praseuth | Member of Delegation, Chairman of Foreign Affairs Committee |
| 3 | Hon. Assoc. Prof. Dr Linkham Douangsavanh | Member of Delegation, Chairman of Economic, Technology |
| 4 | Hon. Mrs. Thoummaly Vongphachanh | and Environment Committee Member of Delegation, Chairperson of Cultural and Social |
| 5 | Hon. Mrs. Pingkham Lasasimma | Affairs Committee Member of Delegation, Secretary General of the National |
| 6 | Hon. Mr. Thanta Kongphaly | Assembly of Lao PDR Member of Delegation, |

| | | Vice Chairman of Planning, Finance | | | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--|
| | | and Audit Committee | | | |
| 7 | Hon. Mr. Amphay Chitmanonh | Member of Delegation, | | | |
| | | Vice Chairman of Law Committee | | | |
| 8 | Hon. Mrs. Vandy Bouthsavong | Member of Delegation, | | | |
| | | Vice Chairperson of Foreign Affairs | | | |
| | | Committee | | | |
| 9 | Hon. Mr. Bounelome Keobouahome | Member of Delegation, | | | |
| | | Vice Chairperson of Cultural and | | | |
| | | Social Affairs Committee | | | |
| 10 | Hon. Dr. Bouthanh Bounvilay | Member of Delegation, | | | |
| | | Deputy Secretary General of the | | | |
| | | National Assembly of Lao PDR | | | |
| 11 | Mr. Khemphone Anothay | Delegation Secretary | | | |
| 12 | Assoc. Prof. Dr Lamphong Volady | Delegation Secretary | | | |
| 13 | Mr. Phosy Themmerath | Delegation Secretary | | | |
| 14 | Mr. Somphet Chittavanh | Delegation Secretary | | | |
| 15 | Mrs. Kaysone Keomanykhot | Delegation Secretary | | | |
| 16 | Mr. Khamsamai Sammavong | Delegation Secretary | | | |
| 17 | Mr. Soutsakhone Anantha | Delegation Secretary | | | |
| 18 | Mrs. Siriphone Southammavong | Delegation Secretary | | | |
| 19 | Mrs. Saliphone Outhachack | Delegation Secretary | | | |
| 20 | Mr. Somchit Phomthavong | Delegation Secretary | | | |
| 21 | Mr. Phoutsady Sysomphone | Delegation Secretary | | | |
| 22 | Ms. Sivaly Savathdy | Delegation Secretary | | | |
| 23 | Mr. Chanthone Louangphane | Delegation Secretary | | | |
| 24 | Mr. Xaypanya Phomvihane | Delegation Secretary | | | |
| 25 | Mrs. Vilaysak Phandanouvong | Delegation Secretary | | | |
| 26 | Mr. Nikon Vonmanychanh | Delegation Secretary | | | |
| 27 | Ms. Dalany Inthathirath | Delegation Secretary | | | |
| 28 | Ms. Annia Keosavang | Delegation Secretary | | | |
| REAL | ANCHA | | | | |
| | AYSIA | Hood of Delegation | | | |
| 1 | H.E. Datuk Azhar Azizan Harun | Head of Delegation, | | | |
| | | Speaker of the House of | | | |
| 2 | H D (20 ' A 1' O(1 0 ') | Representatives, Malaysia | | | |
| 2 | Hon. Dato'Sri Azalina Othman Said | Member of Delegation, | | | |
| | | Deputy Speaker of the House of | | | |
| 2 | H. D.4.2 M.1.1 D1.1 H | Representatives, Malaysia | | | |
| 3 | Hon. Dato' Mohd Rashid Hasnon | Member of Delegation, | | | |
| | | Deputy Speaker of the House of | | | |
| 1 | Hon Dota? Cui Haiah Dahami Al-Lal Waning | Representatives, Malaysia | | | |
| 4 | Hon. Dato'Sri Hajah Rohani Abdul Karim | Member of Delegation, | | | |
| | | Member of the House of | | | |

Representative, Malaysia

| 5 | Hon. Dato'Seri Dr. Shahidan Kassim | Member of Delegation, |
|------|---|--------------------------------|
| | | Member of the House of |
| | | Representative, Malaysia |
| 6 | Hon. Datuk Hasanuddin Mohd Yunus | Member of Delegation, |
| | | Member of the House of |
| | | Representative, Malaysia |
| 7 | Hon. Datuk Zakaria Mohd Edris | Member of Delegation, |
| | | Member of the House of |
| | | Representative, Malaysia |
| 8 | Hon. Mrs. Natrah Ismail | Member of Delegation, |
| | | Member of the House of |
| | | Representative, Malaysia |
| 9 | Hon. Mr. Yusuf Abdul Wahab | Member of Delegation, |
| | | Member of the House of |
| | | Representative, Malaysia |
| 10 | Hon. Mr. Wong Chen | Member of Delegation, |
| | | Member of the House of |
| | | Representative, Malaysia |
| 11 | Hon. Mr. Ahmad Fadhli Shaari | Member of Delegation, |
| | | Member of the House of |
| | | Representative, Malaysia |
| 12 | Hon. Mr. Ahmad Hassan | Member of Delegation, |
| | | Member of the House of |
| | | Representative, Malaysia |
| 13 | Mr. Azri Norfikri Aziz | Delegation Secretary |
| 14 | Mrs. Nurul Fadhilah Ibharim | Delegation Secretary |
| 15 | Mr. Augustin Leonard Jen | Delegation Secretary |
| 16 | Mr. Klaus Julias Louis | Delegation Secretary |
| 17 | Mr. Mohsin Abdul Malek | Delegation Secretary |
| 18 | Mr. Muhammad Izarul Kayat | Delegation Secretary |
| 19 | Mrs. Amy Tam Lay Choon | Delegation Secretary |
| 20 | Mrs. Siti Fahlizah Padlee | Delegation Secretary |
| | | |
| PHII | LIPPINES | |
| 1 | H.E. Lord Allan Jay Q. Velasco | Head of Delegation, |
| 1 | 11.2. Lord Thian July Q. Volusco | Speaker of the House of |
| | | Representatives, Philippines |
| 2 | Hon. Mr. Paulino Salvador "Doy" C. Leachon | Member of Delegation, |
| 2 | Tion. wit. I dufino Survador Doy C. Ecachon | Deputy Speaker of the House of |
| | | Representative, Philippines |
| 3 | Hon. Mr. Rufus B. Rodriguez | Member of Delegation, |
| J | Ton. In. Raids D. Rodiffact | Deputy Speaker of the House of |
| | | Representative, Philippines |
| 4 | Hon. Ms. Rose Marie "Baby" J. Arenas | Member of Delegation, |
| 7 | Tion. 1915. Rose mane Davy J. Alchas | Member of Delegation, |

| | | Deputy Speaker of the House of | |
|------|---|------------------------------------|--|
| | | Representative, Philippines | |
| 5 | Hon. Ms. Ann K. Hofer | Member of Delegation, | |
| | | Chairperson, Committee on Foreign | |
| | | Affairs | |
| 6 | Hon. Ms. Sandra Y. Eriguel, M.D. | Member of Delegation, | |
| | | Chairperson, Committee on Inter- | |
| | | Parliamentary Relations and | |
| | | Diplomacy | |
| 7 | Hon. Ms. Maria Lourdes Acosta-Alba | Member of Delegation, | |
| | | Chairperson, Committee on Women | |
| | | and Gender Equality | |
| 8 | Hon. Ms. Sharon S. Garin | Member of Delegation, | |
| | | Chairperson, Committee on Economic | |
| | | Affairs | |
| 9 | Mr. Novel V. Bangsal | Delegation Secretary | |
| 10 | Ms. Imelda F. Apostol | Delegation Secretary | |
| 11 | Ms. Glenndale J. Cornelio | Delegation Secretary | |
| 12 | Mr. Joe Anthony P. Ramos | Delegation Secretary | |
| 13 | Ms. Joy Elena C. Piccio | Delegation Secretary | |
| SINC | GAPORE | | |
| 1 | H.E. Mr. Tan Chuan-Jin | Leader of Delegation, | |
| - | The twit full chair on | Speaker of Parliament | |
| 2 | Hon. Mr. Christopher De Souza | Deputy Leader of Delegation, | |
| _ | 110.11.12.1.0.11.10.11.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12. | Deputy Speaker of Parliament | |
| 3 | Hon. Mr. Lim Biow Chuan | Member of Delegation, | |
| | | Member of Parliament | |
| 4 | Hon. Mr. Sitoh Yih Pin | Member of Delegation, | |
| | | Member of Parliament | |
| 5 | Hon. Ms. Tin Pei Ling | Member of Delegation, | |
| | č | Member of Parliament | |
| 6 | Hon. Ms. Cheryl Chan | Member of Delegation, | |
| | · | Member of Parliament | |
| 7 | Hon. Mr. Saktiandi Supaat | Member of Delegation, | |
| | - | Member of Parliament | |
| 8 | Hon. Ms. He Ting Ru | Member of Delegation, | |
| | <u> </u> | Member of Parliament | |
| 9 | Hon. Mr. Shawn Huang | Member of Delegation, | |
| | - | Member of Parliament | |
| 10 | Hon. Ms. Nadia Ahmad Samdin | Member of Delegation, | |
| | | Member of Parliament | |
| 11 | Hon. Ms. Ng Ling Ling | Member of Delegation, | |
| | | Member of Parliament | |
| | | | |

| 12 | Hon. Ms. Raeesah Khan | Member of Delegation, |
|-----|-------------------------------------|---|
| | | Member of Parliament |
| 13 | Hon. Ms. Hany Soh | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 14 | Hon. Mr. Don Wee | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 15 | Hon. Ms. Yeo Wan Ling | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 16 | Hon. Mr. Yip Hon Weng | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 17 | Hon. Mr. Zhulkarnain Abdul Rahim | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 20 | Ms. Chua Lin Hwee | Delegation Secretary |
| 21 | Mr. Cedric Sun | Delegation Secretary |
| 22 | Ms. Joey Chua | Delegation Secretary |
| 23 | Mr. Jeff Tan | Delegation Secretary |
| | | |
| THA | AILAND | |
| 1 | H.E. Mr. Chuan Leekpai | Head of Delegation, President of the |
| | | National Assembly |
| | | of Thailand |
| 2 | H.E. Prof. Pornpetch Wichitcholchai | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 3 | Hon. Mr. Suchart Tonjaroen | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 4 | Hon. Gen. Singsuk Singpai | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 5 | Hon. Mr. Suphachai Phosu | Member of Delegation, |
| | - | Member of Parliament |
| 6 | Hon. Mr. Supachai Somcharoen | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 7 | Hon. Mr. Sompong Amornvivat | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 8 | Hon. Mr. Sarawut Phetpanomporn | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 9 | ** ** ** *** | |
| | Hon. Mrs. Pikulkeaw Krairiksh | Member of Delegation, |
| | Hon. Mrs. Pikulkeaw Krairiksh | Member of Delegation, Member of Parliament |

Member of Delegation, Member of Parliament

Member of Delegation,

Member of Delegation, Member of Parliament Member of Delegation,

Member of Parliament

Member of Parliament

10

11

12

13

Hon. Mr. Krisda Tanterdtit

Hon. Mr. Kitti Wasinondh

Hon. Mr. Chakkrapan Pornnimit

Hon. Prof. Kanchanaratt Leevirojana

| 14 | Hon. Mr. Jetn Sirathranont | Member of Delegation, |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|
| | | Member of Parliament |
| 15 | Hon. Gen. Thawip Netniyom | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 16 | Hon. Ms. Phetchompoo Kijburana | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 17 | Hon. Ms. Pechdau Tohmeena | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 18 | Hon. Mr. Manoon Sivapiromrat | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 19 | Hon. Assoc. Prof. Rong Boonsuaykhwan | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 20 | Hon. Mr. Virasakdi Futrakul | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 21 | Hon. Mr. Akradech Wongpituchroj | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 22 | Hon. Mr. Ekkachai Songamnartcharoen | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 23 | Hon. Mr. Ekkapob Pianpises | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 24 | Hon. Mr. Anusart Suwanmongkol | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 25 | Hon. Mr. Issara Sereewatthanawut | Member of Delegation, |
| | | Member of Parliament |
| 26 | Mr. Wiwat Mungkarndee | Delegation Secretary |
| 27 | Mrs. Pornpith Phetchareon | Delegation Secretary |
| 28 | Mr. Kunnavuti Tuntrakul | Delegation Secretary |
| 29 | Ms. Steejit Taipiboonsuk | Delegation Secretary |
| 30 | Mrs. Boontarika Junhanandana | Delegation Secretary |
| 31 | Mr. Natee Chiamcharoen | Delegation Secretary |
| 32 | Mr. Paradorn Arawan | Delegation Secretary |
| 33 | Ms. Utumporn Meecharoen | Delegation Secretary |
| 34 | Ms. Supisra Kankaew | Delegation Secretary |
| 35 | Ms. Piraporn Napuksornchainant | Delegation Secretary |
| 36 | Ms. Jirapan Jakkaew | Delegation Secretary |
| | | |

VIETNAM

| 1 | H.E. Mr. Vuong Dinh Hue | Head of Delegation, |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| | | President of the National Assembly |
| 2 | Hon. Vu Hai Ha | Member of Delegation, |
| | | Chairman of the Foreign Affairs |
| | | Committee |
| 3 | Hon. Nguyen Thuy Anh | Member of Delegation, |
| | | Chairwoman of the Social Committee |
| 4 | Hon. Bui Van Cuong | Member of Delegation, |

| | | Secretary General of the National |
|----|------------------------------|--------------------------------------|
| | | Assembly, Chair of the National |
| | | Assembly Office |
| 5 | Hon. Don Tuan Phong | Member of Delegation, |
| | | Vice-Chair of the Foreign Affairs |
| | | Committee |
| 6 | Hon. Dinh Cong Sy | Member of Delegation, |
| | | Vice-Chair of the Foreign Affairs |
| | | Committee |
| 7 | Hon. Dinh Thi Phuong Lan | Member of Delegation, |
| | - | Vice-Chair of the Council of Ethnic |
| | | Minorities |
| 8 | Hon. Nguyen Tuan Anh | Member of Delegation, |
| | | Vice-chair of the Committee for |
| | | Science, Technology and Environment |
| 9 | Major General Nguyen Minh Du | Member of Delegation, |
| | , | Vice-Chair of the Committee for |
| | | National Defence and Security |
| 10 | Hon. Vu Thi Luu Mai | Member of Delegation, |
| | | Vice-Chair of the Finance and Budget |
| | | Committee |
| 11 | Hon. Mr. Nguyen Hoang Mai | Member of Delegation, |
| | . | Vice-Chair of Social Affairs |
| | | Committee |
| 12 | Hon. Le Thu H | Member of Delegation, |
| | | Standing Member of the Foreign |
| | | Affairs Committee |
| 13 | Hon. Pham Phu Binh | Member of Delegation, |
| | | Standing Member of the Foreign |
| | | Affairs Committee |
| 14 | Hon. Thai Quynh Mai Dung | Member of Delegation, |
| | | Standing Member of the Foreign |
| | | Affairs Committee |
| 15 | Hon. Pham Thi Hong Yen | Member of Delegation, |
| | <u> </u> | Standing Member of the Economic |
| | | Committee |
| 16 | Hon. Bui Hoai Son | Member of Delegation, |
| | | Standing Member of the Culture and |
| | | Education Committee |
| | | |

AIPA SECRETARIAT

| 1 | H.E. Mrs. Nguyen Tuong Van | Secretary General of AIPA |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 2 | Mr. Mario Pandu Dewono | Deputy Secretary General of AIPA |
| 3 | Mr. Adi Witjaksono | Director of Finance and |
| | | Administration |
| 4 | Ms. Putri Maha Lima | Director of Committees |
| 5 | Ms. Putri Gita Lubis | Secretary to Secretary General |
| 6 | Ms. Royyan Hadela Isnanda | Staff of Directorate of Stakeholders |
| | | Engagements and Resource |
| | | Mobilization |
| 7 | Mr. Sandi Nursahamdani | Staff of Directorate of Committees |
| 8 | Ms. Saphira Pradita | Intern of AIPA Secretariat |
| | | |

ASEAN SECRETARIAT

1 H.E. Dato Paduka Lim Jock Hoi

Secretary General of ASEAN

AIPA OBSERVER COUNTRY DELEGATIONS

AUSTRALIA

Senator the Hon. David Fawcett
 Head of Delegation
 Hon. Ms. Maria Vamvakinou MP
 Member of Delegation
 Ms. Natalie Cooke
 Delegation Secretary

THE REPUBLIC OF BELARUS

1 H.E Vladimir Andreichenko **Head of Delegation**,

Representatives of the National
Assembly of the Republic of Belarus
Hon, Mr. Sergei Syrankov

Member of Delegation.

Hon. Mr. Sergei Syrankov

Member of Delegation,

Member of the Standing Commission

on International Affairs

Chairman of the House of

CANADA

2

The Hon. Senator Paul Massicotte
 Mr. Ariel Shapiro
 Head of Delegation
 Delegation Secretary,

Analyst

3 Ms. Shannon Petry **Delegation Secretary,**Association Secretary

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

1 Hon. Ms. Liu Duo Head of Delegation,

Member of the National People's Congress (NPC) of China

EUROPEAN PARLIAMENT

1 Mr. Daniel Caspary Head of Delegation,

European Parliament for relations with the countries of South East Asia and ASEAN, Member of the European Parliament

Mrs. Marianne Vind Member of Delegation,

Vice-Chair of the Delegation of the European Parliament for relations with the countries of South East Asia and

ASEAN

3 Mrs. Heidi Hautala Member of Delegation,

Vice-President of the European Parliament, Member of the Delegation of the European Parliament for

Chair of the Delegation of the

relations with the countries of South

East Asia and ASEAN,

Member of Delegation,

Ambassador to ASEAN

Member of Delegation,

Political Advisor

Delegation Secretary,

EPP Adviser ASEAN Delegation

Delegation Secretary,

Head of EP Liaison Office Jakarta

(Director)

Delegation Secretary,

Desk Officer ASEAN

INDIA

4

5

6

7

8

1 Hon. Dr. Satya Pal Singh

H.E. Mr. Igor Driesmans

Mr. David Milliot

Mr. Markus Arens

Mr. Antoine Ripoll

Mr. Andreas Striegnitz

Head of Delegation,

Member of Lok Sabha (House of People), Parliament of India

REPUBLIC OF KOREA

1 Hon. Mr. Kim Gi-hyeon

Head of Delegation,

Member of Parliament, People Power

Party

KINGDOM OF MOROCCO

1 H.E. Mr. Habib El Malki

Head of Delegation,

Speaker of the House of

Representatives

NORWAY

3

1 Hon. Mrs. Elin Rodum Agdestein

Head of Delegation

RUSSIAN FEDERATION

1 Hon. Konstantin Kosachev

Head of Delegation,

Deputy Speaker of the Federation

Council

2 Hon. Andrey Klimov Member of Delegation,

Member of Federation Council, Committee on Foreign Affairs

Mrs. Irina Zolotareva

Secretary of the Delegation to AIPA

GUEST OF THE HOST AND AIPA PARTNERS

REPRESENTATIVE OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR

INTER-PARLIAMENTARY UNION

Dr. Kyaw Thu Hein

Mrs. Kunthea Kong

1 Mr. Martin Chungong Head of Delegation,

Secretary General of Inter-Parliamentary Union

Member of Delegation,

ASIA-PACIFIC PARLIAMENTARY FORUM

1 Hon. Tony Smith MP Head of Delegation,

President of APPF

ERIA

5

1 Prof. Hidetoshi Nishimura **Head of Delegation,**President of ERIA

PCASIA

2

1 Mr. Dararith Kim Yeat **Head of Delegation,**

Executive Director Parliamentary

Centre of Asia, PCAsia

Member of Delegation,

Institutional Development Manager

3 Mr. Sonya Heng Member of Delegation,

Instructor

Tel.: 2380501, 2381503, 2381508, 2381517, 2381518

Fax No.: 2385544

www.majlis-mesyuarat.gov.bn

Rujukan Kami:

JMM/YDP/R13/III Our Reference :



Majlis Mesyuarat Negara Legislative Council Negara Brunei Parussalam BB3910

17 August 2021

Speakers/Presidents of AIPA Member Parliaments AIPA Executive Committee Members

Your Excellencies,

As a follow-up to the letter dated 3rd August 2021 which sought for the approval of the relevant documents of the 42nd General Assembly of AIPA from members of the AIPA Executive Committee, I wish to bring to Your Excellency's attention regarding the results of the Executive Committee meeting as follows:

- 1. The AIPA Executive Committee received the submission of an emergency item of a **Draft Resolution on Parliamentary** Support on the Situation in Myanmar, proposed by Indonesia. The Draft Agenda of the Executive Committee Meeting and the Draft Agenda Items of the 42nd General Assembly of AIPA were subsequently updated to include this item and circulated on 11th August 2021 for the approval of the AIPA Executive Committee members.
- 2. As the Chair of the AIPA Executive Committee meeting, I acknowledged receiving feedbacks from the AIPA Executive Committee members regarding this matter. It is therefore kindly requested that further discussions shall take place in the meeting of the Committee on Political Matters of the 42nd General Assembly of AIPA.
- 3. With regards to the Programme of Activities of the 42nd General Assembly of AIPA, the AIPA Executive Committee received a proposal to adjust the time of the meeting for the Committee on Political Matters on Tuesday, 24th August 2021 and the Second Plenary Session on Wednesday, 25th August 2021.



After much consideration, the meeting of the Committee on Political Matters on Tuesday, 24th August 2021 shall now begin at 9:30 AM (GMT +8), while the Second Plenary Session on Wenesday, 25th August 2021 shall begin at 2:30 PM (GMT +8).

- 4. The AIPA Executive Committee endorsed the nomination of the President of the National Assembly of Cambodia, the incoming AIPA President as the Vice-Chairperson of the Executive Committee meeting.
- 5. The Composition of Committees of the 42nd AIPA General Assembly shall be sent via email by AIPA Member Parliaments to the AIPA Brunei National Secretariat.
- 6. Members of the AIPA Executive Committee approved the nomination of H.E. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap, Chairman of the Commission on Economy, Finance, Banking, and Audit & Chairman of Cambodian Parliament AIPA National Group; and Hon. Dr. Fadli Zon, Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of the House of Representatives of Indonesia for the AIPA Distinguished Service Award. These items will be discussed further at the Meeting on Organisational Matters.
- 7. With regards to the Admission of Observers, the AIPA Executive Committee took note on the views received from the AIPA Members. The discussion on the Accreditation of the applicants shall take place at the Meeting on Organisational Matters, and the accreditation shall then be granted upon the adoption of the relevant resolutions at the upcoming AIPA General Assembly.
- 8. The National Assembly of Cambodia agreed to accept the AIPA Presidency and host the 43rd General Assembly of AIPA. The date and venue of the 43rd General Assembly of AIPA will be announced later.



In this regard, please find attached the updated Draft Agenda and Programme of Activities of the 42^{nd} General Assembly of AIPA for Your Excellency's perusal.

I wish to express my sincerest gratitude for your kind support and cooperation to ensure the success of the 42nd General Assembly of AIPA.

Please accept, Your Excellency, the assurances of my highest consideration and my best wishes for good health and success.

Yours sincerely

(ABDUL RAHMAN TAIB)
Pehin Orang Kaya Seri Lela

President of AIPA
Speaker of the Legislative Council
Brunei Darussalam

Copy to:

AIPA Secretary General



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

Doc.42GA/2021/WAIPA Rep

REPORT OF THE MEETING OF COMMITTEE OF WOMEN PARLIAMENTARIANS OF AIPA (WAIPA)

His Excellency Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, The President of 42nd AIPA and Speaker of the Legislative Council of Brunei Darussalam

Your Excellencies, Honorable Delegates Ladies and Gentlemen,

It is my great honour to submit the following Report of the Meeting of the Committee of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA).

- 1. The Meeting was held virtually on 23rd August 2021 at 05.00 pm GMT +8. It was presided over by Honourable Ms. Siti Rozaimeriyanty Dato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman, Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam as the Chairperson. The Vice-Chairperson from the next host country, Cambodia was appointed for the meeting.
- 2. The following Parliamentarians from 9 AIPA Member Parliaments attended the meeting.

Brunei Darussalam

- a) Hon. Ms. Khairunnisa Haji Ash 'ari
- b) Hon. Pehin Dato Haji Judin Haji Asar
- c) Hon. Ms. Nik Hafimi Abdul Haadii
- d) Hon. Mr. Haji Mohimin Haji Johari

Cambodia

- a) Hon. Mrs. Nin Saphon
- b) Hon. Mrs. Mean Som An
- c) Hon. Mrs. Lork Kheng
- d) Hon. Mrs. Un Sokunthea

- e) Hon. Mrs. Khoun Khundy
- f) Hon. Mrs. Mak Vansitha

Indonesia

- a) Hon. Mrs. Himmatul Aliyah
- b) Hon. Mrs. Arzeti Bilbina

Lao PDR

- a) Hon. Mrs. Thoummaly Vongphachanh
- b) Hon. Mrs. Vandy Bouthsavong

Malaysia

- a) Hon. Mrs. Dato' Sri Rohani Abdul Karim
- b) Hon. Mrs. Natrah Ismail

Philippines

- a) Hon. Mrs. Maria Lourdes Acosta-Alba
- b) Hon. Deputy Speaker Rose Marie J. Arenas
- c) Hon. Ann K. Hofer
- d) Hon. Sandra Y. Eriquel, M.D.
- e) Hon. Sharon S. Garin

Singapore

- a) Hon. Ms. Cheryl Chan
- b) Hon. Ms. He Ting Ru
- c) Hon. Ms. Nadia Ahmad Samdin

Thailand

- a) Hon. Mrs. Pikulkeaw Krairiksh
- b) Hon. Mr. Ekkapob Pianpises
- c) Hon. Ms. Phetchompoo Kijburana

Vietnam

- a) Hon. Nguyen Thuy Anh
- b) Hon. Dinh Thi Phuong Lan
- c) Hon. Le Thu Ha
- d) Hon. Thai Quynh Mai Dung
- e) Hon. Vu Thi Luu Mai
- f) Hon. Pham Thi Hong Yen
- 3. The Meeting of the Committee of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) was held in the spirit of ASEAN brotherhood and sisterhood, unity, and cooperation. It reflects AIPA's commitment and continuous effort to ensure gender equality and women's empowerment at the heart of our recovery efforts. It is in AIPA's mandate to support the objectives of ASEAN Community 2025 and Sustainable Development

Goals which envisions towards an inclusive community and achieving gender equality ensuring leaving no one behind.

- 4. The AIPA Member Parliaments discussed and approved the following resolution:
 - a) Resolution on Promoting Women's Economic Empowerment in The Future of Work and Post Pandemic Recovery through Digital and Financial Inclusion
- 5. The Resolution was introduced on the recognition that gender disparity remains a challenge in achieving a politically cohesive, economically integrated, and socially responsible of ASEAN Community.
- 6. The discussion of the Resolution was focused on the financial inclusion and digital access for women that are more than a gender equality issue; these are essential parts that relate to the economic, social, and political development of the country. Thus, the Committee emphasized the need to develop a framework and set of policy recommendations to close the digital gender gap and prepare women for the future work and post-pandemic recovery, and improve the national legal system and regional cooperation to ensure the women's economic empowerment through digital and financial inclusion in the post-pandemic era.
- 7. Aside from the access to the financial resources, to ensure financial inclusion, the Committee agreed that women should be provided with an adequate social protection mechanism to maintain the financial safety and stability with the development of digital financial services.
- 8. Through the Resolution, the Committee called upon the ASEAN Member States to:
 - 1) Implement and strengthen inclusive digital strategies such as improving access and affordability of digital technologies while managing the digital security and cybersecurity as well as expand policies that are digitally inclusive and responsive to the challenges of Industrial Revolution 4.0 by increasing women's participation and leadership in the policy and decision- making process to address the issue on gender digital divide.
 - 2) To map out a post-pandemic plan of **enhancing women's economic empowerment in ASEAN** through **digital and financial inclusion** by building network and cooperation at all levels in conducting an inclusive impact research of COVID-19 on ASEAN women labours and developing capacity building including enhancing a responsive and effective upskilling capacity ensuring jobs are provided for women and girls
 - 3) Support the **development of women's financial sustainability** through the **development of digital financial services** with adequate social protection mechanisms and **digital enabling ecosystem for women entrepreneurs** including women-led MSMEs by promoting implementation of the ASEAN Committee on Women's Work Plan (ACW) 2021 2025 and **gender-responsive** access to financing for start-up or innovation projects as part of

sustainable effort in post pandemic recovery and the realization of digital inclusion

4) **To enact, strengthen or amend relevant laws** on cybersecurity and online safety, social protection in the informal economy and digital platform, recognize women's unpaid care work, redesign financial products and services to women's needs and preferences and also to promote and underscore women's participation in designing, building and leading our digital future

Your Excellency and Honourable Delegates,

- 9. Our recovery will not be complete without including gender equality. The time for action is now and there is still much more that we must do with the strength of ASEAN as One identity we can collectively recover stronger with One Vision as One community towards an Inclusive ASEAN as We are indeed the ASEAN legacy.
- 10. I hereby present the Report of the Meeting of the Committee of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

Thank you for your attention, Your Excellency.

HON. MS. SITI ROZAIMERIYANTY DATO SERI LAILA JASA HAJI ABDUL RAHMAN

CHAIRPERSON



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/WAIPA/01)

RESOLUTION ON

PROMOTING WOMEN'S ECONOMIC EMPOWERMENT IN THE FUTURE OF WORK AND POST PANDEMIC RECOVERY THROUGH DIGITAL AND FINANCIAL INCLUSION

Sponsored by Brunei Darussalam

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recalling the AIPA Resolution No. 39GA/2018/WAIPA/02 on "Empowering Women in ASEAN to Harness the Potential of Industrial Revolution 4.0", adopted at the 39th General Assembly in Singapore; AIPA Resolution No. 40GA/2019/WAIPA/01 on "Promoting Gender Equality and the Empowerment of Women in ASEAN"; AIPA Resolution No. 40GA/2019/WAIPA/02 on "Bridging the Gender Gap in Technology-based Disciplines", adopted at the 40th General Assembly in Bangkok, Thailand and AIPA Resolution No. 41/GA/2020/WAIPA/01 on "Promoting the Role of Women Parliamentarians in Securing Jobs and Income for Women Workers" adopted at the 41st General Assembly in Hanoi, Vietnam;

Recalling further the ASEAN Labour Ministers' Statement on the Future of Work: Embracing Technology for Inclusive and Sustainable Growth adopted during the Special Session of ASEAN Labour Ministers on Future of Work in 2019; Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN adopted in Manila, Philippines on 13 November 2017; and the Chairman's Press Statement of ASEAN Leaders' Special Session at the 36th ASEAN Summit on Women's Empowerment In The Digital Age held in Viet Nam on 26 June 2020;

Reiterating the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs) specifically Goal 1 on ending poverty in all its forms and ensuring equal rights to economic resources, as well as appropriate new technology and financial services, including microfinance; and Goal 5 on achieving gender equality and empowering all women and girls through the use of enabling technology particularly information and commercials technology;

Reaffirming the ASEAN Community Vision 2025 to promote quality of life, protection of human rights, and provision of equitable access to all opportunities, and other relevant international conventions and provisions for realizing gender equality and the empowerment of women;

Recognizing the importance of the theme of the 2021 ASEAN Chairmanship of Brunei Darussalam: "We Care, We Prepare, We Prosper", which emphasizes the need to ensure the well-being and livelihood of the people, adapt and work together to overcome any regional and global challenges in achieving a sustainable ASEAN Community;

Recognizing that tackling the gender disparity in the region through women's empowerment is not only a social imperative, but also an important strategy to further ASEAN's economic growth and realizing that Industrial Revolution 4.0, which is a new era that builds and extends the impact of digitalization in new and unanticipated ways, and facilitate resiliency following the disruptive impact of the COVID-19 pandemic that has greatly affected the future of work, workplace and workforce dynamics, which further amplify gender inequalities, emphasizing that the financial inclusion and digital access for women is more than an issue of gender equality and an essential part of the economic, social and political development of our countries;

Noting that while technological transformation offers both opportunities and challenges, and gender equality ensures women's full contribution to the betterment of societies and economies, women's participation in technology-related sectors remains low due to the inherent digital gender divide;

Recognizing that financial gender gaps has persisted as a result of exclusion of a large proportion of women from financial services, and recognizing that it is important to give priority to digital finance in closing these gender gaps. Parliaments play an important role in completing the legal framework for digital and financial inclusion to promote women's economic empowerment in the future of work and post-pandemic recovery;

Acknowledging that digitalization acts as a catalyst to the economic growth of communities, enabling the future of the world and the region and is an effective solution for women's liberation and empowerment if they have access to and are fully trained; emphasizing the strong impacts and new challenges of COVID-19 pandemic, which brings about the unemployment of the workforce, especially female workers in manual labour and production industries. At the same time, difficulties in accessing sources of support, especially in finance, is one of the obstacles for women to develop and create jobs after the COVID-19 pandemic;

Emphasizing that on-going challenges to unleash women's potential to harness the opportunities of Industrial Revolution 4.0 have been greatly impacted by the COVID-19 pandemic thus to close the digital gender divide, parliamentarians should develop policy recommendations and digital strategies to essentially prepare women for the post-pandemic recovery; and recognizing the need to develop a framework that will accelerate inclusive and sustainable development and maximizing the potential of information communications technology (ICT) for women's economic empowerment.

Hereby resolves to:

Call upon the ASEAN Member States to implement and strengthen inclusive digital strategies that actively aim to address the gender digital divide, improving the access and affordability of digital technologies, while managing the digital security and cybersecurity; to promote AIPA Member Parliaments to build network and cooperation at bilateral, regional and international levels in training and ensuring that jobs are provided for women, and conducting an inclusive impact research of COVID-19 on ASEAN women labours to map out a post-pandemic plan of women's economic empowerment through digital and financial inclusion;

Encourage ASEAN Member States to increase women's participation and leadership in the policy- and decision-making process, thus strengthen and expand policies that are digitally inclusive and responsive to the challenges of Industrial Revolution 4.0 and enhances women's economic empowerment in ASEAN; and support the development of digital financial services with adequate social protection mechanisms to provide safe, secure, efficient and affordable access to women and to safeguard women's financial sustainability;

Support the development of women's financial sustainability by promoting implementation of the ASEAN Committee on Women's Work Plan (ACW) 2021 – 2025, which underlines seven thematic areas, including women's economic empowerment and the future of work;

Call upon AIPA Member Parliaments to share experiences on parliamentary interventions and practices of women's economic empowerment, and to work closely for capacity building at bilateral, regional and international levels; and recommend ASEAN Member States to develop and enhance a responsive and effective upskilling capacity, including life-long learning amidst the digital age in tandem with the increasing variability in the labour market skills demand, by proactively upgrading the existing Technical and Vocational Education and Training (TVET); and enhance greater enrolment in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) for women and girls;

Recommend ASEAN Member States to encourage, and support the digitalization of womenled Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) and leadership, promote gender-responsive access to financing for start-up or innovation projects, as a part of sustainable effort in post pandemic recovery and the realization of digital inclusion and supporting digital enabling environment/ecosystem for women entrepreneurs;

Encourage ASEAN Member States and AIPA Member Parliament to enact, strengthen or amend relevant laws to address the following issues, such as cybersecurity and online safety but not limited to, lack of social protection for those in the informal economy including those in the digital platform, recognize the unpaid care work done by women, redesign financial products and services to women's needs and preferences, and, promote and underscore women's participation in designing, building and leading our digital future.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

Doc.42GA/2021/Pol Rep

REPORT OF THE COMMITTEE ON POLITICAL MATTERS

His Excellency Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, The President of 42nd AIPA and Speaker of the Legislative Council of Brunei Darussalam

Excellencies, Ladies and Gentlemen,

It is my great honor to submit the following Report of the Committee of Political Matters.

- 1. The Meeting was held virtually on 24th August 2021 at 09.30 am GMT +8. It was presided over by Honourable Ms. Nik Hafimi Abdul Haadii, Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam as the Chairperson. The Vice-Chairperson from the next host country for the 43rd General Assembly of AIPA, Cambodia, was appointed for the meeting.
- 2. The following Parliamentarians from 9 AIPA Member Parliaments attended the meeting.

Brunei Darussalam

- a) Hon. Ms. Khairunnisa Haji Ash'ari
- b) Hon. Pehin Dato Haji Judin Haji Asar
- c) Hon. Mr. Haji Umarali Esung
- d) Hon. Mr. Haji Abdul Hamid Arsad
- e) Hon. Ms. Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman
- f) Hon. Mr. Iswandy Ahmad
- g) Hon. Mr. Naim Haji Kamis
- h) Hon. Mr. Pengiran Haji Mohamed Pengiran Haji Osman

Cambodia

- a) Hon. Mr. Chheang Vun
- b) Hon. Mr. Mam Bunneang
- c) Hon. Mr. Loy Sophath

- d) Hon. Mr. Kep Chuktema
- e) Hon. Nim Chantara

Indonesia

- a) Hon. Dr. Fadli Zon
- b) Hon. Mr. Ichsan Firdaus
- c) Hon. Mr. Muslim

Lao PDR

- a) Hon. Mr. Sanya Praseuth
- b) Hon. Mr. Amphay Chitmanonh

Malaysia

- a) Hon. Mr. Dato' Mohd Rashid Bin Hasnon
- b) Hon. Mr. Dato' Seri Shahidan Kassim
- c) Hon. Mr. Yusuf Abd Wahab
- d) Hon. Mr. Wong Chen
- e) Hon. Mr. Datuk Hasanuddin Mohd Yunus

Philippines

- a) Hon. Deputy Speaker Rufus B. Rodriguez
- b) Hon. Ann K. Hofer

Singapore

- a) Hon. Mr. Lim Biow Chuan
- b) Hon, Ms, Raeesah Khan
- c) Hon. Mr. Zhulkamain Abdul Rahim

Thailand

- a) Hon. Mr. Kitti Wasinondh
- b) Hon. Gen. Thawip Netniyom
- c) Hon. Assoc. Prof. Rong Boonsuaykhwan

Vietnam

- a) Hon. Vu Hai Ha
- b) Hon. Don Tuan Phong
- c) Major General Nguyen Minh Duc
- d) Hon. Pham Phu Binh
- 3. Ahead of the discussion, the Chairperson reminded the meeting on the principle of consensus in the decision-making mechanism of ASEAN and AIPA. From this perspective, the Chairperson stressed that any non-agreement on one item should not affect the other items in the agenda.

- 4. The Committee met and discussed at length various issues related to the five draft resolutions.
 - a) Resolution on the Adoption of the Report of the 12th AIPA Caucus Held via Video Conference Hosted by the Parliament of Singapore.
- 5. The Committee unanimously approved the Report of the 12th AIPA Caucus, and agreed for its adoption.
 - b) Resolution on Enhancing Cybersecurity and Data Protection Towards a Resilient Cyberspace in ASEAN.
- 6. The Resolution was introduced in recognition of growing electronic commerce (e-commerce) which significantly contributes to the global economy but in parallel poses a threat to cybersecurity and data protection.
- 7. The Committee also recognized the importance of cyber security to maximize the benefits of digitalization for socio-economic and political development. In this regard, the Committee agreed that AIPA Member Parliaments play a vital role in ensuring cybersecurity and data protection in the region through the laws, policies, and regulations of ASEAN Member States. Through the Resolution, the Committee called upon AIPA Member Parliaments to: 1) urge ASEAN Member States to further engage with relevant-led ASEAN mechanisms on cybersecurity, 2) encourage ASEAN Member States leverage on regional institutions to enhance cybersecurity through various measures, and 3) urge ASEAN Member States to strengthen cooperation on cybersecurity and data protection.
- 8. The Committee also shared the view that strengthening the capabilities of the respective national Computer Emergency Response Teams (CERTs) and cyber security law enforcement agencies, as well as encouraging the implementation of joint regional activities to enhance cooperation and collaboration in the field of cyber security and data protection, to ensure the effective and practical implementation of the 11 voluntary principles; the non-binding norms of State behaviours in cyberspace.
 - c) Resolution on Fostering Human Security to Achieve Digital Inclusion in ASEAN.
- 9. The Committee shared the views that digital inclusion is one of the key pillars of COVID-19 recovery and achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), and human security is an important approach in identifying and addressing widespread and cross-cutting challenges to the survival, livelihood and dignity of the people in the region.

- 10. The Committee discussed and explored the role of AIPA in addressing this issue. The Committee agreed that AIPA Member Parliaments shall maximize the utilization of AIPA as a platform in promoting human security to achieve digital inclusion through meaningful dialogues and exchange of best practices. Further, AIPA Member Parliaments shall reinforce parliamentary diplomacy to support and complement the diplomatic efforts by their States/Governments.
- 11. Realizing the importance and emergence of this issue, the Committee extended a request to the AIPA Secretariat to look for possibilities of cooperation with the United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS) and explore potential areas of cooperation.

d) Resolution on Promoting Parliamentary Diplomacy to Move the ASEAN Community Forward.

- 12. Referring to the aims and purposes stipulated in the AIPA Statutes to move ASEAN towards the achievement of ASEAN goals by offering parliamentary contributions to ASEAN integration, the Committee agreed that as representatives of the ASEAN peoples, the AIPA Member Parliaments shall serve as a strong link for the peoplecentered ASEAN Community through parliamentary diplomacy.
- 13. The Committee underlined that parliamentary diplomacy can play more roles in addressing multidimensional impacts due to the pandemic through among others exchange of views. The Committee also noted the need to complement the efforts by the ASEAN Member States in accelerating regional integration and community building through parliamentary diplomacy.
- 14. The Committee agreed to strengthen parliamentary diplomacy through all levels of AIPA activities to move forward the ASEAN Community. The Committee also agreed to enhance parliamentary diplomacy between AIPA and other international organizations such as IPU, APPF and other key parliamentary counterparts. Further, the Committee encouraged ASEAN Member States to actively join AIPA activities, to promote synergy between AIPA and ASEAN.

e) Draft Resolution on Parliamentary Support on the Situation in Myanmar

15. Indonesia presented the Draft Resolution on Parliamentary Support to the Situation in Myanmar, calling to bring peace, stability and democracy back to the country. The AIPA Member Parliaments in the Committee exchanged views on the Draft Resolution consequently. They expressed their deep concerns over the situation in Myanmar and called for efforts of all parties to seek a peaceful solution in the interests of the people. They also expressed their full support for the complete and immediate implementation of the Five-Point Consensus of the ASEAN Leaders' Meeting and welcomed the appointment of the Special Envoy of the ASEAN Chair to facilitate constructive and

inclusive dialogue among all parties' concerned towards a peaceful solution. In addition, the Committee also called for the delivery of humanitarian assistance through the AHA Centre.

- 16. However, as consensus was not reached, the Committee decided to not further discuss the Draft Resolution. Indonesia, as the proponent of the Draft Resolution, respected the discussion, and for adoption of Resolutions (items 1 to 4) but affirmed its position for reservation on the Resolutions (items 1 to 4) of the Committee of Political Matters.
- 17. I hereby present the Report of the Committee on Political Matters to the 42nd General Assembly of AIPA.

Thank you.

HON. MS. NIK HAFIMI ABDUL HAADII CHAIRPERSON



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Pol/01)

RESOLUTION ON

THE ADOPTION OF THE REPORT OF THE 12TH AIPA CAUCUS HELD VIA VIDEOCONFERENCE HOSTED BY THE PARLIAMENT OF SINGAPORE

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recalling the Resolution No 28GA/2007/Pol/03 on the *Establishment of an AIPA Caucus* to provide a platform for regular interaction amongst AIPA Member Parliament;

Recognizing that the 12th AIPA Caucus monitored the implementation of the resolutions adopted at the 41st AIPA General Assembly hosted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam;

Acknowledging that the theme for Working Group discussion of the 12th AIPA Caucus was "Strengthening Supply Chain Resilience and Enhancing Trade Connectivity";

Appreciating the hosting of the 12th AIPA Caucus by the Parliament of Singapore via videoconference on 16 June 2021.

Hereby Resolves to:

Adopt the Report of the 12th AIPA Caucus held via videoconference hosted by the Parliament of Singapore.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Pol/02)

RESOLUTION ON

ENHANCING CYBERSECURITY AND DATA PROTECTION TOWARDS A RESILIENT CYBERSPACE IN ASEAN

Sponsored by Brunei Darussalam

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recalling AIPA Resolution Res.37GA/2016/Pol/04 on "Strengthening Cooperation to ensure Cybersecurity in ASEAN" adopted during the 37th AIPA General Assembly on 29 September – 3 October 2016 in Nay Pyi Taw, Myanmar;

Recalling further the ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint 2025 adopted by the ASEAN Leaders during the 27th ASEAN Summit on 22 November 2015 in Kuala Lumpur, Malaysia, which envisions the establishment of a coherent and comprehensive framework for personal data protection in recognition that global electronic commerce (e-Commerce) has become an increasingly vital element of the global economy as part of a retailer's multi-channel strategy;

Reaffirming the ASEAN Leaders' Statement on Cybersecurity Cooperation adopted during the 32nd ASEAN Summit on 27-28 April 2018 in Singapore, which recognized the growing urgency and sophistication of transboundary cyber threats and recommended the feasible options of coordinating cybersecurity policy;

Reiterating the commitment of the Heads of States/Governments of ASEAN Member States during the 35th ASEAN Summit on 2-3 November 2019 in Bangkok, Thailand, which called for the need to address cybersecurity challenges in a holistic manner;

Recognizing the importance of cybersecurity for ASEAN Member States to maximize the benefits of digitalization for socio-economic and political development; and regional and international cooperation to address the growing threats to cybersecurity;

Acknowledging the work done in fostering greater regional cybersecurity cooperation and capacity building through cross-pillar cybersecurity initiatives such as the ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC) and the ASEAN-Singapore Cybersecurity Centre of Excellence (ASCCE);

Recognizing the vital role of AIPA Member Parliaments in ensuring cybersecurity in the region, in accordance with the domestic laws, policies and regulations of ASEAN Member States;

Fully Aware also that effective cybersecurity and data protection are not merely a matter of governments or parliaments, but should be addressed through prevention and supported throughout wider society.

Hereby resolves to:

Call upon AIPA Member Parliaments to urge ASEAN Member States to promote further engagement through relevant ASEAN-led mechanisms and sectoral bodies on cybersecurity such as the ASEAN Digital Ministers Meeting (ADGMIN), ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity (AMCC), ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC), ASEAN Regional Forum (ARF) Inter-Sessional Meeting on ICT Security, ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)-Plus Experts' Working Group Meeting on Cyber Security and ASEAN Cybersecurity Coordinating Committee (ASEAN Cyber CC) for further enhancing cybersecurity cooperation in ASEAN;

Encourage ASEAN Member States to leverage on regional institutions related to cybersecurity such as the AJCCBC, ASCCE and other relevant regional collaboration frameworks to implement practical capacity-building and confidence-building measures and complement existing ASEAN efforts on cybersecurity towards the promotion of voluntary and non-binding norms of responsible State behaviours in cyberspace to enhance cybersecurity;

Urge ASEAN Member States to strengthen cooperation on cybersecurity and data protection within ASEAN and between ASEAN and its external partners and relevant stakeholders through exchanges, information sharing, collaboration mechanisms as well as Information and Communication Technology infrastructure development across strategic, policy and technical spheres; heading towards a common regional framework of cooperation to address issues of cybersecurity in conformity with relevant international laws and best practices;

Suggest that ASEAN Member States strengthen the capabilities of their respective national Computer Emergency Response Team (CERTs) and cybersecurity law enforcement agencies and encourage the undertaking of joint regional activities to enhance cooperation and collaboration in the areas of cybersecurity and data protection; and in supporting the relevant agencies in the efforts towards developing a long-term regional action plan to ensure the effective and practical implementation of the 11 voluntary, non-binding norms of State behaviours in cyberspace;

Recommend that AIPA Member Parliaments support the strengthening of relevant national policies and legal frameworks, as well as explore the possibility of harmonisation of laws in ASEAN on cybersecurity and data protection to safeguard and enhance the capacity and readiness of ASEAN towards a digital economy;

Underline that cybersecurity and data protection have become a matter of importance to every human life. Therefore, AIPA Member Parliaments are expected to actively take part in increasing awareness about the importance of cybersecurity and data protection among the people;

Urge AIPA Member Parliaments to ensure that their respective domestic legislations on cybersecurity will serve the purpose of enhancing democracy, human rights, and good governance.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Pol/03)

RESOLUTION ON FOSTERING HUMAN SECURITY TO ACHIEVE DIGITAL INCLUSION IN ASEAN

Sponsored by Malaysia

The Forty-Second General Assembly:

Recalling the ASEAN Charter, ASEAN Community Vision 2025: Forging Ahead Together, ASEAN Digital Masterplan 2025 adopted during the ASEAN Summit, East Asia Summit (EAS), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Ministerial Meeting (AMM), and ASEAN Plus Three to promote a rules-based, people-oriented and people-centered ASEAN community;

Recalling further the 1994 Human Development Report published by the United Nations Development Programme, United Nations General Assembly A/RES/60/1 or the 2005 World Summit Outcome adopted on 16 September 2005, particularly paragraph 143 thereof, A/RES/64/291 adopted on 16 July 2010 and A/RES/66/290 adopted on 10 September 2012; and the Reports of the Secretary-General A/59/2005 dated 21 March 2005, A/64/701 dated 8 March 2010, A/66/763 dated 5 April 2012 and A/68/685 dated 23 December 2013 on a common understanding on the notion of human security, which is based on the right of people to live in freedom and dignity, free from poverty and despair, and entitled to freedom from fear and freedom from want;

Reaffirming support for the 37th ASEAN Summit 2020 held virtually on 12 November 2020 chaired by Viet Nam; the ASEAN Leaders' Vision Statement on A Cohesive and Responsive ASEAN: Rising Above Challenges and Sustaining Growth adopted on 26 June 2020; the Joint Media Statement of the 1st ASEAN Digital Ministers' Meeting and Related Meetings adopted on 22 January 2021, and the ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) and its Implementation Plan;

Noting the outcomes of the virtual segment of 142nd Inter-Parliamentary Union (IPU) Virtual Assembly held on 24-27 May 2021; Annual Inter-Parliamentary Union Parliamentary Hearing at the United Nations held on 17 February 2021; and the virtual segment of the Fifth World Conferences of Speakers of Parliament held on 20 August 2020; which reaffirmed the commitment of the Inter-Parliamentary Union Member Parliaments in supporting the continuing efforts in digital inclusion;

Highlighting that there is a significant progress in ASEAN Member States in realising the 2030 Agenda for Sustainable Development, adopted by all United Nations Member States in 2015, particularly in fostering human security and promoting innovations geared towards bridging the digital divide;

Reiterating that digital inclusion as one of the key pillars of COVID-19 recovery and achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs);

Acknowledging the importance of human security approach and the value of open, unrestricted dialogue and trust among parliamentarians in identifying and addressing widespread and crosscutting challenges to the survival, livelihood and dignity of the people in the region;

Further Acknowledging that a lack of information and digital technology negatively impacts personal, political and economic capabilities;

Reaffirming that human security must be implemented with full respect of the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations, the ASEAN Charter, the ASEAN Declaration on Human Rights, including full respect of the sovereignty of ASEAN Member States, territorial integrity and non-interference in internal affairs; and that human security does not entail additional legal obligations on the part of ASEAN Member States.

Hereby resolves to:

Recognise AIPA as an essential platform to explore and promote the common understanding on the concept and approach of human security through meaningful dialogues and exchange of best practices to achieve digital inclusion in the region;

Urge AIPA Member Parliaments to reinforce parliamentary diplomacy in supporting and complementing diplomatic efforts by States/Governments;

Call upon AIPA Parliamentarians to consider the needs of their respective communities in enhancing human securities of freedom from want, fear and indignity through cohesive and responsive measures in accordance with the ASEAN Charter, the ASEAN Declaration on Human Rights and relevant ASEAN instruments;

Support the embodiment of human security ethos of freedom from want, freedom from fear and freedom from indignity as part of AIPA's common commitment and aspiration;

Encourage the AIPA Member Parliaments to actively collaborate on potential human security approach, including but not limited to ACRF and its Implementation Plan, that address social, political and economic matters at the regional and national levels;

Recommend the AIPA Member Parliaments to provide their stronger national legal instruments and other necessary strides aimed at accelerating the digital inclusion particularly in support of pandemic recovery and the SDGs by 2030;

Urge the AIPA Member Parliaments to support efforts by ASEAN Member States to effectively implement the Broad Strategy 4-Accelerating Inclusive Digital transformation of the ASEAN Comprehensive Recovery Framework, the ASEAN Digital Master Plan 2025, adoption and realisation of the ASEAN 4IR Strategy, taking into account the human security approach;

Emphasise the importance of engagement between parliamentarians and their respective communities in raising awareness on digital inclusion and human security approach;

Request the AIPA Secretariat to work with the United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS) to explore potential areas of cooperation.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Pol/04)

RESOLUTION ON PROMOTING PARLIAMENTARY DIPLOMACY TO MOVE THE ASEAN COMMUNITY FORWARD

Sponsored by Thailand

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recalling the Resolution on the "Contribution of Parliaments to Enhancing the Role of the United Nations and the Strengthening of Parliaments' Involvement in Foreign Policy through the Development of Parliamentary Diplomacy and Closer Collaboration between the Executive and the Legislative," adopted by the Inter-Parliamentary Union (IPU) during the 88th Inter-Parliamentary Conference in Stockholm, Sweden on 12 September 1992, which states clearly that parliamentary diplomacy plays an important role in strengthening the United Nations to achieve its goals;

Acknowledging the Resolution on "Promoting Parliamentary Diplomacy for Peace, Security and Prosperity in the Region and The World" adopted by the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) during its 26th Annual Meeting in Hanoi, Vietnam in 2018, which provides the crucial role of parliament at the international stage and a platform for solving issues in many aspects, including political, economic and social issues;

Recognizing the Pattaya Declaration adopted during the General Assembly of the Association of Asian Parliaments for Peace (AAPP) which encourages parliamentarians to implement the concept of parliamentary diplomacy by increasing their participation in international affairs as well as working more closely with their respective governments on such area;

Emphasizing the importance to promote a rule-based, people-oriented and people-centered ASEAN Community bound by fundamental principles, shared values and norms, including the implementation of ASEAN declarations and agreements at the national level, to facilitate regional integration in moving forward the ASEAN Political-Security Community envisaged in the ASEAN Community Vision 2025;

Reaffirming the aims and purposes in the AIPA Statutes to move ASEAN towards the achievement of ASEAN goals and also by establishing and maintaining exchange and dissemination of information as well as coordination, interaction and consultations with ASEAN by offering parliamentary contributions to ASEAN integration;

Realizing that since parliamentarians are representatives of the people, the development of inter-parliamentary relationship through parliamentary diplomacy can serve as a strong link for the people-centered ASEAN Community;

Recognizing challenges posed by rapidly-changing geo-strategic landscapes, emerging complex traditional and non-traditional security challenges, unprecedented and multifaceted impacts of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic;

Underlining that parliamentary diplomacy can play more roles in addressing multidimensional impacts due to the pandemic through inter-alia exchange of views on the formulation of necessary strides, which is consistent particularly with democracy and fundamental human rights;

Being convinced of the need to enhance parliamentary diplomacy to support efforts by the Governments of ASEAN Member States to move forward regional integration and Community-building amidst uncertainties and challenges, maintain ASEAN unity and centrality while enhancing ASEAN's capacity to effectively respond to emerging challenges as well as fostering a sustainable and resilient development path for the ASEAN Community.

Hereby resolves to:

Strengthen parliamentary diplomacy through all levels of AIPA activities to move the ASEAN Community forward in achieving regional peace, stability and security, dynamic and inclusive economic growth, green economy, equitable and sustainable development, human security and caring societies;

Enhance parliamentary diplomacy between AIPA and other international organizations, such as IPU, APPF and other key parliamentary counterparts;

Encourage AIPA Member Parliaments to support the promotion and the protection of democracy, rule of law and fundamental rights;

Encourage the Governments of ASEAN Member States to join actively AIPA activities in ensuring that the Interface between Leaders of AIPA Member Parliaments and ASEAN Member States on the sidelines of the ASEAN Summit will focus on concrete actions in addressing issues of concern to all people, stability and development of ASEAN Member States;

Reinforce cooperation between AIPA Member Parliaments and Governments of ASEAN Member States through the AIPA framework which encompasses the AIPA General Assembly, AIPA Caucus as well as AIPA observer countries to push for the harmonization of laws, regulations or practices among member countries;

Encourage AIPA Member Parliaments to increase their efforts in addressing any issues related to laws or international agreements and promote ASEAN fundamental principles, shared values and norms as well as principles of international law governing the peaceful conduct of relations;

Instruct the AIPA Secretariat to work closely with the ASEAN Secretariat in identifying legislative impediments to the realization of the ASEAN Community especially in areas of political-security, economic and socio-cultural cooperation, to prepare agenda for the annual Interface between Leaders of AIPA Member Parliaments and ASEAN Member States.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

Doc.42GA/2021/Eco Rep

REPORT OF THE COMMITTEE ON ECONOMIC MATTERS

His Excellency Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, The President of 42nd AIPA and Speaker of the Legislative Council of Brunei Darussalam

Your Excellencies, Honorable Delegates Ladies and Gentlemen,

It is my great honor to submit the following Report of the Committee on Economic Matters.

- 1. The Meeting was held virtually on 24th August 2021 at 01.45 pm GMT +8. It waspresided over by Honourable Ms. Siti Rozaimeriyanty Dato Seri Laila Jasa HajiAbdul Rahman, Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam as theChairperson. The Vice-Chairperson from the next host country for the 43rd General Assembly of AIPA, Cambodia, was appointed for the meeting.
- 2. The following Parliamentarians from 9 AIPA Member Parliaments attended the meeting.

Brunei Darussalam

- a) Hon. Ms. Nik Hafimi Abdul Haadii
- b) Hon. Pehin Dato Haji Judin Haji Asar
- c) Hon. Mr. Pengiran Haji Ali Pengiran Maon
- d) Hon. Mr. Haji Mohimin Haji Johari
- e) Hon. Mr. Awang Hanapi Bin Mohd Siput

Cambodia

- a) Hon. Mr. Ty Sokun
- b) Hon, Mr. Ai Khan
- c) Hon. Mr. Chay Borin
- d) Hon. Mr. Kheav Phearith
- e) Hon. Mr. Ouk Damry

Indonesia

- a) Hon. Mr. Hafisz Tohir
- b) Hon. Mr. I Gusti Agung Rai Wirajaya

Lao PDR

- a) Hon. Assoc. Prof. Dr Linkham Douangsavanh
- b) Hon. Mr. Thanta Kongphaly

Malaysia

- a) Hon. Mr. Ahmad Fadhli Shaari
- b) Hon. Mr. Datuk Zakaria Mohd Edris

Philippines

a) Hon. Sharon S. Garin

Singapore

- a) Hon. Mr. Saktiandi Supaat
- b) Hon. Mr. Shawn Huang
- c) Hon. Ms. Ng Ling Ling

Thailand

- a) Hon. Mr. Manoon Sivapiromrat
- b) Hon. Mrs. Pikulkeaw Krairiksh
- c) Hon. Mr. Krisda Tanterdtit

Vietnam

- a) Hon. Pham Thi Hong Yen
- b) Hon. Vu Thi Luu Mai
- c) Hon Thai Quynh Mai Dung
- d) Hon. Bui Hoai Son
- 3. The Meeting of the Committee on Economic Matters was held in the traditional ASEAN spirit of friendship, unity and cooperation. The AIPA Member Parliaments discussed and approved 2 resolutions as follows:
 - a) Resolution on Promoting Inclusive Digital ASEAN to Empower MSMEs And Strengthen the ASEAN Economic Integration.
- 4. The resolution was introduced on the recognition that the impact of COVID-19 has affected the economy, especially MSMEs, and also acknowledged the importance of economic integration as the main agenda of the ASEAN Economic Community as well as the digital inclusion in ASEAN.
- 5. The Committee affirmed the important role played by digital technology in strengthening ASEAN's economic connectivity and readiness to respond to the challenges caused by the COVID-19 pandemic. The Committee also highlighted the importance of MSMEs as the backbone of ASEAN's diverse and dynamic economy. The Committee discussed further concerning the development of MSMEs capabilities and networking, including digital upskilling and reskilling of MSMEs.

6. Therefore, the Committee resolved to promote legislation and policies towards harmonization for ASEAN economic digital integration, which prioritize connectivity, especially sub-region and remote area connectivity, regional integration and narrow the development gap among AMS in coordination to capture the opportunities of transitioning into the Fourth Industrial Revolution in attaining and achieving integration in key sectors for overall ASEAN economic integration. Further, the Committee encouraged the digital economy and transformation as the way forward of doing business for the MSMEs to provide better opportunities and overcome the effect of economic disruptions due to COVID-19 pandemic.

b) Resolution on Post COVID-19 Economic Recovery: Tourism Cooperation in ASEAN.

- 7. The Resolution highlighted that the COVID-19 pandemic has caused severe damage to tourism worldwide especially in ASEAN where the economy is heavily dependent on the tourism sector. However, the Committee underscored that the tourism sector will play a significant role in delivering sustainable solutions for ASEAN region on the post COVID-19 by strengthening the cooperation among each Member States.
- 8. During the discussion and deliberation of the Resolution, the Committee reaffirmed the commitment of the AIPA to fully support the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025 by re-prioritizing activities and projects aimed at revitalizing tourism in the region after overcoming the COVID-19 pandemic. Through the Resolution, the Committee also supported the vision of ASEAN Tourism 2025 whereby ASEAN aim to be a safe and quality tourist destination offering a unique, diverse ASEAN experience, and commit to be a responsible, sustainable, inclusive and balanced tourism development, so as to contribute significantly to the socio-economic well-being of ASEAN people, especially during the post pandemic period of COVID-19.
- 9. The Committee also encouraged Parliamentarians of the AIPA Member Parliaments to support and facilitate the integrated and coordinated approach towards the essential movement of the people in the ASEAN region. Further, the Committee call upon AIPA Member Parliaments and ASEAN Member States to foster regional cooperation through sharing best practices, policies, and capacity building.
- 10. I hereby present the Report of the Committee on Economic Matters to the 42nd General Assembly of AIPA.

Your Excellency and Honorable Delegates,

As we navigate the roads of recovery from the devastating economic impact of the pandemic, governments in the region need to seize the opportunity to support MSMEsin building resilience and emerge stronger by accelerating digitalization and building an inclusive digital future. Furthermore, with the current relentless vaccination rollouts, our travel sector will also need to prepare for its revival.

"Let us Care and Recover, Prepare for Stronger Unity and Prosper Together –Sama Sama"

Thank you, Your Excellency and Hon Delegates.

HON. MS. SITI ROZAIMERIYANTY DATO SERI LAILA JASA HAJI ABDUL RAHMAN CHAIRPERSON



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Eco/01)

RESOLUTION ON

PROMOTING INCLUSIVE DIGITAL ASEAN TO EMPOWER MSMES AND STRENGTHEN THE ASEAN ECONOMIC INTEGRATION

Jointly Sponsored by Brunei Darussalam and Malaysia

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recalling the AIPA Resolution Res39GA/2018/Econ/03 on "Deepening Regional Economic Integration in ASEAN"; the AIPA Resolution Res40GA/2019/ECO/01 on "Fostering Inclusive Development in ASEAN"; the AIPA Resolution Res40GA/2019/ECO/03 on "Improving Digital Connectivity to Support the Growth of MSMEs"; and the AIPA Resolution Res41GA/2020/Eco/01 on "The Role of Parliaments in Promoting ASEAN Cohesiveness and Economic Recovery Post Covid-19"; adopted at the 39th, 40th and 41st AIPA General Assembly respectively, which highlights the importance of improving digital connectivity as one of the contributing factors to accelerate ASEAN Economic Integration and in particular the growth of MSMEs as well as affirming the important role played by digital technology in strengthening ASEAN's economic connectivity and readiness to respond to challenges caused by the COVID-19 pandemic;

Acknowledging the ASEAN Economic Community Blueprint 2025 and the signing of the Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP), both of which aim to create a deeply integrated and highly cohesive ASEAN economy that would engender a more equitable and inclusive economic growth; support sustained high economic resilience even during global economic shocks, volatilities, and pandemic as well as to propel ASEAN towards a digitally-enabled economy that is safe, secure, sustainable and transformative, capable to further leverage and enhance the use of ICT for an innovative, inclusive and integrated ASEAN;

Remaining Mindful of the impact of the COVID-19 pandemic on the economic development and integration of the ASEAN region in addition to its direct and indirect disruption of the financial market, market and supply chain including the vulnerable sectors for MSMEs; supporting the implementation of the ASEAN Agreement on e-Commerce, ASEAN Framework for Personal Data Protection and ASEAN Digital Masterplan to enable the vision of ASEAN being safe and secure digital economy and digital society;

Welcoming the result of the 1st ASEAN Digital Ministers' Meeting and Related Meetings in January 2021 that stressed the importance of accelerating inclusive digital transformation in ASEAN, which is one of the key strategies adopted under the ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) and its Implementation Plan, which serves as a consolidated exit strategy from the COVID-19 crisis;

Emphasizing the importance of MSMEs as the backbone of ASEAN's diverse and dynamic economy, which is currently lagged behind in digital connectivity, resources, skills and strategy of digital transformation. Hence the development of MSMEs capabilities and networking, including digital upskilling and reskilling of MSMEs to achieve significant uplift in productivity; efficiency and market expansion within the region, and other supports of MSMEs participation in the digital economy to boost economy and improve society during the post-COVID-19 as identified in the ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) and the Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 so that they may continue to play a pivotal role in the growth of ASEAN economy;

Further emphasizing the priority areas identified in the ASEAN Digital Integration Framework Action Plan (DIFAP) 2019-2025, which aims are to facilitate seamless trade, to protect data and privacy while supporting digital trade and innovation, to enable seamless digital payments, to broaden digital talent base, to foster and promote the policy on STEM and entrepreneurship learning in coordinating actions and to effectively implement and enable the acceleration of digital integration within ASEAN.

Hereby resolves to:

Call upon AIPA Member Parliaments to promote policies and legislation towards harmonization for ASEAN economic digital integration, which prioritize connectivity, especially sub-region and remote area connectivity, regional integration and narrow the development gap among AMS in coordination to capture the opportunities of transitioning into the Fourth Industrial Revolution in attaining and achieving integration in key sectors for overall ASEAN economic integration;

Call for the acceleration of digital integration by further enhancing the affordable, accessible digital infrastructure and regional consensus on data governance needed to support the increasing demand for digital connectivity in the region including developing domestic regulations that seeks for mobilizing and allocating adequate budget and resources supporting the objectives of the ASEAN economic integration through digital connectivity and inclusion; especially investment in education and training to upskill and reskill people to ensure that the impact of new technologies will not lead to widening the gap of development inequality;

Encourage AIPA Member Parliaments to promote digital economy and transformation as the way forward of doing business for the MSMEs to provide better opportunities and overcome the effect of economic disruptions due to COVID-19 pandemic by enhancing national efforts including on the provision of supporting governments' efforts in delivering assistance and working with business sectors to support the integrated digital connectivity in order to increase ASEAN trade and support the development of MSMEs;

Support efforts of Governments of ASEAN Member States to effectively implement the Broad Strategy 4-Accelerating Inclusive Digital transformation of ACRF and the development of the ASEAN Consolidated Fourth Industrial Revolution Strategy;

Call upon AIPA Member Parliaments to encourage the establishment of roadmaps for digitalization of MSMEs with focus on restructuring business models to optimize their performance and productivity and to improve their capacity and competitiveness, contributing to the development of digital economy in each country;

Strongly advise the exploration of potential partnerships among ASEAN Member States and AIPA Member Parliaments to promote excellence, innovation and productivity; share best practice of supporting MSMEs digital transformation and digital platforms in the region; to facilitate and enhance market access, digital financial inclusion and improve the

internationalization of MSMEs to promote entrepreneurship and human capital development towards a thriving economic environment in ASEAN;

Urge ASEAN Member States and AIPA Member Parliaments to adapt laws and regulations to protect our digital economy, including MSMEs from various cyber threats, so that an ethical environment for digitalization can be created by considering the various pitfall of digitalization such as digital dementia, data privacy, fake news and cyberattack;

Strengthen cooperation with stakeholders in the region to advocate awareness on the benefit of digital society as well as on education and digital inclusion in order to improve the ICT skills and digital literacy of people in ASEAN Member States;

Support research on Central Bank Digital Currencies (CBDCs) and all forms of financial technology to enhance MSMEs performance as well as in shaping international regulations, standards, norms, values, and ethics in financial technology.—

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Eco/02)

RESOLUTION ON

THE POST – COVID-19 ECONOMIC RECOVERY: TOURISM COOPERATION IN ASEAN

Sponsored by Thailand

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recalling AIPA Resolution Res 41GA/2020/Soc/03 on "Enhancing AIPA's Role in Supporting ASEAN Socio-Cultural Community in Responding to COVID-19" that AIPA deeply sympathizes with the unprecedented impact of the Corona Disease 2019 (COVID-19) pandemic, which tremendously affected the ASEAN socio-cultural community, particularly the people's health, well-being, safety, social welfare, income, employment, education, and other socio-cultural fields:

Firmly Supporting the resolution's aim which calls for ASEAN's resolve to consolidate the ASEAN Community; in achieving the ASEAN Community Vision 2025 of building a people-oriented and people-centered ASEAN Community by stepping up the ASEAN Member States' efforts and cooperation through deepening the integration to mitigate the impacts of natural disasters and the pandemic on ASEAN's citizens;

Recalling also the ASEAN Comprehensive Recovery Framework and its Implementation Plan and the ASEAN Declaration on Digital Tourism adopted at the 37th ASEAN Summit on 12 November 2020, which provides coordinated and consolidated strategy for post-pandemic recovery, inter-alia in tourism sector, including through digital technology and innovation;

Reaffirming the commitment of AIPA to support the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025, amended in February 2021 by re-prioritizing activities and projects aimed at revitalizing the tourism in the region after overcoming the COVID-19 pandemic; which reflects the strategic direction of future tourism cooperation in moving forward to sustainable, inclusive and resilient tourism in the region;

Reaffirming the ASEAN's commitment to care for its people and prepare for the future opportunities and challenges, in order to advance sustainable development for shared prosperity in the region as stated in the 54th ASEAN Foreign Ministers Meeting (AMM);

Welcoming the development of a Post COVID-19 Recovery Plan for ASEAN Tourism linked and strengthened the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025, which provides coordinated measures for ASEAN Member States to proactively respond to the impact of COVID-19 pandemic on tourism sector with existing activities and new initiatives;

Emphasizing the United Nations' Sustainable Development Goals (SDG), particularly Goal 12 on Responsible Consumption and Production, so that tourism can and may play a significant role in delivering sustainable solutions for the people by creating jobs and enhancing the economic and social outcomes whereby the tourism sector must adopt Sustainable Consumption and Production (SCP) models of preserving energy, water, waste, and biodiversity, by creating jobs and enhancing the economic and social outcomes as well as cultural diversity;

Welcoming ASEAN initiatives to fight against the COVID-19 pandemic including the COVID-19 ASEAN Response Fund, the Strategic and Holistic Initiative to Link ASEAN Responses to Emergencies and Disasters (ASEAN SHIELD) as well as other post-pandemic recovery plans.

Hereby resolves to:

Call upon AIPA Member Parliaments to closely engaged in the ASEAN post-pandemic recovery plans for the regional resilience and development as well as urge the Governments of ASEAN Member States to urgently implement the Action Plan for the ASEAN Vaccine Security and Self-Resilience, the ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies and the ASEAN Comprehensive Recovery Framework;

Strengthen public health cooperation by creating vaccine security and self-reliance particularly in the implementation of the Regional Strategic and Action Plan on ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance (AVSSR) 2021- 2025; to make the COVID-19 vaccines available and affordable as a public product and as global public goods, which would support the recovery of tourism sector in the post-COVID-19 era;

Support the vision for ASEAN Tourism to 2025 whereby ASEAN aim to be a safe and quality tourist destination offering a unique, diverse ASEAN experience, and commit to being a responsible, sustainable, inclusive and balanced tourism development, so as to contribute significantly to the socio-economic well-being of ASEAN people, especially during the post pandemic period of COVID-19;

Encourage the AIPA Member Parliaments to support and facilitate the integrated and coordinated approach towards the essential movement of people in the ASEAN region, for tourism and other travels, while safeguarding public health in line with the efforts to combat the pandemic;

Encourage innovation and research by ASEAN Member States to diversify tourism products and services to meet the new trend of post-COVID-19 tourism including safe destinations and healthcare tourism;

Urge all ASEAN Member States to successfully implement the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025 and to strengthen the ASEAN Community by promoting green recovery, choosing not to exploit our resources and biodiversity and cultural diversity for the sole purpose of pursuing economic growth since the result of such action would come to a cost of resource degradation, the decline of biodiversity and a number of pollutions which would result to environmental damage and health problems as well as cultural conflicts in the long run;

Encourage AIPA Member Parliaments and ASEAN Member States to foster regional cooperation through sharing best practices and policies as well as capacity building such as providing better access to skill development, educational exchange programs and regional research networks for tourism professionals in areas such as digital technologies, innovation, eco-tourism and entrepreneurship, which will contribute to empowerment and resilience of tourism sector in the post COVID-19 recovery and adversity of future crisis to build a more sustainable, inclusive and resilient tourism that can overcome future challenges;

Encourage tourism travel bubbles, by specializing routes to tourism sites in member countries. People traveling from and to different destinations are tested to make sure they are not infected with the novel coronavirus and go straight to the safe zones.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.

P10



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

Doc.42GA/2021/Soc Rep

REPORT OF THE COMMITTEE ON SOCIAL MATTERS

His Excellency Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, The President of 42nd AIPA and Speaker of the Legislative Council of Brunei Darussalam,

Your Excellencies, Honourable Delegates, Ladies and Gentlemen,

It is my great honour to submit the following Report of the Committee on Social Matters.

- 1. The Meeting was held virtually on 24th August 2021 at 4.30 pm GMT +8. It was presided over by Honourable Ms. Khairunnisa Haji Ash'ari, Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam as the Chairperson. The Vice-Chairperson from the next host country, Cambodia was appointed for the meeting.
- 2. The following Parliamentarians from 9 AIPA Member Parliaments attended the meeting.

Brunei Darussalam

- a) Hon. Mr. Ong Tiong Oh
- b) Hon. Pehin Dato Haji Judin Haji Asar
- c) Hon. Mr. Iswandy Ahmad
- d) Hon. Mr. Haji Tahamit Haji Nudin
- e) Hon. Mr. Haji Abdul Wahab Apong
- f) Hon. Mr. Haji Emran Haji Sabtu

Cambodia

- a) Hon. Mr. Yang Sem
- b) Hon. Mrs. Nin Saphon
- c) Hon. Mrs. Lork Kheng
- d) Hon. Mrs. Un Sokunthea
- e) Hon. Mrs. Mak Vansitha
- f) Hon. Mr. Long Bunny

Indonesia

- a) Hon. Mr. Putu Supadma Rudana
- b) Hon. Mr. Arkananta Akram

Lao PDR

- a) Hon. Mrs. Thoummaly Vongphachanh
- b) Hon. Mr. Bounelome Keobouahome

Malaysia

- a) Hon. Mrs. Dato' Sri Hajah Rohani Abdul Karim
- b) Hon. Mr. Wong Chen
- c) Hon. Mr. Ahmad Fadhli Shaari

Philippines

a) Hon. Ms. Rose Marie "Baby" J. Arenas

Singapore

- a) Hon. Mr. Sitoh Yih Pin
- b) Hon. Ms. Hany Soh
- c) Hon. Mr. Don Wee

Thailand

- a) Hon. Mr. Jetn Sirathranont
- b) Hon. Mr. Chakkrapan Pornnimit
- c) Hon. Ms. Pechdau Tohmeena

Vietnam

- a) Hon. Mr. Nguyen Tuan Anh
- b) Hon. Mr. Nguyen Hoang Mai
- c) Hon. Mr. Dinh Cong Sy
- d) Hon. Mr. Pham Phu Binh
- 3. In the spirit of friendship, solidarity and cooperation, the Committee on Social Matters discussed and approved three (3) Resolutions:
 - a) Resolution on the Adoption of the 4th AIPACODD Report and Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges Towards Drug-Free ASEAN
- 4. The Committee considered and adopted the Report of the meeting of the 4th AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) and the Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges Towards Drug-Free ASEAN which was held via videoconference on 24th May 2021, hosted by the Legislative Council of Brunei Darussalam at the International Convention Centre, Berakas, Brunei Darussalam.

5. The Resolution emphasised on commanding the AIPA Member Parliaments to reaffirm its stance of zero tolerance approach, introduce effective measures, reinforce existing policies, promote further cross-border cooperation and strengthen cooperation with drug law enforcements agencies, national authorities and other institutional bodies to ensure the commitment of AIPACODD in its strive towards a drug-free ASEAN.

b) Resolution on Strengthening Cooperation and Enhancing Digital Inclusion to Mitigate the Impacts of Climate Change

- 6. The resolution reaffirmed the importance of climate change as a regional challenge that has been highlighted in several Resolutions adopted at the previous AIPA General Assemblies.
- 7. During the deliberation, the delegates shared the same concern on the vulnerability of the region to the climate change threats that could affect the vital yet vulnerable segments of the economic sectors including agriculture, natural and built environments, biodiversity, food supply, food security, and public health. The delegates acknowledged the importance of regional cooperation and the role of digital technology in advancing climate action and reducing the risk of climate change in the region.
- 8. Realizing the importance of regional cooperation, the Committee unanimously agreed to collaborate in utilizing digital technology as an effective enabling tool for the management, monitoring, warning, reporting information on climate change mitigation, resilience, and adaptation. Hence through the resolution, the Committee called upon the ASEAN Member States to establish a network of information exchanges in climate science, research, and systematic observation and data sharing. Further, the delegation also urged the ASEAN Member States to strengthen climate financing and enhance opportunities for technical assistance in terms of capacity building and technology transfer among one another.

c) Resolution on Localising the Sustainable Development Goals for Effective National Implementation

- 9. Taking into consideration the targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development adopted by the United Nations in 2015, the Resolution emphasized the need for Parliamentarians of the AIPA Member Parliaments to play a progressively crucial role in driving forward effective national implementation of the Goals and Targets. The Resolution further emphasized that localizing the SDGs will accelerate the implementation of the 2030 Agenda to be relevant and beneficial to the people of ASEAN.
- 10. The Committee agreed that as the people's elected representatives, Parliamentarians should play an active role to ensure laws and policies contributed to achieving the 2030 Agenda. The Committee also stressed the importance of coordination, cooperation, and communication between the decision-making bodies at all levels of government and the private sector for effective implementation. Thus, the Committee considered setting up a mechanism of communication with various

stakeholders to enable Parliamentarians to have a wide range of perspectives in reviewing the national priorities and policies, which further enhance the role of local governments in implementing the 2030 Agenda in their local context.

11. Aside from that, the delegates acknowledged that digitalization offers an opportunity to improve interaction, coordination, and cooperation among stakeholders. The delegates also believed that digitalization is critical to support timely data availability, data accessibility, and data quality. It is also critical to effectively monitor the progress of the implementation of the action plan. Thereby, the Committee agreed to call on Parliamentarians of AIPA Member Parliaments to review policies that will develop innovative and coherent programs for upskilling and reskilling that assure digital connectivity and participation of the local citizen in implementing and monitoring the SDGs.

d) Draft Resolution on Technology to Facilitate Greater Election Participation

- 12. Malaysia, as the proposing country, presented a brief explanation on the Draft Resolution on Technology to Facilitate Greater Election Participation. As elections are considered as an internal affair of each ASEAN Member State, there was a concern that the Draft Resolution is not in harmony with the principle of non-interference. As suggested by some AIPA Member Parliaments, the Committee decided to defer the Draft Resolution to the next AIPA General Assembly.
- 13. I hereby present the Report of the Committee on Social Matters to the 42nd General Assembly of AIPA.

Thank you.

HON. MS. KHAÍRÚNŇISA HAJI ASH'ARI CHAIRPERSON



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Soc/01)

RESOLUTION ON

THE ADOPTION OF THE REPORT OF THE 4TH MEETING OF THE AIPA COUNCIL ON DANGEROUS DRUGS (AIPACODD) AND THE RESOLUTION ON PREVAILING THE CONTEMPORARY AND RESPONSIVE CHALLENGES TOWARDS DRUG-FREE ASEAN

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recalling Resolution 23GA/2002/Soc/07 on the *Terms of Reference of the AIPO Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace* which stated that the AIFOCOM shall meet at least once a year, preferably in the country where the AIPA General Assembly is to be held that year, and Resolution 40GA/2019/Org/17 which resolved that the 41st General Assembly shall be held in Viet Nam;

Further recalling Resolution 38GA/2017/Soc/02 on *The Terms of Reference of the AIPACODD* which stated the transformation from AIFOCOM to AIPACODD as a parliamentary tool to fight dangerous drugs and mandated the AIPA Secretariat to ensure legal and mutual cooperation and the sharing of information and best practices among AIPA Member Parliaments to fight the drug menace;

Noting that the 4th AIPACODD Meeting was held via videoconferencing on 24 May 2021 hosted by the Legislative Council of Brunei Darussalam, and the report of the 4th AIPACODD Meeting including the Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges Towards Drug-Free ASEAN;

Recognizing that the Report of the 4th AIPACODD Meeting and the Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges Towards Drug-Free ASEAN demonstrated unified concern and action by AIPA Member Parliaments of achieving a drug-free ASEAN region.

Hereby resolves to:

Adopt the Report of the 4th AIPACODD Meeting and the Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges Towards Drug-Free ASEAN.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.

Q5



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Soc/02)

RESOLUTION ON

STRENGTHENING COOPERATION AND ENHANCING DIGITAL INCLUSION TO MITIGATE THE IMPACTS OF CLIMATE CHANGE

Sponsored by Brunei Darussalam

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recalling AIPA Resolution 28GA/2007/SOC/07 on Climate Change as a Regional Challenge; AIPA Resolution 31GA/2010/SOC/01 on Climate Change, Disaster Management and Pandemic Prevention; AIPA Resolution 37GA/2016/SOC/03 on Enhancing Cooperation in Response to Climate Change in ASEAN; and AIPA Resolution 40GA/2019/SOC/05 on Regional Parliamentary Initiative for Enhancing Climate Change in ASEAN;

Noting the Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) adopted in 2015, which aims to strengthen the global response to the threat of climate change, committed to hold the increase in the global average temperature to well below 2 degree Celsius above pre-industrial levels, and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 degree Celsius compared to pre-industrial levels and committed to increase the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas (GHG) emissions development, in a manner that does not threaten food production;

Acknowledging ASEAN's commitment to the UNFCCC and the Paris Agreement, in particular the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities (CBDR-RC), in the light of different national circumstances;

Reiterating the ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 25th Session of the Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP25) adopted in Bangkok on 2 November 2019;

Recognising the ASEAN Working Group on Climate Change Action Plan (2016-2025), ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation Phase II (2021 – 2025) and ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) Work Programme (2021-2025);

Acknowledging with a deep concern the increasing vulnerability and exposure of ASEAN region to climate change threats, and the looming displacement of economically dependent residents living along the region's coastlines due to the rising sea levels, increasing temperature and extreme weather conditions, and exacerbating climate-induced disasters such as flood, flash floods, landslides, forest fires and transboundary haze pollution;

Acknowledging the importance of regional cooperation in the areas of sustainable utilisation of natural resources, enhancement of disaster management capacities and the adoption of capacity-building initiatives for disaster risk reduction, which includes but not limited to the enhancement of the preparedness and response for emerging multi-hazard and large scale disasters, to enhance ASEAN's capability to mitigate and adapt to climate change and reduce the adverse risks and impacts of climate-induced catastrophes to the vital yet vulnerable segments of key economic sectors like agriculture, natural and built environments, biodiversity, food supply and food security, and public health;

Realising the role of digital technology and the achievements of the 4th Industrial Revolution in socio-economic development in advancing climate action and reducing the risks of climate change in the region.

Hereby resolves to:

Encourage ASEAN Member States initiatives to align strategies, policies, action plans and roadmaps particularly on climate change mitigation, resilience and adaptation, while considering utilising digital technology as an effective enabling tool;

Encourage ASEAN Member States to strengthen policy coherence among several critical sectors development through digital technology adaptation;

Encourage AIPA Member Parliaments to collaborate and provide guidance within ASEAN in utilising available resources towards integrating digital technology for the management, monitoring, warning, reporting information on greenhouse gas emissions and climate change mitigation resilience and adaptation as well as encouraging AIPA Member Parliaments to adopt and amend the relevant laws and regulations on climate change and disaster control;

Call upon ASEAN to establish cooperation and a network of information exchanges in climate science, research and systematic observation and data sharing between ASEAN Member States. In addition to setting up a harmonised regional data centre to coordinate the sharing of information between ASEAN Member States with a close link towards Disaster Risk Management, it may also be set up to carry out climate assessments, introduce Artificial Intelligence (AI) and big data as a monitoring and tracking tool, generate an online hazard mapping and early warning system;

Urge ASEAN Member States to explore, enable and strengthen climate financing and enhance opportunities for technical assistance; capacity building and technology transfer among one another to facilitate relevant and timely climate actions towards climate adaptation and resilience;

Emphasise the importance of enhancing digital inclusion in tackling climate change to improve the adoption of green technologies and reducing greenhouse gas emissions;

Enhance public preparedness against climate-induced disasters through the promotion of Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction (CCA and DRR) programmes improve education, awareness-raising, human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning to build more disaster-resilient communities at all levels of society;

Strengthen public and private partnerships at national and regional levels to enhance community resilience and increase capacity to adapt and cope with the impacts of changing climate.

| Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42 nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually. | | |
|---|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Soc/03)

RESOLUTION ON

LOCALISING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS FOR EFFECTIVE NATIONAL IMPLEMENTATION

Sponsored by Malaysia

The Forty-Second General Assembly:

Guided by the Kuala Lumpur Declaration on *ASEAN 2025: Forging Ahead Together* and the ASEAN Community Vision 2025 for a peaceful, stable, and resilient Community able to respond effectively to challenges;

Referring to the United Nations Resolution on "*Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*" adopted at the UN Sustainable Development Summit on 25 September 2015 in New York, and the Decade of Action announced in September 2019 for accelerating sustainable solutions to the world's biggest challenges;

Also referring to Hanoi Declaration on "the Sustainable Development Goals: *Turning Words into Action*" adopted by the 132nd Inter-Parliamentary Assembly held in Hanoi on 1st April 2015, which aims to promote the parliamentary engagement in the implementation on Sustainable Development Goals, as well as the IPU Self-Assessment Toolkit designed to assist Parliaments in assessing the effectiveness of their participation in implementing the goals in their own country;

Taking note of the New Urban Agenda adopted at the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III) on 20 October 2016 in Quito, Ecuador, as the key instrument for enabling national, sub-national and local government units and all stakeholders to achieve sustainable urban development, as well as the outcome of the ASEAN-China-UNDP Symposium on "Localising the SDGs and realising poverty eradication" in Siem Reap, Cambodia in 2018, which states that strengthening the governance at the local level can make a significant impact in developing and implementing inclusive and coherent policies;

Fully aware that the complementarities between the ASEAN Community Vision 2025 and the UN 2030 Agenda for Sustainable Development can uplift the standards of living of our peoples and that its implementation requires the involvement of the private sectors, especially the participation of parliamentarians;

Recognizing that strengthening governance at the local level can make a significant impact in developing and implementing inclusive and coherent policies;

Acknowledging that AIPA parliamentarians play an active role in this regard to ensure laws and policies contribute to achieving the 2030 Agenda;

Stresses the importance of enabling institutional frameworks and structures for better coordination and cooperation as well as clear communication between and within decision-making bodies in all levels of government and the private sector for effective implementation of the 2030 Agenda;

Further acknowledging that the challenges in designing mechanisms and strategies exist, and that it is necessary to ensure that the spirit of the 2030 Agenda trickles down and makes a real impact at the local level, integrating them into policies and governance frameworks;

Fully aware that digitalisation offers an opportunity to improve interaction, coordination and cooperation among stakeholders;

Noting with deep concern that the digital divide among the ASEAN Member States impact the flow of information across the region and affects the overall push towards social and economic integration;

Noting that the need to enhance capacity-building and support on timely data availability, data accessibility, and data quality is critical to effectively monitor progress in the achievement of the SDGs;

Mindful that sharing of knowledge and exchange of good practices among the AIPA Member Parliaments can be valuable opportunities for peer-to-peer partnerships and learning to accelerate localised SDG initiatives;

Bearing in mind the importance of creating an environment that facilitates new initiatives, innovation and partnerships with the private sector to align strategies with sustainable development objectives and funding the initiatives;

Realising that COVID-19 pandemic has critically affected people at every level, especially vulnerable groups, thus humanitarian efforts can plan a role in providing assistance to people affected by the COVID-19 pandemic in all areas.

Hereby resolves to:

Encourage the AIPA Member Parliaments, state assemblies, sub-national and local governments to raise awareness on the transformative potential of the 2030 Agenda and build a national consensus to harmonise the SDGs with their national development plans, thus creating ownership, commitment and accountability;

Consider setting up a mechanism to communicate with stakeholders from the public and private sectors, and to include their perspectives into the implementation of the 2030 Agenda;

Call upon parliamentarians to review strategies and gaps in national priorities and policies to enhance the role of local governments in implementing the 2030 Agenda in their local contexts;

Encourage the AIPA Member Parliaments to further engage in law-making, supervising and promoting the development and implementation of their respective National Action Plans for Sustainable Development Goals for the benefit of the people;

Remind the AIPA Member Parliaments to eliminate laws, regulations, policies and practices that discriminate or restrict the participation of women, the poor, vulnerable, marginalised, and minority groups in all levels of decision-making;

Call upon the AIPA Member Parliaments to further refine the IPU Self-Assessment Toolkit, digitalise and develop it with more in-depth local insights for the application at sub-national levels by parliamentarians to promote their role in the sub-national implementation of Sustainable Development Goals;

Further Encourage the AIPA Member Parliaments to participate in the Voluntary National Review process to ensure that implementation of the SDGs is on track;

Call on all parliamentarians to address the digital divide, promote trade, create jobs, and stimulate growth by looking for new and innovative solutions, including technologies, in their local communities and to pass the appropriate laws that will provide the appropriate infrastructure and support needed for all groups to have equal access to information and digital services;

Promote the use of technological advances to facilitate public access to services and general information to deliver efficient urban management, and to enable an innovative ecosystem for digital economy;

Encourage ASEAN Member States to improve the availability and quality of disaggregated data and to use that data for informed decision-making process to implement and monitor the SDGs as well as filling gaps;

Call upon parliamentarians to review policies that will develop innovative and coherent programmes for upskilling and reskilling that assure digital connectivity and participation for the poor and marginalised groups;

Promote multi-stakeholder and multi-lateral cooperation to advance and accelerate the achievement of the 2030 Agenda by taking advantage of digitalisation both in public and private sectors;

Further encourage parliamentarians to strengthen cooperation with the private sectors to foster sustainable development;

Urge ASEAN Member States, where possible, to provide humanitarian assistance to ensure the equitable access to the distribution of COVID-19 vaccinations, medicine and public health services to all as well as address the regional cooperation and engagement of communities to cope with COVID-19 pandemic that could contribute to achieving the SDGs;

Promote cooperation among the AIPA Member Parliaments to collectively address challenges to achieve the 2030 Agenda and to mitigate any negative impact and promote recovery from COVID-19 pandemic.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.

Q11



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

Doc.42GA/2021/Org Rep

REPORT OF THE ORGANIZATIONAL COMMITTEE

His Excellency Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, The President of 42nd AIPA and Speaker of the Legislative Council of Brunei Darussalam,

Your Excellencies, Honourable Delegates, Ladies and Gentlemen,

It is my great honour to submit the following Report of the Organizational Committee.

- 1. The Meeting was held virtually on 25th August 2021 at 10.00 AM GMT +8. It was presided over by Honourable Mr. Haji Abdul Hamid @ Sabli Haji Arshad, Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam as the Chairperson. The Vice-Chairperson from next country, Cambodia.
- 2. The following Parliamentarians from 9 AIPA Member Parliaments attended the meeting.

Brunei Darussalam

- a) Hon. Pehin Dato Haji Hasrin Haji Sabtu
- b) Hon. Pehin Dato Haji Judin Haji Asar
- c) Hon. Pehin Dato Haji Abdul Ghani Pehin Dato Haji Abdul Rahim
- d) Hon. Nik Hafimi Abdul Haadii
- e) Hon. Mr. Haji Abdul Hamid Haji Mumin
- f) Hon. Mr. Haji Ramli Haji Lahit

Cambodia

- a) Hon. Mr. Chhit Kim Yeat
- b) Hon. Mr. Hou Sry
- c) Hon. Dr. Ly Chheng
- d) Hon. Mr. Pich Chivorn
- e) Hon. Mr. Tak Vantha

Indonesia

- a) Hon. Dr. Mardani Ali Sera
- b) Hon. Dr. Andi Yuliani Paris

Lao PDR

- a) Hon. Mrs. Pingkham Lasasimma
- b) Hon. Mr. Thanta Kongphaly
- c) Hon. Dr. Bouthanh Bounvilay

Malaysia

- a) Hon. Mr. Datuk Hasanuddin Mohd Yunus
- b) Hon. Mr. Ahmad Hassan

Philippines

a) Hon. Ms. Sandra Y. Eriguel, M.D.

Singapore

- a) Hon. Ms. Tin Pei Ling
- b) Hon. Ms. Yeo Wan Ling
- c) Hon. Mr. Yip Hon Weng

Thailand

- a) Hon. Mr. Anusart Suwanmongkol
- b) Hon. Prof. Kanchanaratt Leevirojana
- c) Hon. Mr. Ekkachai Songamnartcharon
- d) Hon. Mr. Issara Sereewatthanawut

Viet Nam

- a) Hon. Mrs. Le Thu Ha
- b) Hon. Mr. Dihn Cong Sy
- c) Hon. Mrs. Dinh Thi Phuong Lan
- d) Hon. Mr. Pham Phu Binh
- 3. The Meeting of the Committee of Organizational Matters was held in the traditional ASEAN spirit of friendship, unity and cooperation. The following resolutions were discussed and adopted:
 - a) Resolution on Financial Report 2020-2021.
- 4. The resolution of the Financial Report of the AIPA Secretariat was adopted by the Organizational Committee. The Members of the Committee shared their views, comments and suggestions to the AIPA Secretariat in managing the Special Fund and in absorbing expenditures covered from Regular Fund as well as in ensuring that expenses comply with the procedures and rules of AIPA Secretariat including to secure savings. AIPA Secretariat is also requested to prepare the list of fixed assets.
 - b) Resolution on Granting Permission to Use Special Funds for the Payment of Cost-Sharing of the New Premises of AIPA Secretariat and for the Minor

Adjustment in the Salary of the Locally Recruited Staff of the AIPA Secretariat.

5. The Members of the Committee expressed their appreciation to AIPA that during the current global pandemic, AIPA is able to convene AIPA meetings and activities virtually. Hence, the Committee unanimously agreed to adopt the resolution. The Committee reiterated its suggestion to transfer the Special funds to regular funds for accounting purposes.

c) Resolution on Budget Estimation 2021-2022.

6. Recognizing the situation of economic uncertainty and the economic recovery in ASEAN Member States affected by the COVID-19 pandemic, the Committee emphasized the budget shall be used in a prudent and conservative manner. With that note in mind, the Committee agreed and approved the Resolution on Budget Estimation 2021-2022.

d) Resolution on Secretariat's Annual Report 2020-2021.

- 7. Following the brief explanation on the Secretariat's Annual Report by the Secretary-General of AIPA, the Committee agreed and approved the adoption of the resolution.
 - e) Resolution on Accrediting the Parliament of Ukraine as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), and
 - f) Resolution on Accrediting the Parliament of Pakistan as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
- 8. The committee welcomed the applications from the Parliament of Ukraine, the Parliament of Pakistan, and the Parliament of Georgia. During the deliberation, the Committee took note of the assessment of the new Observer Parliaments, which shall follow the procedure provided in the guidelines and the acceptance of new Observer(s) should bring an effective, active, and prosperous partnership to the AIPA and ASEAN. Further, the Committee acknowledged the need for AIPA to expand its networking, especially during the pandemic period. The deliberation resulted in a consensus to grant the Observer status to the Parliament of Ukraine and the Parliament of Pakistan. Meanwhile, the Committee decided to hold in abeyance the application of the Parliament of Georgia as an observer in AIPA.

g) Resolution on Amendment to the AIPA Statutes.

9. The Amendments to the AIPA Statutes were developed upon the discussion from the Working Group Meeting on 1) The Guiding Rules and Procedure for the Hosting of the AIPA General Assembly on 5 May 2021, and 2) Transformation of AIPA Secretariat on 8 June 2021. The Committee acknowledged that amending the AIPA Statutes is important to maintain administrative order and uniformity in the proceedings. Hence, the committee agreed to adopt the amendment to the AIPA Statutes as proposed in the resolution.

h) Resolution on Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly.

10. Following the adoption of the amendment to the AIPA Statutes, the members of the Committee of the Organizational Matters unanimously approved the Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly that aims to update, codify and organize the various provisions in the AIPA Statutes in the conduct of the AIPA General Assembly into more a systematic set of rules, and standard procedures to be implemented by the Host of the AIPA General Assembly.

i) Resolution on Guidelines and Procedures of the AIPA-ASEAN Hearing.

11. The Committee welcomed the initiative and has adopted the resolution on Guidelines and Procedures of the AIPA-ASEAN Hearing. The Committee further proposed a study to be conducted to explore and discuss the best way possible for exchange of ideas between the two institutions.

j) Resolution on Rules and Procedures of the Meeting of the Young Parliamentarians of AIPA.

12. The Committee appreciated the AIPA Secretariat for preparing the draft Rules and Procedures of the Meeting of the Young Parliamentarians of AIPA, and for facilitating the email communication in gathering inputs from AIPA Member Parliaments. Some concerns, however, were raised during the discussion. In principle the Resolution was adopted, however, as the Committee recognized the need to further review the Draft Rules and Procedures, the Committee requested AIPA Secretariat to form a Working Group to further deliberate the Rules and Procedures of the Meeting of the Young Parliamentarians of AIPA.

k) Resolution on Establishment of the AIPA-EP Dialogue.

- 13. The Committee welcomed and appreciated the initiative from the European Parliament to maintain communication and conduct a series of activities with AIPA through the establishment of AIPA-EP Dialogue. The Committee supported and approved the adoption of the resolution.
 - l) Resolution on AIPA Distinguished Service Award to H.E. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap (Cambodia), and
 - m) Resolution on AIPA Distinguished Service Award to Hon. Dr. Fadli Zon (Indonesia).
- 14. The Committee valued the outstanding contributions and services of H.E. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap and Hon. Dr. Fadli Zon towards pursuit of the goals and objectives of AIPA. Taking that into consideration, The Committee unanimously agreed to confer the AIPA Distinguished Service Award to H.E. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap and Hon. Dr. Fadli Zon as recognition of their meritorious services to AIPA.

n) Resolution on Appreciation of the President of AIPA.

15. The Committee congratulated and expressed appreciation for the service, commitment and contribution of His Excellency Pehin Dato Awang Haji Abdul Rahman Taib as the President of AIPA. The Committee unanimously agreed and approved the adoption of the resolution.

o) Resolution on Date and Venue of the 43rd AIPA GA

16. The Cambodian Delegation informed the Committee that the 43rd AIPA General Assembly will be convened in September 2022 in Phnom Penh, Cambodia. Cambodia wishes to welcome all Delegates of AIPA Member Parliaments in a physical meeting in the country, once the pandemic is over and the situation allows.

Thank you for your attention.

HON. MR HAJI ABDUL HAMID @ SABLI HAJI ARSHAD

He

CHAIRPERSON



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/01)

RESOLUTION ON

FINANCIAL REPORT OF THE AIPA SECRETARIAT FOR THE PERIOD OF 1 AUGUST 2020 TO 31 JULY 2021

The Forty-Second General Assembly:

Noting that AIPA adopts the new Financial Year to be from 1 August of each year to 31 July of the following year as resolved by Resolution RES.35GA/2014/ORG/03 at the 35th AIPA General Assembly held in Vientiane, Lao PDR;

Having considered the Audited Financial Reports of the AIPA Secretariat covering the period of 1 August 2020 to 31 July 2021 as contained in Doc. 42GA/2021/FinRep/01;

Noting the Balance Sheet of the AIPA Secretariat as of 31 July 2021.

Hereby resolves to:

Approve the aforesaid Financial Report covering the period of 1 August 2020 to 31 July 2021.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.

R6



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/02)

RESOLUTION ON

GRANTING PERMISSION TO USE SPECIAL FUNDS FOR THE PAYMENT OF COST-SHARING OF THE NEW PREMISES OF AIPA SECRETARIAT AND FOR THE MINOR ADJUSTMENT IN THE SALARY OF THE LOCALLY RECRUITED STAFF OF THE AIPA SECRETARIAT

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recalling the AIPA Resolution No. Res. 41/GA/2020/org/07 on the Relocation of AIPA Secretariat Premises, adopted at the 41st AIPA General Assembly in Viet Nam;

Appreciating the support provided by the ASEAN Secretariat and the Committee of Permanent Representatives to ASEAN in granting a rent-free work space for the Permanent Secretariat of AIPA;

Fully aware that the relocation of AIPA Secretariat premises from the Indonesian Parliament Compound to the Heritage Building of ASEAN Secretariat generates extra expenses to the present budget regarding the annual operational and maintenance costs;

Aware of the moral and ethical obligation of the AIPA Member Parliaments to ensure the welfare of the AIPA Secretariat staff and that salary incremental could be one of the solutions to address the issue of high employment turn-over rate of the AIPA Secretariat;

Acknowledging the request extended by the AIPA Secretariat during the Working Group Meeting on the Transformation of AIPA Secretariat to to pay the cost-sharing of the new premises of the AIPA Secretariat as well as to increase the salary of the locally recruited staff;

Realizing that due to budget constraint, increasing the annual contribution of AIPA member parliaments is inevitable to address the above-mentioned issue;

Taking into consideration the prolonged Covid-19 pandemic that led to the weakening of the economy of the ASEAN Member States which makes it difficult for most AIPA Member Parliaments to increase the annual contribution for this challenging time.

Hereby Resolves to:

Grant permission to AIPA Secretariat to utilize the Special Fund to pay the cost sharing of the new premises of AIPA Secretariat and slightly increase salary of locally recruited staff up to USD.28,000 and USD. 15,210 respectively, until the increment of the annual contribution is put into force in 2023.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/03)

RESOLUTION ON

(1) ESTIMATED BUDGET FOR THE AIPA SECRETARIAT FOR THE PERIOD OF 1 AUGUST 2021 TO 31 JULY 2022; (2) SPECIAL FUND FOR THE PERIOD OF 1 AUGUST 2021 TO 31 JULY 2022 AND

(3) ESTIMATED SUPPLEMENTARY BUDGET FROM 1 AUGUST 2022 TO 31 OCTOBER 2022

The Forty-Second General Assembly:

Bearing in mind that the Estimated Budget of AIPA for the Financial Year 1 August to 31 July of the following year and the Supplementary Budget for the months of August to October of the next Financial Year will be contained in a single audited report for the approval of General Assembly;

Further bearing in mind that Special Fund started operating in Financial Year 2017/2018 and is contained in a single audited report for the approval of General Assembly;

Having considered the details of the Estimated Expenditures and Explanatory Note for Financial Year 2021/2022 covering the period from 1 August 2021 to 31 July 2022, the Special Fund covering the period from 1 August 2021 to 31 July 2022 and the Supplementary Estimate from 1 August 2022 to 31 October 2022.

Hereby resolves to:

Approve the estimated expenditure as contained in Doc. 42GA/2021/Org/XX of US\$ 309,920.00 for the period of 1 August 2021 to 31 July 2022, US\$ 10,000.00 tuition fee funded from savings, US\$ 50,000.00 being the expenditure of AIPA Special Fund covering the period of 1 August 2021 to 31 July 2022 and Supplementary Estimates of US\$ 70,495.00 to cover the expenditure for three months from 1 August 2022 to 31 October 2022 respectively.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.

R8



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/04)

RESOLUTION ON THE SECRETARIAT'S ANNUAL REPORT FY 2020-2021

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Having considered the AIPA Secretariat's Annual Report FY 2020-2021 submitted by the Secretary General.

Hereby resolves to:

Approves the aforesaid Secretariat Annual Report FY 2020-2021.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/05)

RESOLUTION ON

ACCREDITING THE PARLIAMENT OF UKRAINE AS AN OBSERVER OF ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)

The Forty-Second General Assembly:

Referring to the letter from the Chairman of the Parliament of Ukraine dated 2 October 2020, containing an appeal for the Parliament of Ukraine to be considered as an observer member of AIPA;

Noting the interest of the Parliament of Ukraine to participate in the annual General Assembly of AIPA as an Observer:

Recalling Article 6 (5) of the Statutes of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) which stated that the General Assembly may invite special observers and guests to attend its annual meetings;

Recalling further Article 10(1) of the Statutes of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) which stated that the Executive Committee shall have the power and function to consider and recommend membership in AIPA and the participation of Special Observers, Observers and Guests, and that the Executive Committee has considered the Parliament of Ukraine's desires to participate as an observer in the annual meeting of AIPA;

Appreciating the positive response and the unanimous decision of the AIPA Member Parliaments to accept the Parliament of Ukraine to be an Observer at the annual meeting of AIPA.

Hereby resolves to:

Accredit the Parliament of Ukraine as an Observer in the ongoing and future AIPA General Assemblies.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/06)

RESOLUTION ON

ACCREDITING THE NATIONAL ASSEMBLY OF ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN AS AN OBSERVER OF ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)

The Forty-Second General Assembly:

Referring to the letter from the Speaker of the National Assembly of Islamic Republic of Pakistan dated 22 June 2021, containing an appeal for the National Assembly of Islamic Republic of Pakistan to be considered as an observer member of AIPA;

Noting the interest of the National Assembly of Islamic Republic of Pakistan to participate in the annual General Assembly of AIPA as an Observer;

Recalling Article 6 (5) of the Statutes of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) which stated that the General Assembly may invite special observers and guests to attend its annual meetings;

Recalling further Article 10(1) of the Statutes of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) which stated that the Executive Committee shall have the power and function to consider and recommend membership in AIPA and the participation of Special Observers, Observers and Guests, and that the Executive Committee has considered the National Assembly of Islamic Republic of Pakistan's desires to participate as an observer in the annual meeting of AIPA;

Appreciating the positive response and the unanimous decision of the AIPA Member Parliaments to accept the National Assembly of Islamic Republic of Pakistan to be an Observer at the annual meeting of AIPA.

Hereby resolves to:

Accredit the National Assembly of Islamic Republic of Pakistan as an Observer in the ongoing and future AIPA General Assemblies.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/07)

RESOLUTION ON THE AMENDMENT OF AIPA STATUTES

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recalling the Resolution on the Guidelines of AIPA Engagement with Guests and Observers adopted at the 40 General Assembly on the 29 August 2019 in Bangkok, Kingdom of Thailand which contained some changes to the provisions of the AIPA Statutes;

Realizing that there was no separate resolution on the Amendments to the AIPA Statutes adopted during the 40 AIPA General Assembly, despite the implied changes to its provisions by the adoption of the Resolution on Guidelines of AIPA Engagement with Guests and Observers:

Realizing further that the Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly shall only be implemented if the amendments to the AIPA Statutes are adopted by the General Assembly;

Acknowledging that amending the AIPA Statutes is important in the interest of maintaining administrative order and uniformity in the proceedings;

Aware of the changes brought about to the AIPA Statutes as the consequences of the submission of the Draft Resolution on Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly at the Organizational Committee of the 42nd AIPA General Assembly;

Realizing that the Guiding Rules and Procedures for the Hosting of AIPA General Assembly shall only be implemented with the condition that the Amendment of AIPA Statute has been adopted.

Hereby Resolves to:

Approve and adopt the amendment of the following provisions of the AIPA Statutes conducive to adopt the Draft Resolution on the Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly:

Art.9 (3) The venue of the General Assembly shall be rotated among the Member Parliaments in alphabetical order, unless otherwise decided by the General Assembly. In the event that a Member Parliament is unable to host the General Assembly, the Executive Committee shall decide on the venue.

In cases when the attendance of member parliamentarians becomes extremely difficult or impossible such as on occasions of natural calamities, pandemics, strikes, riots, and civil disturbances, whether fortuitous or not, the Executive Committee may authorize the Host Parliament to conduct the General Assembly and other related meetings through electronic platforms like video conference, telecommunications and other reliable online technologies.

Art. 9 (7.a) Decisions by the General Assembly on any subject shall be made by consensus. When consensus cannot be achieved, the General Assembly may decide on how a specific decision can be made.

Art. 11 (5) Decisions by the Executive Committee on any subject shall be made by consensus. When consensus cannot be achieved, the Executive Committee may decide on how a specific decision can be made.

Art. 14 (1-3)

- 1. The Secretariat is the administrative body of AIPA and the hub for information, knowledge, communication and stakeholder's engagement of AIPA.
- 2. It shall perform at least the following functions:
 - a. Provide service support to the AIPA and its Member Parliaments;
 - b. Take initiative to explore and conceptualize possible joint programs and projects with external stakeholders to achieve common goals with AIPA, and submit to AIPA General Assembly the approval for its implementation; and
 - c. Establish and maintain efficient and effective administrative support system for AIPA.
- 3. The AIPA Secretariat shall be at the city where the ASEAN Secretariat is located, unless the General Assembly decides otherwise.

Approve the draft resolution on the Amendment of the AIPA Statutes.

The amendment shall come into force on 25 August 2021.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/08)

RESOLUTION ON

GUIDING RULES AND PROCEDURES FOR THE HOSTING OF THE AIPA GENERAL ASSEMBLY

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Considering that the AIPA General Assembly as the policy-making body of AIPA is mandated to meet at least once a year, unless otherwise decided by the Executive Committee, as provided for in paragraph (2) Article 9 of AIPA Statutes;

Recognizing that the various rules and procedures governing the conduct of the AIPA General Assembly may be found in the different articles and provisions of AIPA Statutes;

Observing that AIPA Member Parliaments have used different sets of rules and procedures in hosting the AIPA General Assembly which have caused confusion, discomfort, disharmony or even misunderstanding among guests and observers;

Bearing in mind that such issues need to be addressed, this proposed Resolution aims to update, codify and organize the various provisions in the AIPA Statutes relating to the rules and procedures for the hosting of the General Assembly into a systematic and uniform set of rules, and standard procedures to be implemented by the Host of the AIPA General Assembly;

Having adopted the Resolution on the Amendment of AIPA Statutes to accredit the initiation of the Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly.

Hereby Resolves to:

Adopt and approve the Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly, as attached. The Guiding Rules and Procedures shall come into force as soon as the current General Assembly is concluded.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/09)

RESOLUTION ON

GUIDELINES AND PROCEDURES OF AIPA-ASEAN HEARING

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recalling the Resolution on the *Institutionalization of AIPA-ASEAN Dialogue* adopted at the 40th AIPA General Assembly on 29 August 2019, in Bangkok, Kingdom of Thailand which agreed to institutionalize a meaningful dialogue mechanism between AIPA and ASEAN to discuss the plan and status of implementation of the ASEAN Integration Plan and other matters in every AIPA General Assembly/or suitable platform;

Noting AIPA Member Parliaments directed the AIPA Secretariat to establish guidelines and procedures for regular AIPA-ASEAN dialogue at the AIPA General Assembly or suitable platform;

Considering the inputs and recommendations in developing the guidelines and procedures of the AIPA-ASEAN dialogue from all AIPA Member Parliaments and the ASEAN Secretariat.

Hereby resolves to:

Call upon the AIPA Member Parliaments to approve and adopt the proposed Guidelines and Procedures of AIPA-ASEAN Hearing.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/10)

RESOLUTION ON

THE ADOPTION OF THE RULES OF PROCEDURE OF THE MEETING OF YOUNG PARLIAMENTARIANS OF AIPA

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Noting the AIPA Resolution number Res 41GA/2020/Org/06 on the Engagement of Young Parliamentarians of AIPA in the ASEAN Community Building, adopted at the 41st AIPA General Assembly which welcomed the initiative to establish the Meeting of Young Parliamentarians of AIPA to be held in AIPA General Assemblies, as well as supported the creation of Ad-Hoc Committee to draft the Rules of Procedure for the Meeting of Young Parliamentarians of AIPA to be considered and adopted in the next AIPA General Assembly;

Noting with regret that the suggested Ad-Hoc Committee was unable to be formed and meet in an actual meeting due to the heavy meeting schedule of the AIPA;

Recognizing the Draft Rules of Procedure of the Meeting of Young Parliamentarians of AIPA prepared by the AIPA Secretariat which later was deliberated by the AIPA Member Parliaments through email communication;

Taking into account the inputs and recommendations from the AIPA Member Parliaments to the Draft Rules of Procedure gathered through the above-said email communication mechanism.

Hereby Resolves to:

Establish an Ad Hoc working group to discuss the matter concern in the Rules of Procedure of the Meeting of Young Parliamentarians of AIPA;

Approve the resolution on the Rules of Procedure of the Meeting of Young Parliamentarians of AIPA. as attached.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/11)

RESOLUTION ON

THE ESTABLISHMENT OF THE ANNUAL AIPA-EUROPEAN PARLIAMENT INTER-REGIONAL PARLIAMENTARY DIALOGUE

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Acknowledging the European Parliament as one of the first parliaments to establish formal relations with AIPA as an Observer;

Appreciating the proposal of the European Parliament's Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and ASEAN (DASE) during the Thirty-Ninth and Forty First AIPA General Assembly to hold one additional annual inter-regional meeting that would allow for a more structured dialogue between the European Parliament and AIPA;

Recognizing the successful Inaugural AIPA-European Parliamentary Dialogue virtually held on 22 June 2021, where the two most common and relevant issues for both regions were constructively discussed: The Future of EU-ASEAN Trade Relations, and Mitigating the Negative Effects of the COVID-19 Pandemic;

Considering that the parliamentary bond is the key to a productive larger and bilateral relationship and an opportunity to strengthen the parliamentary extension of EU-ASEAN relations;

Bearing in mind the view of each AIPA Member Parliament that it is important to have a uniform in the proceeding for the establishment of an annual dialogue with European Parliament with the dialogue with Observer delegations regularly convened during the AIPA General Assembly.

Hereby Resolves to:

Support the establishment of the annual AIPA-European Parliament Dialogue as a formal platform for the two parliamentary groups to intensively and constructively discuss common and relevant issues, while maintaining the annual dialogue that is regularly convened during the AIPA General Assembly;

Request the AIPA Secretariat to communicate with European Parliament and prepare the Terms of Reference of the Annual AIPA-European Parliament Inter-Regional Parliamentary Dialogue.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/12)

RESOLUTION ON

AIPA DISTINGUISHED SERVICE AWARD TO H.E. POST. DR. KITTISETHABINDIT CHEAM YEAP

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recognizing the valuable service, outstanding contribution and tireless efforts of H.E. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap, Chairman of the Commission on Economy, Finance, Banking, and Audit & Chairman of Cambodian Parliament AIPA National Group, towards the pursuit of the goals and objectives of AIPA;

Considering the nomination of H.E. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap, Chairman of the Commission on Economy, Finance, Banking, and Audit & Chairman of Cambodian Parliament AIPA National Group, with the unanimous support of all Delegations.

Hereby resolves to:

Agree that this General Assembly confers AIPA Distinguished Service Award to H.E. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap as recognition of his meritorious services to AIPA.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/13)

RESOLUTION ON

AIPA DISTINGUISHED SERVICE AWARD TO HONORABLE DR. FADLI ZON

The Forty-Second AIPA General Assembly:

Recognizing the valuable service, outstanding contribution and tireless efforts of Hon. Dr. Fadli Zon, Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of the House of Representatives of Indonesia, towards the pursuit of the goals and objectives of AIPA;

Considering the nomination of Hon. Dr. Fadli Zon, Chairperson of the Committee for Inter-Parliamentary Cooperation of the House of Representatives of Indonesia, with the unanimous support of all Delegations.

Hereby resolves to:

Agree that this General Assembly confers AIPA Distinguished Service Award to Hon. Dr. Fadli Zon as recognition of his meritorious services to AIPA.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42^{nd} General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/14)

RESOLUTION ON

APPRECIATING THE SERVICE OF HIS EXCELLENCY PEHIN DATO AWANG HAJI ABDUL RAHMAN TAIB AS PRESIDENT OF AIPA

The Forty-Second General Assembly:

Acknowledging that the term of office of His Excellency Pehin Dato Awang Haji Abdul Rahman Taib as the President of AIPA ends at the conclusion of the 42nd AIPA General Assembly;

Recognizing His Excellency Pehin Dato Awang Haji Abdul Rahman Taib's valuable contribution to the success of the 42nd AIPA General Assembly during his term of office;

Sincerely expressing its deepest appreciation and gratitude for his leadership of the organization and welcoming his continued participation and contribution in the development and growth of AIPA.

Hereby resolves to:

Adopt this resolution on appreciating the Services of His Excellency Pehin Dato Awang Haji Abdul Rahman Taib.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Res 42GA/2021/Org/15)

RESOLUTION ON DATE AND VENUE OF THE 43RD GENERAL ASSEMBLY

The Forty-Second General Assembly:

Referring stipulation of Chapter IV, Article 9 Paragraph 3 of the AIPA Statutes that the venue of the General Assembly shall be on rotational basis in alphabetical order among the Member Parliaments;

Hereby resolves, that the 43rd General Assembly shall be held in Phnom Penh in September 2022 in Cambodia.

Adopted on the Twenty Fifth Day of August Two Thousand Twenty One in Brunei Darussalam at the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly held virtually.



Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025

(Doc 42GA/2021/JC)

JOINT COMMUNIQUE OF THE FORTY-SECOND (42ND) GENERAL ASSEMBLY OF THE ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)

I. INTRODUCTION

- 1. The 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) with the theme "Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025" was held virtually from 23 to 25 August 2021, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
- 2. His Excellency Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, President of 42nd AIPA and Speaker of the Legislative Council of Brunei Darussalam presided over the 42nd General Assembly of AIPA.

II. DELEGATIONS

- 3. Delegates from the AIPA Member Parliaments, Observer Parliaments, the AIPA and ASEAN Secretariats, Guests of the Host, and AIPA Partners participated virtually in the 42nd General Assembly.
- 4. For the AIPA Member delegations, **Brunei Darussalam** was led by Hon. Pehin Orang Kaya Pendikar Alam Dato Paduka Seri Awang Haji Hasrin Bin Dato Paduka Awang Haji Sabtu, Member of Legislative Council; **Cambodia** was led by Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, President of the National Assembly; **Indonesia** was led by H.E. Dr. (H.C.) Puan Maharani, Speaker of the House of Representatives; **Lao People's Democratic Republic** was led by H.E. Xaysomphone Phomvihane, President of the National Assembly; **Malaysia** was led by H.E. Datuk Azhar Azizan Harun, Speaker of the House of Representatives; **Philippines** was led by H.E. Mr. Lord Allan Jay Q. Velasco, Speaker of the House of Representatives; **Singapore** was led by H.E. Mr. Tan Chuan-Jin, Speaker of Parliament; **Thailand** was led by H.E. Mr. Chuan Leekpai, President of the National Assembly and **Vietnam** was led by H.E. Vuong Dinh Hue, President of the National Assembly.
- 5. For the Observer delegations, **Australia** was led by Senator Hon. David Fawcett; **Belarus** was led by H.E. Mr. Vladimir Andreichenko; **Canada** was led by Senator Hon. Paul Massicotte; **People's Republic of China** was led by Hon. Ms. Duo Liu; **European Parliaments** was led by Hon. Mr. Daniel Caspary; **India** was led by Hon. Dr. Satya Pal

Singh; **Republic of Korea** was led by Hon. Mr. Kim Gi-hyeon; **Morocco** was led by H.E. Habib El Malki; **Norway** was led by Hon. Mrs. Elin Rooum Agoestein; and the **Russian Federation** was led by H.E. Konstantin Kosachev.

- 6. The delegation from **AIPA Secretariat** was led by Hon. Nguyen Tuong Van, Secretary-General of AIPA.
- 7. The delegation from **ASEAN Secretariat** was led by H.E. Dato Lim Jock Hoi, Secretary-General of ASEAN.
- 8. For the delegation of Guests of the Host, **The Representative of the Republic of the Union of Myanmar** was led by Hon. Attorney General Dr. Thida Oo; **Inter-Parliamentary Union** was led by Hon. Mr. Martin Chungong; **Asia-Pacific Parliamentary Forum** was led by H.E. Tony Smith;
- 9. For the delegation of AIPA Partners, the **Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)** was led by Prof. Hidetoshi Nishimura; **Freeland** was led by Mr. Steven Galster; **Parliamentary Centre Asia (PCAsia)** was led by Mr. Dararith Kim-Yeat.

III. OPENING CEREMONY

10. The Opening Ceremony of the 42nd General Assembly of AIPA was held on Monday, 23 August 2021, at 10.00 am GMT +8. His Excellency Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, President of 42nd AIPA and Speaker of the Legislative Council of Brunei Darussalam, delivered his welcoming address followed by the Royal Speech of His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam.

Welcoming Address

- 11. In his welcoming address, His Excellency Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, President of 42nd AIPA and Speaker of the Legislative Council of Brunei Darussalam, warmly welcomed all delegates of AIPA Member Parliaments, Observers, Guests, and Partners. Despite the COVID-19 pandemic, by taking advantage of technology, he was pleased to see the prevailing spirit of friendship and cooperation allowed the 42nd AIPA General Assembly to convene virtually.
- 12. Referring to the theme of the 42nd AIPA General Assembly: "Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion towards ASEAN Community 2025", he stated that ensuring inclusive digital transformation shall be put a priority in order to build resilience and better prepare the current and future generations for a post-pandemic era. He explained that the theme was chosen not only to embrace, promote and enable digital inclusion as a means to further strengthen parliamentary cooperation amidst the pandemic, but also to highlight the important role of parliamentarians in supporting ASEAN Vision 2025 for a community that is "politically cohesive, economically integrated and socially responsible".

13. He also highlighted noteworthy issues such as women empowerment, climate change, cyber security and strengthening economic integration were included in the agenda of this year's AIPA General Assembly. Thus, it is important for AIPA Parliamentarians to power through this current climate united in resolve and purpose to ensure alignment in the collective intention.

Royal Speech

- 14. His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, delivered Royal Speech at the opening ceremony of the 42nd AIPA General Assembly. His Majesty warmly welcomed all Delegates to the virtual 42nd AIPA General Assembly. Referring to the theme of Brunei Darussalam's ASEAN Chairmanship 2021: "We Care, We Prepare, We Prosper", His Majesty noted the continuing efforts of ASEAN to respond rapidly in providing care for its peoples amidst the uncertainty.
- 15. His Majesty acknowledged the theme of 42nd AIPA General Assembly which reassert the commitment of AIPA Member Parliaments in building ASEAN as a leading digital community and economy bloc through harmonizing regulations, standardizing policies and legislations across ASEAN. His Majesty highlighted the persistence of parliamentarians in making AIPA the key organization and platform that enhances multilateral cooperation in order to realize the collective desire of ASEAN which is to see its present and future generations continue to enjoy sustainable peace, security, prosperity, and economic growth.
- 16. His Majesty was confident that the discussions during the 42nd AIPA General Assembly will generate new ways on how AIPA and ASEAN can work together to effectively respond to regional and global challenges. His Majesty also called upon ASEAN parliamentarians to continue cooperation with fellow parliamentarians of AIPA Observers. His Majesty concluded His Royal Speech by wishing the 42nd AIPA General Assembly and its delegates much success in their deliberations.

IV. VICE-PRESIDENTS OF 42ND GENERAL ASSEMBLY

17. Pursuant to Article 10 of the Statutes of AIPA, the General Assembly elected the Leaders of Delegations of the AIPA Member Parliaments as Vice-Presidents of the 42nd General Assembly of AIPA.

V. STATEMENTS BY HEADS OF DELEGATIONS OF AIPA MEMBER PARLIAMENTS

The Heads of Delegations of the AIPA Member Parliaments delivered their respective statements at the First Plenary session of the 41st General Assembly.

Cambodia

18. Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, President of the National Assembly of Cambodia opened his remarks by congratulating the Legislative Council of Brunei for the wonderful arrangement of the virtual 42nd AIPA General Assembly. In his statement,

he expressed his strong support to the chosen theme of Promoting Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion towards ASEAN Community 2025, as it reflects the need to achieve a more inclusive ASEAN Community with leading digital connectivity ensuring high security and sustainability. He highlighted the concrete plans introduced by ASEAN to achieve the ASEAN Vision 2025, including the ASEAN Digital Master Plan 2025, which is an important driving force in promoting resilient economic growth, pushing economic diversification and enhancing productivity and competitiveness. He stated that it is important to ensure that digitalization is inclusive and that multilateral cooperation on digital governance and rules is strengthened.

- 19. He emphasized that our world is now growing more complex, highly competitive, and facing drastic changes in balances of economic power and competition in trade. These require all of us to be more internationally united and to embrace multilateralism, an important policy choice for resolving problems based on the principles of international law.
- 20. Samdech Heng Samrin shared that the Royal Government of Cambodia recently launched the "Digital Economic and Social Policy Framework 2021-2035" to build a vibrant digital economy and society aimed at promoting digital adoption and transformation. This policy will play a critical role in economic recovery plans after the Covid-19 crisis through the development of digital infrastructure and the promotion of trust and confidence in digital systems, digital citizens, digital government and digital business. He emphasized, however, that numerous issues overshadow the process of digital transformation such as digital development gaps, digital illiteracy and cybersecurity which are critical challenges for developing countries whose resources and capabilities are constrained. Therefore, ASEAN countries need to invest and allocate more resources to promote digital literacy and people's capacity.
- 21. In this regard, he called for parliamentary cooperation to build inclusive and safe digital infrastructure by sharing cybersecurity information and regulations, and by promoting public-private cooperation, digital capacity building and cybersecurity awareness as well as strengthening cybersecurity management. At the same time, he underscored peace as an important foundation for development as the world is facing instability and growing multiple threats to peace that have not been seen in decades. Hence, peace and development must go hand in hand. He closed his statement by stressing the importance of maintaining peace and striving to promote sustainable development so people can live in prosperity and progress.

Indonesia

- 22. The Head of the Indonesian Delegation, Speaker of the Indonesian House of Representatives, YM. Puan Maharani, expressed her appreciation to AIPA for its resilience in maintaining its role amidst the pandemic. There are various cooperation that ASEAN member countries can do to curb the pandemic, among others, cooperation in exchanging information to overcome the spread of the virus, and cooperation in providing vaccines, medical equipment and medicines, including research.
- 23. In regard to this year's theme, she conveyed that it reflects the Parliament's desire to cooperate in helping to improve digital connectivity among ASEAN member countries. In

- the present day, the COVID-19 pandemic has contributed to the acceleration of the use of digital technology which has brought disruption in many areas.
- 24. In this regard, she stressed that the ASEAN member countries should continue to increase cooperation and exchange information in order to take greater benefits from digital technology. *First*, cooperation in increasing the availability of affordable internet access for the community. This is also related to the efforts to increase internet access, especially in remote and rural areas. *Second*, cooperation to improve human resources related to literacy and skills, not only to take advantage of the digital technology itself, but also to prevent hoaxes and disinformation. *Third*, cooperation in formulating policies that support digital connectivity and also to ensure the security of digital activities, such as cybersecurity, personal data protection, and consumer protection. *Fourth*, cooperation to improve innovation, education, and research in digital technology. In line with efforts to utilize digital technology for economic growth, it is necessary to always pay attention to digital inclusion through the expansion of internet access for all.
- 25. Furthermore, in an effort to effectively deal with the COVID-19 pandemic, ASEAN must continue to maintain its political stability and security, as well as support the development of democracy, the rule of law and respect for human rights. The political crisis in Myanmar has caused its own challenges for ASEAN. Therefore, a peaceful resolution to the political crisis in Myanmar must be started immediately through an inclusive dialogue process. For this reason, the Five-Point Consensus jointly developed by the ASEAN Leaders Summit must be immediately followed up, and the ASEAN Special Envoy must be given access to meet various parties in Myanmar.

Lao's People Democratic Republic

- 26. H.E. Dr. Xaysomphone Phomvihane, President of the National Assembly of Lao PDR congratulated the President of AIPA for the excellent arrangement of the 42nd AIPA General Assembly. He also expressed his appreciation and support for the theme of the 42nd AIPA General Assembly: "Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion towards ASEAN Community 2025".
- 27. As the world is facing a number of challenges such as the COVID-19 pandemic and natural disasters which have posed serious impact to public health, socio-economic development, regional and global stability and security, Lao PDR in this regard highly appreciated the timely measures that have been undertaken by ASEAN member countries.
- 28. He emphasized that Lao PDR acknowledges the importance of digital inclusion to economic growth and social development. In this regard, He shared that Lao PDR has developed a National Strategy on Science and Technology Development (2013-2020) and Vision 2030, and integrated them into the 9th Five-Year National Socio-Economic Development Plan (2021-2025). Lao PDR is also currently drafting a Digital Economic Development Strategy for 2021-2025 that aims to improve the national economy, which hopefully will facilitate the transition of Lao PDR from Least Developed Country to become a Developed Country while promoting industrial modernization.

- 29. To make sure the digital inclusion is achieved, H.E. Dr. Xaysomphone Phomvihane shared that Lao PDR integrated ICT into tertiary education curricula, and ensured that access to technology is also available to people living in remote areas, including the most disadvantaged groups, so as to improve people's livelihoods and narrow the development gap between urban and rural areas. Such measures were taken also to support the MSMEs and Start-Ups, so they can engage in online platforms and create an enabling environment for businesses to get access to domestic, regional and global markets in an equitable manner.
- 30. As an effort to realize a resilient and innovative ASEAN Community, H.E. Dr. Xaysomphone Phomvihane called on AIPA Member Parliaments to strengthen cooperation in Science and Technology, as well as research and development, and enhance the coordination, to ensure an equitable access to digital technologies and promote public-and-private participation with their respective national policies and legislation.

Malaysia

- 31. His Excellency Datuk Azhar Azizan Harun, Speaker of the House of Representatives in the Parliament of Malaysia started his address to the 42nd ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) General Assembly by expressing his support for this year's AIPA General Assembly's theme. His address illustrated the impact of second waves of the pandemic COVID-19 to the legislative branch. Following that, many parliaments have had to resort to electronic means of business as a temporary stop-gap solution, including the consideration of a hybrid or virtual parliamentary sitting. In addition, Parliaments have started reforming previously rigid and embedded attitudes towards novel ways of working.
- 32. Further to that, he also highlighted the importance of transparency and the accuracy of information. For instance, while accurate data and information related to pandemics are fundamental for an effective response to the crisis, social media, however, presents a challenge whereby the platforms have been misused by some to spread dangerous misinformation.
- 33. The address was concluded with a call to action for the region to strive for greater regional representation through better interstate cooperation and committed participation to realize the ASEAN vision.

Philippines

- 34. In the statement of Speaker Lord Allan Jay Velasco, he highlighted that the pressing call to leverage the digital economy has become more compelling as the region grapples with the nature of the "new normal". As a result, digitalization has led the region to adopt a nimble and adaptive response to disruptive conditions. Digital platforms have enabled the ASEAN people to stay connected and engaged, and for some businesses to operate amid the lockdown.
- 35. Further he mentioned in his statement the fact that digital transformation is now a major strategic focus for ASEAN to drive economic recovery and build back better. But what many may not realize is the extent to which COVID-19 has accelerated this shift that was

already underway. Unfortunately, not all countries are able to leverage digital technologies to their full potential. There are gaps between countries in the region in basic access to the internet, along with speed and cost. In this regard, he emphasized that digital inclusion is crucial for digital platforms to reach all member states and all levels of society. The key, he said, is to invest in digital infrastructure and connectivity to broaden physical access to mobile and internet networks. This will also enhance access to education, markets, and other economic opportunities.

36. Given the scale of the pandemic, ASEAN and AIPA also saw the need to change the way they conduct business from traditional interface platforms to online interactions. These institutions have utilized digital diplomacy, with all of its meetings across all sectors, including those with Dialogue Partners. Going forward, he stated that there are good reasons for ASEAN and AIPA to use digital platforms beyond COVID-19, especially for technical discussions and emergency response.

Singapore

- 37. H.E. Mr. Tan Chuan-Jin, Speaker of the Parliament of the Republic of Singapore opened his speech by noting that the COVID-19 pandemic has been the defining crisis of our generation. He was heartened that the strength and resilience of ASEAN has shone through, with ASEAN Member states rising to the occasion to support one another. In this vein, he highlighted the adoption of the Hanoi Plan of Action on Strengthening ASEAN Economic Cooperation and Supply Chain Connectivity in Response to the COVID-19 Pandemic in April 2020, as well as the creation of the COVID-19 ASEAN Response Fund and the ASEAN Comprehensive Recovery Framework and its Implementation Plan that were launched later that year.
- 38. Mr. Tan noted that the governments of AIPA members are working hard to mitigate the pandemic's effects on public health and livelihoods. In this regard, he was heartened that AIPA members have redoubled their joint efforts under Brunei's ASEAN Chairmanship theme of "We Care, We Prepare, and We Prosper", with an eye towards positioning ASEAN for a COVID-19 endemic world.
- 39. Mr. Tan pointed out that the pandemic has also accelerated the digitalization of society, which is rapidly transforming the way we all live, work and play. In this vein, he expressed that this year's ASEAN Inter-Parliamentary Assembly theme of "Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025" was especially pertinent, and urged AIPA members to continue to support and advocate for inclusive policies that help ensure that technology remains accessible for everyone.
- 40. Concluding his statement, Mr. Tan reiterated the importance of ASEAN's cohesiveness and unity that has helped ASEAN Member States weather the many setbacks and challenges through the years. In this regard, he urged ASEAN Member States to continue using platforms such as AIPA to communicate the importance of supporting a more integrated, digital, and forward-looking ASEAN Community.

Thailand

- 41. H.E. Mr. Chuan Leekpai, President of the National Assembly of Thailand, expressed his view on the COVID-19 situation that in order to live in a new normal reality, people have to adjust their daily routines, for example, utilizing digital technology; teleconferencing, and working from home. Nonetheless, he pointed out that not all citizens of ASEAN have opportunity to have digital access and showed his support to the theme of the 42nd AIPA General Assembly, "Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion towards ASEAN Community 2025", which will bring about legislative resolutions to bridge a digital gap through good regulations, harmonization of laws, and constructive dialogue between AIPA and ASEAN.
- 42. H.E. Mr. Chuan Leekpai also supported the implementation of ASEAN Digital Master Plan 2025 and showed his strong belief that AIPA has to enhance its role as a center of alignment through which strategies, policies, plans and roadmaps can be coordinated to support ASEAN. Consequently, he suggested that any legislation must address both short-term needs and long-term objectives as well as encouraged Members of Parliaments to consider at least three crucial issues before passing any regulation: "First, is what we're asking necessary and effective? Second, are the compromises worth the benefits? Third, whether our measures have limits, so they will neither last forever nor expand beyond our intentions?"
- 43. The President of the National Assembly of Thailand also touched upon a concept of parliamentary diplomacy which is a significant instrument to achieve any reconciliation.
- 44. In conclusion, H.E. Mr. Chuan Leekpai was confident that AIPA Member Countries shall overcome any challenging issues that occurred during Committee Meetings through exchange of perspectives and considerations.

Viet Nam

- 45. H.E. Vuong Dinh Hue, Head of Vietnamese Delegation, President of the National Assembly of Viet Nam, highlighted the significant impact to the economic growth and exacerbated social inequality, including digital inequality and social welfare tremendous challenges, posed by the COVID-19 pandemic. The pandemic has emphasized the urgency of state governance, adjustments of policies and development goals as well as digitalization and the development of the digital economy, to respond to the pandemic in a timely manner and sustain socio-economic development.
- 46. The complex and unpredictable shift in this pandemic time have also occurred in the regional and international geo-political landscape, for which H.E. Vuong Dinh Hue was pleased to note that the ASEAN Community continues to maintain solidarity, unity and self-reliance, and uphold its stern resolve and centrality. Further, the pandemic has also proven that in the face of tempestuous challenges, the close bonds and mutual sharing among ASEAN members and the peoples are further bolstered. He mentioned concrete evidence that ASEAN members have worked closely together to strengthen responsiveness of each country to gradually contain the pandemic such as the ASEAN COVID-19 Response Fund, the Regional Reserve of Medical Supplies, the Standard Operating

- Procedures for public health emergencies, and particularly the ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance initiative.
- 47. H.E. Vuong Dinh Hue pointed out the need to further build on the vital role of AIPA Member Parliaments in accelerating digitalization and called on AIPA Member Parliaments to remove barriers through appropriate legal framework, improve the quality of online public services for the development of e-Government, to facilitate equitable access to digital services for society and business, to increase digital literacy for vulnerable groups, to offer fair, equitable and affordable digital services, and to promote the development of the digital economy and society. He also called AIPA Member Parliaments to encourage the Governments of ASEAN members to carry out concrete programs, action plans and strategies pertaining to digital development, particularly strengthening digital connectivity, narrowing the digital gap among countries and regions, boosting digital literacy in less-developed areas including sub-regions to ensure equitable and sustainable development in ASEAN.
- 48. Further, he emphasized the need to mobilize social resources to develop a digital ecosystem via public private partnership and create incubators to develop digital corporations and start-ups; improve policies, legal frameworks and support initiatives in the cooperation within ASEAN and between ASEAN and its partners on cyber security, information privacy, data protection and confidence building in the digital sphere also shall be put as priority. Lastly, he called on further cooperation and experience sharing, especially the application of science and technology to control Covid-19 effectively. He suggested strengthening cooperation in research and development, equitable distribution of vaccines, medicine and equipment for preventing and fighting Covid-19. He encouraged parliamentary action to give more power to the Governments to actively, flexibly and effectively respond to the pandemic, minimize the socio-economic impacts and enable quick socio-economic recovery in the post pandemic context.
- 49. He also appreciated endeavors of ASEAN and active support of AIPA Member Parliaments in promoting dialogue, cooperation and confidence building, upholding respect for international law, preventing and reducing risks to stability, which contribute to enduring peace, security, stability and fostering recovery and development in the region, including the South China Sea, in compliance with international law and the 1982 UNCLOS, refraining from activities that further complicate the situation, observing the DOC and soon concluding the Code of Conduct for South China Sea (COC). He informed that Viet Nam has successfully held the elections for the 15th National Assembly, and the People's Councils at all levels for the 2021-2026 tenure in May 2021, amidst the pandemic. In July, Viet Nam has also successfully convened the first session of the 15th National Assembly to elect the key leaderships of the State, National Assembly and Government, and outlined the national development goals in the coming time.

Brunei Darussalam

50. On behalf of the Speaker of the Legislative Council of Brunei Darussalam, the Head of Delegation of Brunei Darussalam, Hon. Pehin Orang Kaya Pendikar Alam Dato Paduka Seri Awang Haji Hasrin Bin Dato Paduka Awang Haji Sabtu welcomed all Delegates to the virtual 42nd AIPA General Assembly.

- 51. The theme of the 42nd AIPA General Assembly: "Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion Towards ASEAN Community 2025", reflects the importance of digital inclusion to fill connectivity gaps in internet access and affordability. Hon. Pehin highlighted the instrumental role of AIPA in not only realizing digital inclusion in ASEAN, but also ensuring the cybersecurity in the region, by aligning regulations and standardizing policies across ASEAN with appropriate laws that are coherent with the ASEAN Community Blueprint 2025.
- 52. Hon. Pehin also mentioned in his statement, the role of MSMEs in accelerating ASEAN economic growth. Hon. Pehin called on the AIPA Member Parliaments for collaboration, as well as to encourage ASEAN Member States to prioritize connectivity, regional integration and narrowing development gaps among ASEAN member countries in a coordinated approach to achieve the goals of the fourth industrial revolution, and closer sectoral integration.
- 53. Hon. Pehin also highlighted the gravity of enabling technology to promote women empowerment, which will be discussed at the Meeting of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA). This is in line with the theme of ASEAN Chairmanship Brunei Darussalam 2021 "We Care, We Prepare, We Prosper" which aims to ensure the welfare and livelihoods of the community, to adapt and overcome any future challenges in achieving a sustainable ASEAN Community.
- 54. Finally, Hon. Pehin hoped that the spirit of brotherhood of ASEAN will bring the 42nd AIPA General Assembly a success.

VI. STATEMENTS OF THE AIPA SECRETARY GENERAL AND ASEAN SECRETARY GENERAL

55. Hon. Nguyen Tuong Van, Secretary General of AIPA, and H.E. Dato Lim Jock Hoi, Secretary General of ASEAN, presented their statements at the First Plenary Session of the 42nd AIPA General Assembly.

VII. STATEMENTS OF THE HEADS OF DELEGATIONS OF OBSERVER PARLIAMENTS

56. Head of Delegation of Observer Parliaments including Australia, Belarus, Canada, People's Republic of China, European Parliament, India, Republic of Korea, Morocco, Norway, Russian Federation, and Timor Leste presented their statements live and via prerecorded video at the First Plenary Session of the 42nd AIPA General Assembly.

VIII. STATEMENTS OF THE HEADS OF DELEGATIONS OF GUESTS OF THE HOST

57. Heads of Delegation of Guest of Host including Hon. Dr. Thida Oo of Myanmar, Hon. Mr. Martin Chungong of Inter-Parliamentary Union, and H.E. Tony Smith of Asia-Pacific Parliamentary Union presented their statements via pre-recorded video at the First Plenary Session of the 42nd AIPA General Assembly.

IX. MESSAGES OF THE HEADS OF STATES/GOVERNMENTS

- 58. The 42nd General Assembly of AIPA received messages from the following Heads of States/Governments;
 - His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam
 - His Majesty Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, the King of the Kingdom of Cambodia
 - H.E. Mr. Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia
 - H.E. Mr. Thongloun Sisoulith, President of the Lao People's Democratic Republic
 - H.E. Mr. Rodrigo Roa Duterte, President of the Republic of the Philippines
 - H.E. Mdm. Halimah Yacob, President of the Republic of Singapore
 - H.E. General Prayut Chan-o-cha (Ret.), Prime Minister of the Kingdom of Thailand
 - H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc, President of the Socialist Republic of Viet Nam

X. COMMITTEE MEETINGS

59. The Committees proceeded with their meetings to consider the agenda assigned by the General Assembly.

Executive Committee

- 60. The Executive Committee Meeting was convened via email communication from 3 August 2021 13 August 2021 to prepare the programme, agenda and other relevant matters pertaining to the General Assembly. The meeting was presided by His Excellency Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib, President of 42nd AIPA and Speaker of the Legislative Council of Brunei Darussalam. The Executive Committee endorsed Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, the President of National Assembly of Cambodia as the vice-chair of the meeting.
- 61. The Executive Committee received a proposal of an emergency item from Indonesia in the form of Draft Resolution on "Parliamentary Support on the Situation in Myanmar". In this regard, the Agenda Items of the 42nd AIPA General Assembly were updated subsequently, and it was decided that further discussion on this matter shall take place in the Committee Meeting of Political Matters.
- 62. The Executive Committee agreed to adjust the meeting of the Political Committee on Tuesday, 24 August 2021, and the Second Plenary Session on Wednesday, 25 August 2021. The meeting of the Political Committee on 24 August 2021 shall now begin at 9:30 am (GMT+8), and the Second Plenary on 25 August 2021 shall commence at 2:30 pm (GMT+8).
- 63. Members of the Executive Committee approved the nomination of H.E. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap from Cambodia, and Hon. Dr. Fadli Zon from Indonesia, for the AIPA Distinguished Service Award. Further discussion on this matter will take place in the Organizational Committee Meeting.

- 64. The Executive Committee took note of the views received from AIPA Members with regards to the observer applications. Discussion on the Accreditation of the applicants shall take place at the Meeting on Organizational Matters, and the accreditation shall then be granted upon the adoption of the relevant resolutions at the AIPA General Assembly.
- 65. It was noted by the Executive Committee that the National Assembly of Cambodia agreed to accept the AIPA Presidency and host the 43rd AIPA General Assembly. The date and venue will later be announced.

Meeting of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA)

66. The Meeting of the Committee of Women Parliamentarians of AIPA (WAIPA) was chaired by Hon. Ms. Siti Rozaimeriyanty Dato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman. The Committee considered and approved one (1) Resolution for adoption by the General Assembly:

Resolution on Promoting Women's Economic Empowerment in The Future of Work and Post Pandemic Recovery through Digital and Financial Inclusion.

67. The Committee was in consensus that the financial inclusion and digital access are essential for promoting women's economic empowerment in the future work and post-pandemic recovery. Thus, the Committee called upon the ASEAN Member States to: 1) strengthen inclusive digital strategies to address gender digital divide whilst managing digital security and cybersecurity; 2) to build network and cooperation at all levels in developing the capacity of women, ensuring that jobs are provided for women, and conducting an impact research of COVID-19 on ASEAN women labours to map out a post-pandemic plan, and 3) to develop and enhance a responsive and effective upskilling capacity for women and girls.

Committee on Political Matters

68. The Committee on Political Matters was chaired by Hon. Ms. Nik Hafimi Abdul Haadii. The Committee considered and approved four (4) Resolutions for adoption by the General Assembly:

Resolution on the Adoption of the Report of the 12th AIPA Caucus.

69. The Committee unanimously approved the Report of the 12th AIPA Caucus for adoption by the General Assembly.

Resolution on Enhancing Cybersecurity and Data Protection Towards a Resilient Cyberspace in ASEAN.

70. The committee shared concerns on the increasing threats to cybersecurity and data protection following the development of e-commerce. Recognizing the importance of cyber security to maximize the benefits of digitalization for socio-economic and political development, the Committee noted the vital role played by AIPA Member Parliaments in ensuring cybersecurity and data protection in the region through the laws, policies, and regulations of ASEAN Member States.

Resolution on Fostering Human Security to Achieve Digital Inclusion in ASEAN.

71. The Committee shared the views that digital inclusion is one of the key pillars of COVID-19 recovery and achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), and human security is an important approach in identifying and addressing widespread and crosscutting challenges to the survival, livelihood and dignity of the people in the region. The Committee agreed that AIPA Member Parliaments shall: 1) maximize the utilization of AIPA as a platform in promoting human security to achieve digital inclusion through meaningful dialogues and exchange of best practices, 2) reinforce parliamentary diplomacy to support and complement the diplomatic efforts by their States/Governments.

Resolution on Promoting Parliamentary Diplomacy to Move the ASEAN Community Forward.

72. The Committee agreed that as representatives of the ASEAN peoples, the AIPA Member Parliaments shall serve as a strong link for the rules-based, people-centered and people-oriented ASEAN Community through parliamentary diplomacy. The Committee agreed to strengthen parliamentary diplomacy through all levels of AIPA activities to move the ASEAN Community forward. The Committee also agreed to enhance parliamentary diplomacy between AIPA and the international community. Further, the Committee encouraged ASEAN Member States to actively join AIPA activities, to promote synergy between AIPA and ASEAN.

Draft Resolution on Parliamentary Support on the situation in Myanmar

73. Indonesia presented the proposal of Draft Resolution on Parliamentary Support to the Situation in Myanmar, calling to bring peace, stability and democracy back to the country. The AIPA Member Parliaments in the Committee exchanged views on the Draft Resolution consequently. They expressed their deep concerns over the situation in Myanmar and called for efforts of all parties to seek a peaceful solution in the interests of the people. They also expressed their full support for the complete and immediate implementation of the Five-Point Consensus of the ASEAN Leaders' Meeting and welcomed the appointment of the Special Envoy of the ASEAN Chair to facilitate constructive and inclusive dialogue among all parties' concerned towards a peaceful solution. In addition, the Committee also called for the delivery of humanitarian assistance through the AHA Centre. However, as consensus was not reached, the Committee decided to not further discuss the Draft Resolution. Indonesia, as the proponent of the Draft Resolution, respected the discussion, but affirmed its position for reservation to the Resolutions (item 1 to 4) of the Committee on Political Matters.

Committee on Economic Matters

74. The Committee on Economic Matters was chaired by Hon. Ms. Siti Rozaimeriyanty Dato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman. The Committee considered and approved two (2) Resolutions for adoption by the General Assembly:

Resolution on Promoting Inclusive Digital ASEAN to Empower MSMEs And Strengthen the ASEAN Economic Integration.

75. The Committee firmly supported the view on the important role of digital technology and MSMEs in strengthening ASEAN's economic activity and connectivity. Recognizing the impact and challenges posed by the COVID-19 to the economy, especially MSMEs, the Committee pointed out the need to develop the MSMEs' capabilities and networking. Thus, the Committee agreed to resolve this by promoting policies and legislation towards harmonization for ASEAN economic digital integration among ASEAN Member States and encouraging the digital economy and transformation for MSMEs.

Resolution on the Post COVID-19 Economic Recovery: Tourism Cooperation in ASEAN.

76. The Committee reaffirmed the commitment of the AIPA in supporting the ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025 by re-prioritizing activities and projects aimed at revitalizing the tourism in the region after overcoming the COVID-19 pandemic. Through the Resolutions, the Committee also supported the vision for ASEAN Tourism to 2025 whereby ASEAN aims to be a safe and quality tourist destination offering a unique, diverse ASEAN experience, and commit to be a responsible, sustainable, inclusive and balanced tourism development.

Committee on Social Matters

77. The Committee on Social Matters was presided over by Hon. Ms. Khairunnisa Haji Ash'ari, Member of the Legislative Council of Brunei Darussalam. The Committee considered and approved four (4) Resolutions for adoption by the General Assembly:

Resolution on the Adoption of the 4th AIPACODD Report and Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges Towards Drug-Free ASEAN

- 78. The Committee considered and adopted the Report of the meeting of the 4th AIPA Advisory Council on Dangerous Drugs (AIPACODD) and the Resolution on Prevailing the Contemporary and Responsive Challenges Towards Drug-Free ASEAN which was held via videoconference on 24th May 2021, hosted by the Legislative Council of Brunei Darussalam at the International Convention Centre, Berakas, Brunei Darussalam.
- 79. The Resolution emphasised on commanding the AIPA Member Parliaments to reaffirm its stance of zero tolerance approach, introduce effective measures, reinforce existing policies, promote further cross-border cooperation and strengthen cooperation with drug law enforcements agencies, national authorities and other institutional bodies to ensure the commitment of AIPACODD in its strive towards a drug-free ASEAN.

Resolution on Strengthening Cooperation and Enhancing Digital Inclusion to Mitigate the Impacts of Climate Change.

80. The Committee shared the same concern on the vulnerability of the region to the climate change threats that could affect the vital yet vulnerable segments of the economic sectors. In this subject, the Committee acknowledged the importance of regional cooperation and

the role of digital technology in advancing climate action and reducing the risk of climate change in the region. Further, the Committee unanimously agreed to collaborate in enhancing the management, monitoring, warning, reporting information on climate change mitigation, resilience, and adaptation, by making use of technology. The Committee also urged the ASEAN Member States to strengthen climate financing and enhance opportunities for technical assistance.

Resolution on Localising the Sustainable Development Goals for Effective National Implementation.

81. The Committee emphasized that Localising the SDGs will accelerate the implementation of the 2030 Agenda to be relevant and beneficial to the people of ASEAN. Hence, the Committee agreed that as the people's elected representatives, Parliamentarians should play an active role to ensure laws and policies contributed to achieving the 2030 Agenda. In connection with the theme of the 42nd AIPA General Assembly, the Committee acknowledged the potential of digitalization in providing timely data availability, data accessibility, and data quality, so the progress of the implementation of the National Action Plan for the 2030 Sustainable Development Agenda can be effectively monitored.

Draft Resolution on Technology to Facilitate Greater Election Participation.

82. Following objections from some AIPA Member Parliaments, and a proposal to postpone the deliberation of the Draft Resolution to the next AIPA General Assembly, complying with the principle of consensus, the Committee decided to not proceed with the deliberation of the Draft Resolution.

Committee on Organizational Matters

83. The Committee on Organizational Matters was presided over by Hon. Mr. Haji Abdul Hamid Sabli Haji Arshad. The Committee discussed and approved fifteen (15) Resolutions for adoption by the General Assembly:

Resolution on Financial Report 2020-2021.

84. The resolution of the Financial Report of the AIPA Secretariat was adopted by the Organizational Committee. The Members of the Committee shared their views, comments and suggestions to the AIPA Secretariat in managing the Special Fund and in absorbing expenditures covered from Regular Fund as well as in ensuring that expenses comply with the procedures and rules of AIPA Secretariat including to secure savings. AIPA Secretariat is also requested to prepare the list of fixed assets.

Resolution on Granting Permission to Use Special Funds for the Payment of Cost-Sharing of the New Premises of AIPA Secretariat and for the Minor Adjustment in the Salary of the Locally Recruited Staff of the AIPA Secretariat.

85. The Members of the Committee expressed their appreciation to AIPA that during the current global pandemic, AIPA is able to convene AIPA meetings and activities virtually. Hence, the Committee unanimously agreed to adopt the resolution. The Committee

reiterated its suggestion to transfer the Special funds to regular funds for accounting purposes.

Resolution on Budget Estimation 2021-2022.

86. The Committee reached consensus to adopt the resolution on the budget estimation for 2020-2021 and requested AIPA to ensure to utilize the budget in a prudent and conservative manner.

Resolution on Secretariat's Annual Report 2020-2021.

87. The Committee unanimously adopted the Annual Report of the AIPA Secretariat.

Resolution on Accrediting the Parliament of Ukraine as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

88. The Committee welcomed the Parliament of Ukraine and agreed to grant them the Observer Status of AIPA. Hence, the Resolution was adopted.

Resolution on Accrediting the Parliament of Pakistan as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

89. The Committee also agreed to grant the Parliament of Pakistan the Observer Status of AIPA. The Resolution was adopted accordingly.

Draft Resolution on Accrediting the Parliament of Georgia as an Observer of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).

90. As consensus was not reached, the Committee decided to hold in abeyance the application of the Parliament of Georgia as an observer in AIPA.

Resolution on the Amendments of AIPA Statutes.

91. The Amendments to the AIPA Statutes were developed upon the discussion from the Working Group Meeting on the Guiding Rules and Procedure for the Hosting of the AIPA General Assembly on 5 May 2021. Through the discussion, the Committee acknowledged that amending the AIPA Statutes is important to maintain administrative order and uniformity in the proceedings. Hence, the committee agreed to adopt the amendment to the AIPA Statutes as proposed in the resolution.

Resolution on Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly.

92. Taking into consideration the outcome of the Working Group Meeting on the Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly on 5 August 2021, and following the adoption of the amendment to the AIPA Statutes, the members of the Committee of the Organizational Matters unanimously approved the Guiding Rules and Procedures for the Hosting of the AIPA General Assembly.

Resolution on Guidelines and Procedures of the AIPA-ASEAN Hearing.

93. The Committee welcomed the initiative and has adopted the resolution on Guidelines and Procedures of the AIPA-ASEAN Hearing. The Committee further proposed a study to be conducted to explore and discuss the best way possible for exchanges of ideas between the two institutions.

Resolution on Rules and Procedures of the Meeting of the Young Parliamentarians of AIPA.

94. In conjunction with the Resolution adopted in 2020, AIPA Secretariat has prepared the draft Rules and Procedures of the Meeting of the AYP. The Committee reiterated its support to have more Young Parliamentarians to be involved in the AIPA Meetings and agreed to organize an Ad Hoc Working Group to further discuss some provisions of the rules of procedure.

Resolution on Establishment of the AIPA-EP Dialogue.

95. The Committee welcomed and appreciated the initiative from the European Parliament to maintain communication and conduct a series of activities with AIPA through the establishment of AIPA-EP Dialogue. The Committee supported and approved the adoption of the resolution.

Resolution on AIPA Distinguished Service Award to H.E. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap (Cambodia).

96. The Committee valued the outstanding contribution and service of H.E. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap towards the pursuit of the goals and objectives of AIPA. Taking that into consideration, The Committee unanimously agreed to confer the AIPA Distinguished Service Award to H.E. Post. Dr. Kittisethabindit Cheam Yeap as recognition of his meritorious services to AIPA.

Resolution on AIPA Distinguished Service Award to Hon. Dr. Fadli Zon (Indonesia).

97. The Committee also valued the outstanding contribution and service of Hon. Dr. Fadli Zon towards the pursuit of the goals and objectives of AIPA. Further, the Committee unanimously agreed to confer the second AIPA Distinguished Service Award in this year's General Assembly to Hon. Dr. Fadli Zon as recognition of his meritorious services to AIPA.

Resolution on Appreciation of the President of AIPA

98. The Committee on Organizational Matters expressed its high appreciation to His Excellency Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib for his leadership during his term as the President of AIPA. Hence, the Committee unanimously adopted the Resolution.

Resolution on Date and Venue of the 43rd AIPA GA

99. The Committee adopted the Resolution on Date and Venue of the 43rd AIPA General Assembly to be held in the Kingdom of Cambodia in September 2022.

XI. 43RD GENERAL ASSEMBLY OF AIPA

100. The General Assembly accepted the kind offer of Cambodia to host the 43rd General Assembly of AIPA in 2022.

XII. APPRECIATION TO HOST COUNTRY

- 101. The Delegations attending the General Assembly expressed their sincere appreciation to the Government of His Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam and the Legislative Council of Brunei Darussalam for their excellent arrangements made for the 42nd General Assembly of AIPA.
- 102. The 42nd General Assembly of AIPA was held in the traditional ASEAN spirit of friendship, brotherhood and cooperation, to cohesive and responsive of ASEAN Community.



THE 42ND GENERAL ASSEMBLY OF ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA) 23RD – 25TH AUGUST 2021 INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE BANDAR SERI BEGAWAN, BRUNEI DARUSSALAM



"FORGING PARLIAMENTARY COOPERATION IN DIGITAL INCLUSION TOWARDS ASEAN COMMUNITY 2025"

JOINT COMMUNIQUÉ OF THE 42ND GENERAL ASSEMBLY OF AIPA

Signed in Brunei Darussalam on the Twenty Fifth Day of August, in the Year Two Thousand and Twenty One:



For Legislative Council of Brunei Darussalam (BRUNEI DARUSSALAM)



Hon. Pehin Orang Kaya Pendikar Alam Dato Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Dato Paduka Awang Haji Sabtu



For the National Assembly of the Kingdom of Cambodia (CAMBODIA)

Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei HENG SAMRIN



For the Dewan Perwakilan
Rakyat of the Republic of
Indonesia
(INDONESIA)

Provinc.

H.E. Dr (HC). Puan Maharani



For the National Assembly of Lao PDR (LAO'S PEOPLE DEMOCRATIC REPUBLIC)



H.E. Dr Xaysomphone Phomvihane



For the Parliament of Malaysia (MALAYSIA)

Pour ...

H.E Datuk Azhar Azizan Harun



For the Congress of the Philippines (PHILIPPINES)



Hon. Mr. Paulino Salvador "Doy" C. Leachon



For the Parliament of Singapore (SINGAPORE)



H.E. Mr. Tan Chuan-Jin



For the National Assembly of Thailand (THAILAND)

C. Lukpai

H.E. Mr. Chuan Leekpai



For the National Assembly of Viet Nam
(VIET NAM)

Dulue

H.E. Mr. Vuong Dinh Hue

His Excellency Pehin Orang Kaya Seri Lela Dato Seri Setia
Awang Haji Abdul Rahman bin Dato Setia Haji Mohamed Taib

THE PRESIDENT OF THE 42nd AIPA AND

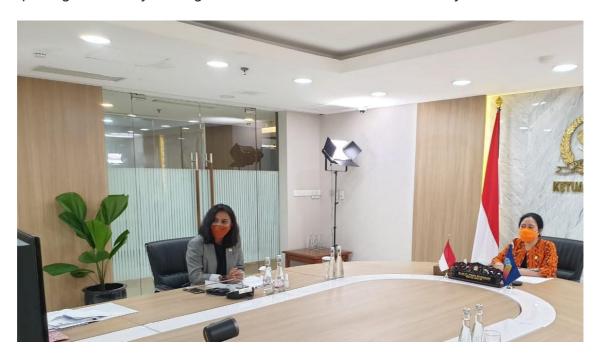
SPEAKER OF THE LEGISLATIVE COUNCIL OF

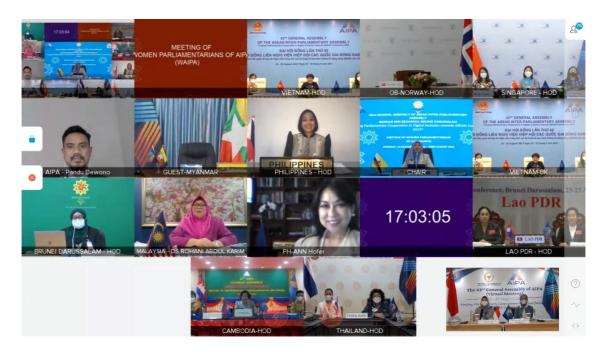
BRUNEI DARUSSALAM

<u>DOKUMENTASI SIDANG UMUM KE-42</u> ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)



Ketua DPR RI, DR. (H.C.) Puan Maharani (F-PDIP/A-188) didampingi oleh Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, MCOMN&MEDIAST (F-PDIP/A-262) menghadiri Opening Ceremony Sidang Umum ke-42 AIPA dan First Plenary secara virtual





Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos, M.Si (F-P.Gerindra/A-78) dan Arzeti Bilbina, SE, MAP (F-PKB/A-32) menghadiri Sidang Women of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) secara virtual





Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon, SS, M.Sc. (F-P.Gerindra/A-86) bersama Ir. H. Moch. Ichsan Firdaus (F-P.Golkar/A-292) dan Muslim, S.HI, MM (F-P.Demokrat/A-523) menghadiri Sidang Komisi Politik AIPA secara virtual





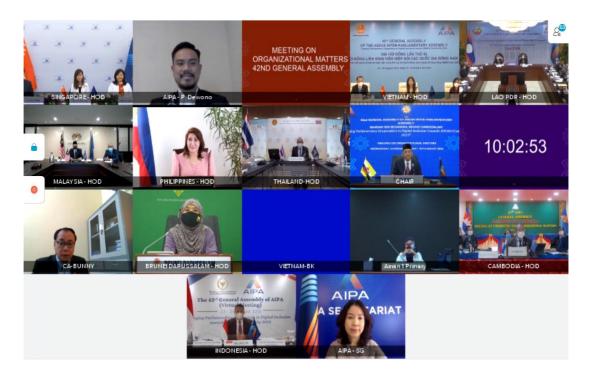
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN/A-487) dan I Gusti Agung Rai Wirajaya, SE, MM. (F-PDIP/A-234) menghadiri Sidang Komisi Ekonomi AIPA secara virtual





Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana, MBA (F-P.Demokrat/A-563) dan Arkananta Akram, ST, BE (Hons), M.Eng, M.Sc (F-P.Nasdem/A-392) menghadiri Sidang Komisi Sosial AIPA secara virtual



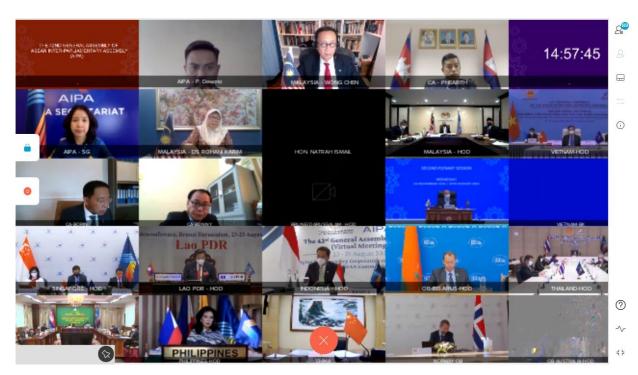


Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng (F-PKS/A-422) menghadiri Sidang Komisi Organisasi AIPA secara virtual





Wakil Ketua DPR RI Bidang KORPOLKAM Dr. H.M. Azis Syamsuddin, SH.,SE.,MAF.,MH (F-P.Golkar/A-282) menghadiri Sidang Second Plenary dan Closing Ceremony Sidang Umum ke-42 AIPA secara virtual



Kliping Berita

Sidang AIPA ke-42, Parlemen Indonesia Usulkan Resolusi Krisis Myanmar

BKSAP DPR RI menilai pengambilalihan paksa Pemerintahan Myanmar oleh militer sebagai langkah mundur dalam demokrasi dan dapat mengganggu stabilitas kawasan.



Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 25 Agustus 2021 | 11:59 WIB



Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, yang juga merupakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon
- Tangkapan layar Youtube Fadli Zon Official

Bisnis.com, JAKARTA - Delegasi Indonesia mengusulkan resolusi krisis untuk penanganan Myanmar Sidang Umum ke-42 Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang diselenggarakan secara virtual dari Brunei Darussalam, Selasa (24/8/2021).

Resolusi itu termuat dalam draf *Resolution on Parliamentary Support on the Situation in Myanmar* yang disiapkan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon memandang peristiwa pengambilalihan paksa Pemerintahan Myanmar oleh militer sebagai langkah mundur dalam demokrasi dan dapat mengganggu stabilitas kawasan. Oleh karena itu, BKSAP melalui fungsi diplomasi parlemen mendukung segala upaya untuk mewujudkan penyelesaian konflik di Myanmar secara damai.

Menurutnya, draf resolusi yang diusulkan parlemen Indonesia merupakan dukungan bagi perkembangan demokrasi, *rule of law*, dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) di kawasan dalam Sidang Umum (SIUM) AIPA ke-42.

"Kita mengusulkan draft resolusi tentang situasi di Myanmar yang sejalan juga dengan 5 konsensus para pemimpin ASEAN yang diadopsi pada bulan April lalu," kata Fadli, seperti dilansir laman resmi DPR RI, Rabu (25/8/2021).

Adapun lima poin Konsensus Asean untuk perdamaian di Myanmar yakni, pertama, kekerasan harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

Baca Juga: Utusan Khusus untuk Myanmar Tegaskan Minta Akses Menyeluruh

Kedua, dialog konstruktif antara semua pihak terkait mulai mencari solusi damai untuk kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua Asean akan memfasilitasi mediasi.

Keempat, Asean akan memberikan bantuan kemanusiaan, sedangkan kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Fadli menuturkan, penyelesaian krisis di Myanmar merupakan kepentingan bersama bagi semua negara anggota Asean. Langkah prioritas yang perlu dilakukan adalah memulihkan demokrasi, menjaga perdamaian, stabilitas serta kesejahteraan kawasan.

Baca Juga: Menteri Luar Negeri Asean Tak Akui Rezim Junta Militer Myanmar

"Bersama BKSAP DPR RI, saya juga mendukung penuh pemerintah Indonesia sebagai *peacemaker*, *problem solver* dan *bridge builder* dalam menyelesaikan krisis Myanmar." ujamya.

Namun, Fadli menyadari tantangan menyelesaikan konflik juga menghambat perdamaian di Myanmar. Pasalnya, ada ketidaksamaan pandangan dalam memandang kasus Myanmar, serta prinsip *non interference* (tidak ikut campur) oleh negara Asean.

"Tadi, negara Laos dan Vietnam menolak untuk mendiskusikan ini sehingga terjadi perdebatan yang cukup hangat di Komite Bidang Politik yang selalu dalihnya itu adalah konsensus," terang Fadli.

"Tadi, negara Laos dan Vietnam menolak untuk mendiskusikan ini sehingga terjadi perdebatan yang cukup hangat di Komite Bidang Politik yang selalu dalihnya itu adalah konsensus," terang Fadli.

Terkait situasi Myanmar, Fadli berharap negara-negara Asean lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip *non-interference*.

"Menurut saya, sulit mengambil keputusan jika selalu diarahkan kepada konsensus, termasuk untuk hal-hal yang sebenarnya sangat suportif dan baik bagi kepentingan negara-negara ASEAN sendiri," pungkas politisi Partai Gerindra itu.

Sidang Umum AIPA ke-42 diselenggarakan pada 23-25 Agustus 2021 oleh Brunei Darussalam sebagai tuan rumah. Forum bertajuk 'Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion towards Asean Community 2025 ini membahas dan mengesahkan draf-draf resolusi di bidang politik, ekonomi, sosial, serta isu-isu tentang perempuan di Kawasan regional.

AIPA merupakan organisasi parlemen regional yang menghimpun parlemen negara-negara Asean. Saat ini AIPA beranggotakan 10 parlemen yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Sumber berita:

https://kabar24.bisnis.com/read/20210825/15/1433780/sidang-aipa-ke-42-parlemen-indonesia-usulkan-resolusi-krisis-myanmar

Dari Sidang AIPA ke-42, Putu Supadma Tekankan Recovery Sektor Pariwisata

25/08/2021, 9:45 PM











Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana. (Foto: BKSAP DPR RI)

JAKARTA, balipuspanews.com – Pemanfaatan teknologi digital dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi domestik maupun regional pasca-pandemi Covid-19 menjadi perhatian besar Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI. Apalagi Kawasan ASEAN maupun Indonesia diprediksi memiliki potensi ekonomi digital sangat besar.

"Hal ini juga sejalan dengan ratifikasi ASEAN Agreement On Electronic Commerce atau Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Elektronik yang sedang dibahas Komisi VI DPR RI dan akan segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI," kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana disela-sela Sidang Umum ke-42 forum Parlemen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (24/8/2021).

Penyelenggaraan Sidang Umum ke-42 AIPA diselenggarakan di Brunei Darussalam pada 23 hingga 25 Agustus 2021 selaku tuan rumah yang dibuka Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah.

Putu Supadma menambahkan digitalisasi di kawasan ASEAN menjadi penting dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Menurut politisi Partai Demokrat ini, ASEAN berpotensi menjadi pemain besar dalam ekonomi berbasis digital sekaligus menjadikan ekonomi digital sebagai kekuatan utama ASEAN.

Baca Juga: <u>Kunker di Jateng, Puan Cek Stabilitas Harga Sembako dan</u> <u>Kawasan Kering Air</u>

Ia menyakini, kerja sama ini mampu meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa serta akses terhadap produk dalam negeri, mengembangkan iklim usaha yang kondusif, dan sekaligus memperluas pasar bagai UMKM dalam negeri untuk dapat bersaing di ASEAN.

Selain itu, sambung Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bali ini, dibutuhkan kerja sama antarnegara ASEAN dalam membantu pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling terpukul dalam pandemi.

Kerja sama tersebut mencakup penerapan dan langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan antara pengunjung domestik dan internasional ke Asia Tenggara.

"Saya ingin menekankan satu hal bahwa isu recovery tourism menjadi poin penting dalam bagaimana ASEAN ke depan dapat kembali memulihkan ekonominya," ucap Supadma.

Sementara itu, dalam Sidang Komisi Sosial, delegasi Indonesia mempromosikan tiga draf resolusi, masing-masing tentang digitalisasi dalam penanganan dampak perubahan iklim, lokalisasi Sustainable Development Goals (SDGs), dan penerapan teknologi dalam pemilu melalui penerapan sistem e-voting. Delegasi Indonesia mendukung sepenuhnya penggunaan teknologi termasuk dalam penanganan dampak perubahan iklim.

Baca Juga: <u>Kominfo Luncurkan Buku Elektronik "Mudik Aman dan</u> <u>Sehat"</u>

Selain itu, Putu Supadma juga menekankan pentingnya lokalisasi SDGs yang dapat berdampak positif bagi percepatan pencapaian target pembangunan di daerah.

Lokalisasi ini juga perlu dikaitkan dengan kearifan lokal sehingga SDGS dapat membumi, terutama di Indonesia yang kaya dengan kearifan lokal.

"Kita tidak mau SDGs hanya sebagai wacana, tetapi dibumikan atau localising istilahnya. Konsep kearifan lokal menjadi poin penting yang harus dilihat," tegasnya.

Penulis : Hardianto

Editor : Oka Suryawan

Sumber berita:

https://www.balipuspanews.com/dari-sidang-aipa-ke-42-putu-supadma-tekankan-recovery-sektor-pariwisata.html

Remarks by NA Chairman Vuong Dinh Hue at 42nd AIPA General Assembly

Chairman of the National Assembly of Vietnam Vuong Dinh Hue on August 23 delivered a speech at the first plenary session of the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA-42) via videoconference.

y, August 23, 2021 15:51 https://link.gov.vn/cg0ixV9i

Like 0 Share

NEWS

President Nguyen Xuan Phuc sends welcoming remarks to AIPA-42 General Assembly

AIPA-42 opening

Preparation for Vietnam's attendance at 42nd AIPA General

contributions to AIPA's reform: AIPA Secretary Saturday, August 21, 2021

Vietnam to affirm support for coop in COVID-19 fight at 42nd AIPA General Assembly

arks to AIPA-42

Monday, August 23, 2021

NA Chairman Vuong Dinh Hue attends AIPA-42 opening ceremony Monday, August 23, 2021

Preparation for Vietnam's attendanc at 42nd AIPA Genera Assembly inspected Sunday, August 22, 202

Vietnam makes noted contributions to AIPA's reform: AIPA Secretary

Vietnam to affirm

support for cooperation in COVID-19 fight at 42nd AIPA General Assembly

General Assembly

RELATED

NEWS

LIÊN NGHỊ VIỆN HIỆP HỘI CÁC QUỐC GI 23 - 25 August 2021/ Ngày 23 - 25 tháng 8 năm 2021

embly Chairman Vuong Dinh Hue (centre) attends AIPA-42 on August 23

Hanoi (VNA) – Chairman of the <u>National Assembly</u> of Vietnam Vuong Dinh Hue on st 23 delivered a speech at the first plenary ion of the 42nd General Assembly of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA-42) via videoconference.

ASEAN Community 2025", the 42nd AIPA General Assembly is held by Brunei from August 23-25.

Following is the full text of Hue's remarks.

Excellency Pehin Dato Abdul Rahman Taib, Speaker of the Legislative Council of Brune Darussalam, President of AIPA 42,

Excellencies Speakers and Heads of Delegation of AIPA Member and Observer Parliaments,

Esteemed delegates

On behalf of the Vietnamese National Assembly, allow me to extend my warmest greetings to Excellencies President of AIPA 42, AIPA Parliamentary leaders, Observer Parliaments, the AIPA Secretary General, ASEAN Secretary General and delegates attending the 42nd AIPA General Assembly. In celebration of the Islamic New Year, may I also convey my best wishes to Excellency President of AIPA 42, Negara Brunei Darussalam, and Muslim friends in ASEAN. I would like to thank the Legislative Council of Brunei Darussalam for its efforts and active preparations to make this event happen via videoconference.

In the past year, the world and the ASEAN region continued to face tremendous difficulties and challenges posed by the COVID-19 pandemic, causing casualties and disruptions of the regional supply chain. This has significantly impacted economic growth and exacerbated social inequality, including digital inequality and social welfare More than ever, the COVID-19 pandemic has underscored the urgency across the board pertaining to state governance, and adjustments of policies and development goals. It has also emphasised the demand for digitalization and the building of a digital economy, so as to timely respond to the pandemic and sustain socio-economic

Despite the effects of the ongoing COVID-19 pandemic and the complex, unpredictable shifts in the regional and international geo-political landscape, we are delighted to note that the ASEAN Community has continued to maintain solidarity, unity and self-reliance and uphold its stern resolve and centrality. Our Community has timely exerted collecti efforts in response to the pandemic since its outbreak. As we weather tempestuous challenges, the close bonds and mutual sharing among ASEAN members and their peoples are further bolstered. Via such initiatives as the ASEAN COVID-19 Respons Fund, the Regional Reserve of Medical Supplies, the Standard Operating Procedures for public health emergencies, and particularly the ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance initiative. ASEAN members have worked closely together to strengthen the responsiveness of each country and gradually contain the pandemic. Given a comprehensive approach conducted in tandem with efforts to combat this pandemic, ASEAN is expediting the implementation of measures under the ASEAN Comprehensive Recovery Framework, in which innovation, digitalisation, and the transformation of growth models are considered as drivers to promptly foster

MOST POPULAR



PM Pham Minh Chinh to visit US, attend ASEAN-US Special Summi

VIDEO











RELATED NEWS

President Nguyen Xuar Phuc sends welcoming remarks to AIPA-42 General Assembly Monday, August 23, 2021

NA Chairman Vuong Dinh Hue attends AIPA-42 opening ceremony Monday, August 23, 2021

Preparation for Vietnam's attendance at 42nd AIPA General Assembly inspected Sunday, August 22, 202

Vietnam makes noted reform: AIPA Secretary

Saturday, August 21, 2021

Vietnam to affirm support for cooperal in COVID-19 fight at 42nd AIPA General

The COVID-19 pandemic also constitutes a catalyst for ASEAN's endeavors to accelerate the digitalization of its economy, effectively harness the 4th Industrial Revolution Revolution, narrow the digital gap, and ensure digital equality in the region. I highly commend the 1st ASEAN Digital Ministers' Meeting in January 2021 for approving the ASEAN Digital Masterplan 2025. I also support the efforts to adopt and implement ASEAN's Consolidated Strategy on the 4th Industrial Revolution. Such endeavors would serve to create an innovative ASEAN Community and enhance ASEAN's competitiveness in the global economy.

Ladies and gentlemen

The theme "Forging Parliamentary Cooperation in Digital Inclusion towards ASEAN Community 2025" outlines the need to further build on the vital role of AIPA and its Member Parliaments in accelerating digitalisation, ensuring stable growth and fostering sustainable recovery of ASEAN, thereby maintaining ASEAN's key contributions to regional peace, stability and prosperity. With this in mind, I would like to draw your attention to the following proposals:

First, AIPA Member Parliaments need to complete the legal framework and remove barriers to facilitate the implementation of digital transformation policies, with a view to building the e-Government towards a digital government. It is also necessary to improve the quality of online public services of our Governments and Parliaments. facilitate equitable access to digital services for the people and businesses, increase digital literacy for the vulnerable groups, offer fair, equitable and affordable digital services, and promote the development of a digital economy and society.

Second, we need to encourage the Governments of ASEAN members to carry out concrete programs, action plans and strategies pertaining to digital development. It is also essential to bolster cooperation with partners and international organizations to mprove digital infrastructure, ensure an inclusive digital ecosystem, and narrow the digital gap. I wish to underscore the importance of strengthening digital connectivity and narrowing the digital gap among countries and regions to ensure equitable and sustainable development in ASEAN. I kindly request AIPA to actively lend its assistance to the Governments of ASEAN countries in accelerating the implementation of measures to boost digital connectivity and digital literacy in less-developed areas including sub-regions in ASEAN, under the Master Plan for ASEAN Connectivity 2025 and the Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan IV.

Third, we need to mobilise social resources to develop a digital ecosystem via public private partnership and create incubators to develop digital corporations and start-ups. In particular, it is necessary to align the ASEAN Comprehensive Recovery Framew with the plans of each country to assist their enterprises in enhancing innovation and expediting digitalisation, thereby allowing them to ensure stability and resume production and business activities.

RELATED NEWS

President Nguyen Xuan Phuc sends welcoming remarks to AIPA-42 General Assembly Monday, August 23, 2021 15:08

NA Chairman Vuong Dinh Hue attends AIPA-42 opening ceremony londay, August 23, 2021

Preparation for

Vietnam's attendance at 42nd AIPA General Assembly inspected

Vietnam makes noted contributions to AIPA's reform: AIPA Secretary General

support for cooperat in COVID-19 fight at 42nd AIPA General Assembly

Fourth, we need to improve policies and legal frameworks and support initiatives in the cooperation within ASEAN and between ASEAN and its partners on cyber security, information privacy, data protection and confidence building in the digital sphere. An advanced digital infrastructure and necessary confidence in this field will pave the way for the quick and sustainable development of ASEAN countries.

Ladies and gentlemen,

All efforts to foster national recovery and development can only be conducted in a region of peace, security and stability. I welcome and highly appreciate the endeavors of the Governments of ASEAN members, and the active support of AIPA Member Parliaments in maintaining and promoting dialogue, cooperation and confidence building, upholding the respect for international law, and preventing and reducing risks to stability. These measures would be important contributors to enduring peace. security and stability in the region.

Your Excellency.

Ladies and gentlemen

This year, despite numerous challenges caused by COVID-19, in May, Vietnam successfully held the elections for the 15th National Assembly, and the People's Councils at all levels for the 2021-2026 tenure. In July, Vietnam successfully convened the first session of the 15th National Assembly to elect the key leaderships of the State, National Assembly and Government, and outline the goals to become a modernity oriented industrialized developing country, having graduated from the lower-middle income group by 2025, a developing country with a modern industrial base and an upper-middle income by 2030, and a developed, high-income country by 2045. The National Assembly of Vietnam pledges to continue being an active and responsible AIPA member, for the development of parliamentary diplomacy and the interests of all people in ASEAN.

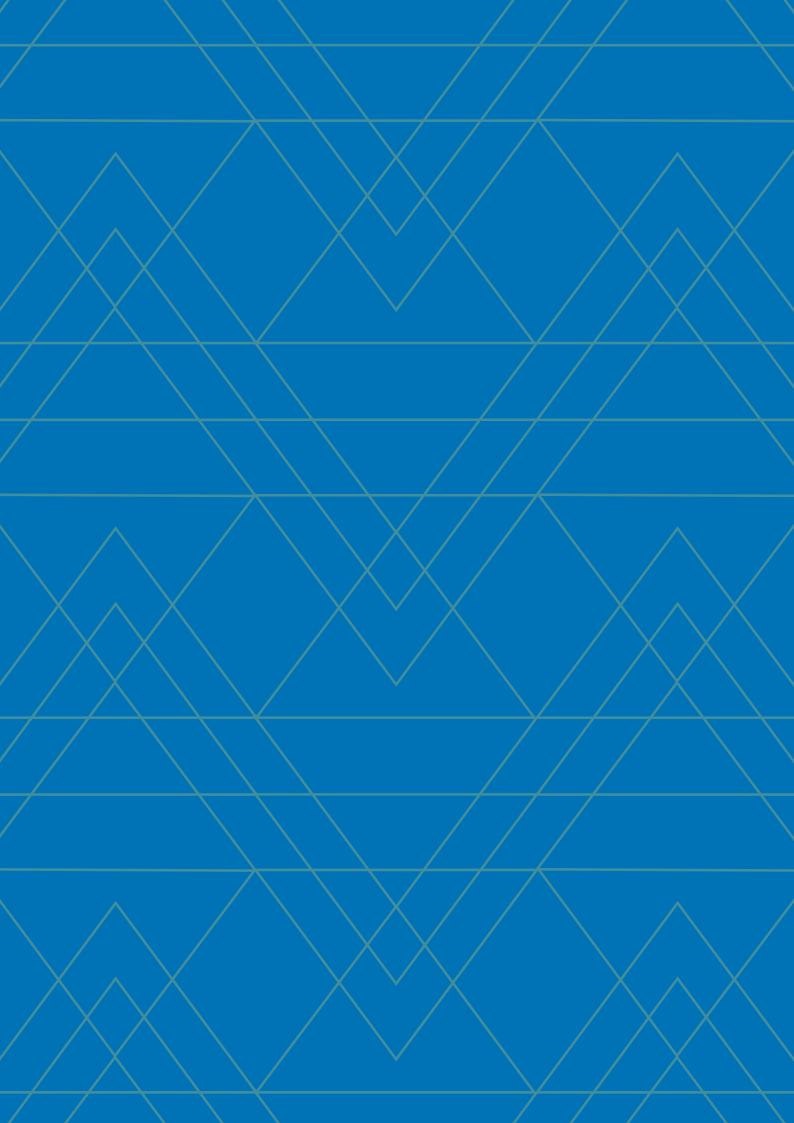
On this occasion, I would like to wish Your Excellency Mr. President and all of you good health and success in your noble missions, as you work alongside Governments and the peoples to overcome current challenges to build a united, strong and prosperous ASEAN Community

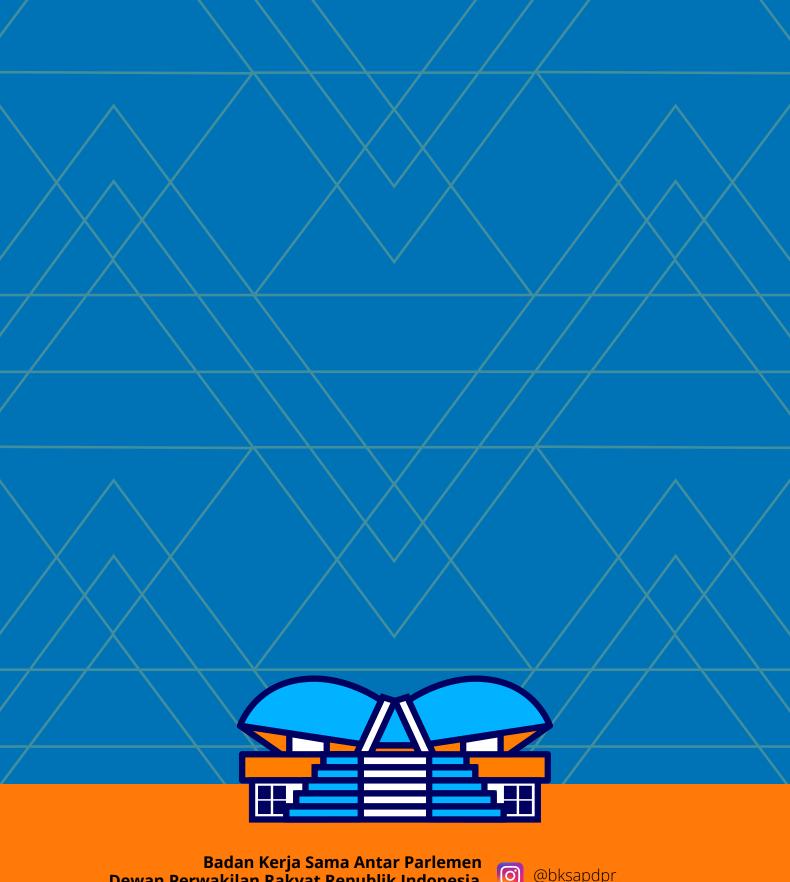
I am confident that, under your presidency and with the active participation of all delegates, the 42nd AIPA General Assembly will be crown with great success.

Thank you./

Sumber berita:

https://en.vietnamplus.vn/remarks-by-na-chairman-vuong-dinh-hue-at-42nd-aipa-general-assembly/206802.vnp





Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Gedung Nusantara III, Lantai 6, Komplek MPR/ DPR/ DPD RI Jln. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

> Telp.: 021-5715842 Faks.: 021-5715295

Email: ksr.bksapdpr@gmail.com | oprbksap@yahoo.com

© @bksapdpr

y @bksapdprri

BKSAP DPRRI

BKSAP DPRRI

http://ksap.dpr.go.id